

VOLUME I TAHUN 2025

ISSN : 3109-1741



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

STATISTIK KEMENTERIAN KEHUTANAN 2024

<https://kehutanan.go.id>



STATISTIK KEMENTERIAN KEHUTANAN 2024

Volume I Tahun 2025



<https://kehutanan.go.id>

STATISTIK

KEMENTERIAN KEHUTANAN

2024

Volume I Tahun 2025

ISSN : 3109-1741

Kode Publikasi : 333.7507

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : 191 Halaman

Penyusun Naskah : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan

Pembuat Sampul : Tim Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan

Foto Sampul : Tim Dokumentasi TN Sebangau

Penerbit : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan

Dicetak oleh : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan

Alamat :

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270, Po Box 6505, Indonesia.

Telepon : (021)-5730348

Faks : (021)-5720189

Situs Web : kehutanan.go.id

Email : pusdatin@kehutanan.go.id



STATISTIK KEMENTERIAN KEHUTANAN 2024

Volume I Tahun 2025

Penanggungjawab

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Ketua Editor

Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor Pelaksana

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi Komunikasi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota Tim Editor

Dedy Lukmansjah, S.Si.

Eri Prasodjo Oktariawan, S.H.

Kontributor

Ditjen Planologi Eka Nurmala Sari, S.Hut., M.Si, Emma Yusrina Wulandari, S.Hut, Fatnarul Hanifah, S.AP, Gitri Prawijiwuri, S.Si., M.Si, Julinda Hernawati, S.Hut., M.SE., M.A, Meniy Ratnasari, S.Hut, Tantri Janiati, S.Hut, Vini Ramafinda Akbar, S.Kom, Imran Haris; **Ditjen KSDAE** Iskandar, S.Hut, Pepen Rivai, A.Md, Kasuma Yotrin, S.Kom, Witriana Astuti, S.Hut; **Ditjen PDASRH** Luthfi Nabil, S.Kom, Fadlan Aulia Rahman, S.Kom; **Ditjen PHL** Rizky Maulana Pujas, A.R.Taufiq Hidayatulloh, Nanik Widayanti, SE, Dian Purnomo, A.Md; **Ditjen Perhutanan Sosial** Eris Maulana, S.Hut., M.A., M.Eng, Nirwansyah Sasongko S, S.Kom, Fajrul Barokah, Wahyudi; **Ditjen Gakkum** Sigit Himawan, S.Hut., M.Si, Endrasworo Wiryawan, S.Hut, Achmad Reza Maulana, S.Hut, Adzani Fawzia, S.Hut; **Itjen** Aditya Giyantono, S.Kom, Muhammad Musa Abdurrohman, A.Md. Kom; **BP2SDM** Andi Witria Rudianto, S.Hut., M.Si, Hasto Nugroho, S.Hut., M.B.A, Teguh Artha, S.Hut; **Biro Umum** Irwan Hidayat, S.Kom, Arlike Firmandia Pramesti, A.Md.Ak; **Biro Perencanaan** Agustina Sandrasari, S.Hut., M.M, Barika Ayu Sabatini, S.Hut; **Biro Hukum** Bayu Arief Pramudito, S.Ikom; **Biro SDM dan Organisasi** Afifah Widodo Puteri, A.Md; **Biro Keuangan** Rifqi Hadi Wibowo, A.Md.Ak; **Biro Humas & KLN** Aldino Ary Widigdo, A.Md, Muhammad Fahrin Alfajri, A.Md. Ak; **Pusjakstra** Alfian Chaniago, S.Kom, Dwita Fitriani Wijayanti, ST; **Pusbanghut Berkelanjutan** Akhmad Marysofa Suparta, S.Hut., M.S, Zamal Wildan, S.Kom; **P2MABHK** Agus Purwanto, ST, Faisal Fadjri, ST; **P2SEMH** Raditya Arief Gautama, A.Md, Yuki Januardi Perdana, S.Kom.

Tim Sekretariat

Rattahpinnusa H.H, S.Sos., M.I.M.; C. Sri Utami Fujiyanti, S.Hut., M.E.; Tutik Sriyati, S.Sos.; Desy Damayanti, S.Pd.; Denny Octavianto, S.T.; Agung Wicaksana, S.Hut.; Vivi Anggraini, A.Md.; Dhea Rizky Hutami, A.Md.; Phury Agathis, S.Hut., M.Sc.; Lisa Khairunisa, SE.; Fahmi Ramadhan, S.Kom.; Rizki Maliki Zidni, S.Stat.; Dian Indah Pratiwi, S.Stat.

Tata Letak

Nisrina Dantiutami, S.I.Kom.; Fikri Habib Ramadhan, S.Kom.

Hak Cipta © 2025

Milik Kementerian Kehutanan

Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

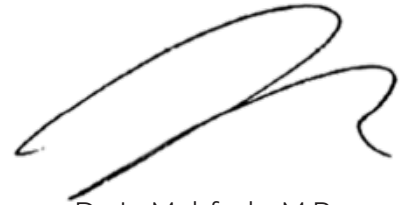
Statistik Kementerian Kehutanan Indonesia 2024 bukan sekedar kumpulan data kehutanan dengan deretan angka, tetapi refleksi dari perjalanan, tantangan, dan arah kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Buku ini disusun untuk menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi hutan dan sektor kehutanan di Indonesia: mulai dari luas dan fungsi kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, perkembangan perhutanan sosial dan kebakaran hutan. Disajikan secara visual, ringkas, dan berbasis data valid, buku ini diharapkan menjadi referensi yang mudah dipahami sekaligus kaya informasi.

Lebih dari itu, penyusunan statistik ini merupakan bagian dari kontribusi nyata Kementerian Kehutanan dalam mendukung visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita yang menekankan pada kedaulatan pangan, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan Indonesia dari pinggiran, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis data.

Di tengah kompleksitas tantangan kehutanan dan perubahan iklim, data adalah alat navigasi yang paling dapat diandalkan. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor publik, swasta, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda untuk menjadikan buku ini sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan, maupun menciptakan inovasi di bidang kehutanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data ini. Kritik dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang. Selamat membaca. Mari kita jaga hutan dengan data yang kuat dan arah yang jelas, demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2025
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kehutanan



Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
NIP. 196708291992031004



<https://kehutanan.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
RINGKASAN	XIII
BAB 1	
PLANOLOGI KEHUTANAN.....	1
Luas Rekalkulasi Penutupan Lahan di Indonesia Tahun 2024.....	3
Angka Deforestasi Netto Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2024.....	5
Angka Potensi Kerapatan Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa.....	6
Angka Potensi Kerapatan Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa.....	7
Angka Potensi Volume Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa.....	8
Angka Potensi Volume Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa.....	9
Angka Potensi Biomassa dan Karbon Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa	10
Angka Potensi Biomassa dan Karbon Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa	11
Luas Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Proses Review RTRWP Tahun 2024.....	12
Luas Persetujuan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Proses Review RTRWP Tahun 2024.....	13
Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Tahun 2024.....	14
Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) Tahun 2024.....	15
Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Tahun 2024.....	16
Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tahun 2024.....	17
Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tahun 2024...	18
Luas Kumulatif Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Tahun 2020 – 2024	19
Luas Kumulatif Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Tahun 2020 – 2024	20
Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan dan Pertanian Tahun 2020 - 2024.....	21
Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024.....	23
Panjang Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024.....	25
Luas Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024.....	26
Luas Perkembangan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2015 - 2024	28
Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survei/Eksplorasi (Tambang) Tahun 2020 - 2024	30
Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survei/Eksplorasi Kegiatan Non Tambang Tahun 2020 - 2024	31

DAFTAR ISI (Lanjutan)

Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang) Tahun 2020 - 2024	32
Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Tambang Tahun 2020 - 2024	33
Luas Perkembangan Lahan Kompensasi Tahun 2020 - 2024	34

BAB 2

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	35
Jumlah Kawasan Konservasi menurut Fungsinya Tahun 2020 - 2024	37
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020 - 2024	37
Jumlah Pemegang Izin Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Aktif Tahun 2024	38
Jumlah Pemegang Izin Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Aktif Tahun 2020 - 2024	40
Jumlah Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2024	42
Jumlah Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2020 - 2024	43
Luas Target dan Realisasi Kawasan Yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Sebagai Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi Tahun 2024	44
Capaian Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi sebagai Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi Tahun 2020 - 2024	45
Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024	46
Jumlah Tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2024	58
Jumlah Tenaga Pengendalian Kebakaran Tahun 2020 - 2024	60
Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan di Kawasan Konservasi Berdasarkan Titik Tertinggi s.d. Tahun 2024	62
Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi Tahun 2020 - 2024	66

BAB 3

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	67
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 - 2024	69
Luas Rehabilitasi Hutan Tahun 2020 - 2024	70
Luas Rehabilitasi Lahan Tahun 2020 - 2024	71
Luas Rehabilitasi Mangrove Tahun 2020 - 2024	72
Luas Lahan Kritis	73
Jumlah Sumur Resapan Air Tahun 2022-2024	74
Jumlah Instalasi Pemanenan Air Hujan/IPAH Tahun 2020 - 2024	75
Jumlah Bangunan DAM Penahan Tahun 2020 - 2024	76
Jumlah Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug Tahun 2020 - 2024	77
Jumlah Penyediaan Bibit Produktif Tahun 2020 - 2024	78
Jumlah Penyediaan Bibit Persemaian Permanen Tahun 2020 - 2024	79
Jumlah Penyediaan Bibit Pusat Persemaian (Skala Besar) Tahun 2022-2024	80

DAFTAR ISI (Lanjutan)

Jumlah Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2020 - 2024	81
BAB 4	
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	83
Luas Arah Pemanfaatan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2024.....	85
Luas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2024.....	86
Nilai Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2024.....	87
Jumlah Tenaga Kerja Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Untuk Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA dan HT Tahun 2024	88
Jumlah Tenaga Kerja Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA Tahun 2020 - 2024.....	89
Jumlah Tenaga Kerja Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK - HT Tahun 2020 - 2024	90
Luas Penanaman Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA dan HT Tahun 2024	91
Luas Penanaman Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA Tahun 2020 - 2024.....	92
Luas Penanaman Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HT Tahun 2020 - 2024	93
Jumlah Produksi Kayu Bulat Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK - HA dan HHK - HT Tahun 2020 - 2024	94
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Pada PBPH Per Kelompok Jenis Tahun 2024.....	95
Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	97
Jumlah Kapasitas Izin Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	98
Nilai Investasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	99
Jumlah Tenaga Kerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	100
Jumlah Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	101
Jumlah Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	102
Jumlah Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar Per Jenis Produksi Tahun 2020 - 2024	103
Jumlah Produksi Plywood Dan Laminated Veneer Lumber (LVL) Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	104
Jumlah Produksi Veneer Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024.....	105
Jumlah Produksi Kayu Gergajian Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	106
Jumlah Produksi Serpih Kayu Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024.....	107
Jumlah Produksi Pulp Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024	108
Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Negara Tujuan Tahun 2020 - 2024	109
Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Jenis Produk Tahun 2020 - 2024	109

DAFTAR ISI (Lanjutan)

Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2020 - 2024 110

Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang Memiliki Sertifikasi Legalitas Dan Kelestarian Tahun 2020 - 2024.....111

Jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Yang Memiliki Sertifikasi Legalitas Dan Kelestarian Tahun 2020 - 2024.....112

BAB 5

PERHUTANAN SOSIAL 113

Luas Pemberian Akses Kelola Masyarakat Terhadap Hutan s.d. Tahun 2024115

Jumlah Luas Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun s.d. 2024.....116

Jumlah Surat Keputusan Perhutanan Sosial s.d. Tahun 2024117

Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa (HD) s.d. Tahun 2024..... 118

Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) s.d. Tahun 2024.....119

Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) s.d. Tahun 2024 120

Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA) s.d. Tahun 2024.....121

Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) s.d. Tahun 2024 122

Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) s.d. Tahun 2024 123

Jumlah Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2020 - 2024..... 124

Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berdasarkan Kelas s.d. Tahun 2024.....125

Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Menjadi Kelas Emas dan Platina Tahun 2020 - 2024 126

Jumlah Pendamping Kelompok Perhutanan Sosial Tahun 2024.....127

Jumlah Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024..... 128

BAB 6

PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN 129

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Tahun 2020 - 2024.....131

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2024132

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Berdasarkan Tipe Tanah Tahun 2020 - 2024.....133

Jumlah Hotspot Berdasarkan Status Lahan Tahun 2024 134

Jumlah Hotspot Tahun 2020 - 2024.....136

Jumlah Sebaran Personil Manggala Agni Berdasarkan Daerah Operasi Tahun 2024.....137

Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi Tahun 2024.....139

Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 - 2024.....140

Jumlah Pengaduan Tahun 2020 - 2024 141

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2024..... 142

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2020 - 2024..... 143

DAFTAR ISI (Lanjutan)

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kategori Pengaduan Tahun 2020 - 2024.....	143
Jumlah Pengawasan Badan Usaha Tahun 2020 - 2024.....	144
Jumlah Pengawasan Badan Usaha Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2020 - 2024	145
Jumlah Penerapan Sanksi Adminisratif Tahun 2020 - 2024	147
Jumlah Penerapan Sanksi Berdasarkan Jenis Sanksi Tahun 2020 - 2024.....	148
Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 Berdasarkan Tipologi Tahun 2020 - 2024	148
Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 Tahun 2020 - 2024	149
Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 Berdasarkan Tipologi Tahun 2024.....	150

BAB 7

INSPEKTORAT JENDERAL	151
Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2024	153
Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi Tahun 2020 - 2024	154

BAB 8

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	155
Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Kelas Tahun 2024	157
Jumlah Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024.....	158
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Komoditas Tahun 2022	159
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Komoditas Tahun 2023	160
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Komoditas Tahun 2024	161
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Tahun 2022 - 2024.....	162
Lulusan Siswa SMK Kehutanan Negeri Yang Kompeten dan Bersertifikat Per Provinsi Tahun 2024.....	163
Jumlah Lulusan Pelatihan LHK Tahun 2024.....	165
Jumlah SDM Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi.....	166
Jumlah SDM Non Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi.....	168

BAB 9

DUKUNGAN MANAJEMEN	170
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenjang Kepangkatan PNS s.d. Tahun 2024.....	172
Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Eselonisasi s.d. Tahun 2024.....	172
Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenis ASN s.d. Tahun 2024.....	173
Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin s.d. Tahun 2024.....	173
Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan s.d. Tahun 2024.....	173



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional s.d. Tahun 2024.....	174
Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Kelompok Usia s.d. Tahun 2024	175
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020 - 2024.....	176
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024.....	177
Nilai Neraca Barang Milik Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.....	187
Pagu Dan Realisasi Belanja Per Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024	188
Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024.....	190

RINGKASAN

Buku Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2024 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian subsektor Kehutanan Indonesia, yang mencakup 9 (sembilan) bidang strategis: Planologi Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dan Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Hutan Lestari, Perhutanan Sosial, Penegakan Hukum Kehutanan, Inspektorat Jenderal, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dukungan Manajemen.

Pada bidang **Planologi Kehutanan**, telah dilakukan rekalkulasi penutupan lahan Indonesia seluas 187.033.061,24 hektar pada tahun 2024. Selain itu, identifikasi deforestasi netto tahun 2024 mencatat angka 175.437,75 hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kegiatan inventarisasi hutan nasional tahun 2024 dilaksanakan pada 954 plot, yang menghasilkan data potensi hutan berdasarkan kerapatan, volume tegakan, serta biomassa dan karbon. Progres penetapan kawasan hutan dalam periode 2020 – 2024 menunjukkan tren peningkatan, dan pada tahun 2024 telah mencapai nilai kumulatif seluas 106.816.442,48 hektar. Dalam bidang **Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem**, terdapat peningkatan jumlah unit penangkar tumbuhan dan satwa liar yang secara kumulatif mencapai 501 unit pada tahun 2024. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, seiring dengan tren positif pada jumlah pengunjung kawasan konservasi.

Bidang **Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan** menggambarkan capaian rehabilitasi hutan dan lahan mencapai puncaknya di tahun 2024, yaitu seluas 203.619,42 hektar. Upaya ini didukung oleh pembangunan infrastruktur konservasi seperti 226 unit sumur resapan, 1.016 unit gully plug, dan 255 unit IPAHA (Instalasi Pengelolaan Air Hujan). Selain itu, penyediaan bibit dari persemaian permanen sejumlah 21.513.610 batang di tahun 2024 turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program rehabilitasi. Pada bidang **Pengelolaan Hutan Lestari**, terdapat peningkatan luas wilayah perizinan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) menjadi 30.158.968,68 hektar pada tahun 2024. Investasi yang tercatat dalam PBPH ini mencapai Rp43.018.658.437.356, dengan volume produksi hasil hutan yang signifikan, baik dari produk kayu maupun non-kayu. Nilai ekspor industri kehutanan juga mengalami lonjakan hingga \$12.591.800.988 di tahun 2024, menunjukkan kontribusi yang kuat terhadap perekonomian nasional.

Bidang **Perhutanan Sosial**, sampai dengan tahun 2024 pemberian akses kelola persetujuan perhutanan sosial kepada masyarakat mencapai 8.300.117,35 hektar dengan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial sebanyak 15.516 kelompok dengan rincian klasifikasi KUPS biru sebanyak 8.698 kelompok, perak sebanyak 5.445 kelompok, emas sebanyak 1.290 kelompok dan platina sebanyak 83 kelompok. Di bidang **Penegakan Hukum**, intensitas kegiatan terus ditingkatkan, tercermin dari jumlah operasi pencegahan dan pengamanan hutan yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 233 operasi pada tahun 2024. Selain itu, terdapat 880 pengaduan, 535 pengawasan terhadap badan usaha, dan penerapan 206 sanksi administratif, yang menunjukkan respons cepat dan tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Bidang **Pengawasan Internal/Inspektorat Jenderal** menunjukkan bahwa jumlah tindak lanjut hasil audit kinerja (tuntas) mengalami peningkatan signifikan dengan 17.832 kasus yang dipantau pada tahun 2024. Selain itu, telah disusun sebanyak 32 laporan audit investigasi sepanjang tahun 2020 – 2024.

Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa terdapat total 26.300 kelompok usaha tani (KTH) di tahun 2024. Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan juga meningkat secara signifikan, yaitu mencapai Rp1.433.074.741.397 pada tahun 2024. Terakhir, pada aspek **Dukungan Manajemen**, jumlah ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat sebanyak 19.132 orang, dengan komposisi berdasarkan jenjang pendidikan dan usia yang menunjukkan struktur SDM yang produktif. Selain itu, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun 2024 mencapai Rp8.331.506.348.359. Sementara nilai neraca BMN (Barang Milik Negara) tahun 2024 tercatat sebesar Rp16.612.419.355.218 menggambarkan tata kelola yang semakin akuntabel dan transparan.

An aerial photograph of a vast, dense tropical forest covering a mountain range. The forest is a deep green color, with some lighter patches indicating different tree species or canopy gaps. In the center-right of the image, there is a small, irregularly shaped area where the forest has been cleared, revealing a light brown, sandy or silty ground. The sky above the mountains is blue with scattered white clouds.

BAB 1

PLANOLOGI KEHUTANAN

Sumber Foto: Tim Dokumentasi BBSKDA Sumatera Utara

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan unit kerja teknis di bawah Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas pokok dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Fungsi strategis Planologi Kehutanan meliputi penataan ruang kawasan hutan, penetapan dan perubahan fungsi kawasan, inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan penutupan lahan, hingga fasilitasi pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

54.445,26 Ha

LUAS PERKEMBANGAN PELEPASAN
KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2024

19 Unit

JUMLAH UNIT PERKEMBANGAN
PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PERKEBUNAN DAN PERTANIAN TAHUN
2024

187.033.061,24 Ha

LUAS REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN DI INDONESIA TAHUN 2024

408 Unit

JUMLAH UNIT SK PERSETUJUAN
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
YANG TERBIT TAHUN 2024

125.541.298,80 Ha

LUAS KAWASAN HUTAN TAHUN 2024

27.434.620,37 Ha

LUAS KAWASAN KONSERVASI (AIR DAN DARAT)
TAHUN 2024

106.816.422,48 Ha

LUAS KUMULATIF PERKEMBANGAN PENETAPAN
KAWASAN HUTAN

3.017.311,45 Ha

LUAS PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH
OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) TAHUN
2015 - 2024

2.655,16 Km

PANJANG CAPAIAN PENATAAN BATAS
KAWASAN HUTAN TAHUN 2024

89.350,18 Km

PANJANG KUMULATIF PENATAAN
BATAS KAWASAN HUTAN S.D. 2024

Tabel 1.1

Luas Rekalkulasi Penutupan Lahan di Indonesia Tahun 2024

No	Provinsi	Hutan						Jumlah	Non Hutan						Jumlah
		Kawasan Hutan (Ha)							Kawasan Hutan (Ha)						
		Hutan Tetap							Hutan Tetap						
		HK	HL	HPT	HP	HPK	APL		HK	HL	HPT	HP	HPK	APL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	775.443,44	1.631.102,36	112.858,68	367.398,45	1.977,24	230.377,01	3.119.157,20	80.836,08	152.548,89	29.110,81	179.229,24	11.565,71	2.055.234,54	2.508.525,27
2	Sumatera Utara	375.775,25	724.059,96	317.579,38	327.454,35	8.924,51	178.885,03	1.932.678,49	42.954,80	460.339,61	308.512,52	346.051,06	82.379,26	3.891.695,28	5.131.932,53
3	Sumatera Barat	666.144,15	569.658,95	147.564,07	258.489,20	64.310,85	172.931,07	1.879.098,30	99.716,99	198.558,28	80.041,33	94.308,08	93.810,16	1.712.389,73	2.278.824,57
4	Riau	460.221,29	80.820,30	311.087,45	1.529.348,12	58.308,92	75.818,12	2.515.604,20	166.059,23	147.031,95	695.438,19	796.298,55	1.082.201,70	3.446.617,88	6.333.647,50
5	Jambi	578.085,25	138.556,27	117.135,62	486.628,60	237,86	144.293,65	1.464.937,25	132.603,78	41.984,85	147.241,11	466.107,21	10.859,94	2.586.784,47	3.385.581,35
6	Sumatera Selatan	391.524,96	230.518,59	72.101,73	800.017,79	10,09	59.454,36	1.553.627,51	322.833,77	333.863,65	141.237,41	886.271,60	138.711,58	5.211.799,59	7.034.717,60
7	Bengkulu	389.455,74	146.753,22	50.944,14	28.295,25	9,73	23.354,65	638.812,74	69.228,26	91.205,12	119.625,68	17.109,57	10.992,42	1.057.388,13	1.365.549,17
8	Lampung	236.675,77	54.011,20	9.923,94	12.779,07	-	15.544,51	328.934,50	171.405,83	266.413,39	19.016,72	155.340,76	-	2.398.196,18	3.010.372,86
9	Kepulauan Bangka Belitung	12.654,14	81.674,13	-	79.538,07	56,59	54.000,07	227.923,00	23.523,22	103.163,64	-	354.951,15	637,45	954.982,60	1.437.258,06
10	Kepulauan Riau	1.163,10	55.642,92	76.107,39	47.393,06	43.545,97	105.287,50	329.139,94	3.458,48	38.381,06	39.645,72	28.009,01	36.571,99	336.463,50	482.529,76
11	DKI Jakarta	353,88	44,98	-	73,40	-	630,14	1.102,40	54,96	3,95	-	67,55	-	64.308,58	64.435,04
12	Jawa Barat	151.479,45	159.278,97	112.989,53	128.450,31	-	117.779,92	669.978,16	20.419,10	70.101,80	65.876,09	82.345,34	-	2.760.076,42	2.998.818,74
13	Jawa Tengah	12.201,19	70.633,48	160.285,73	310.774,79	-	92.501,39	646.396,58	5.318,43	10.968,83	17.422,59	60.957,27	-	2.667.296,29	2.761.963,41
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.617,58	1.843,58	0,05	10.733,62	-	6.737,79	21.932,62	415,70	453,75	1,38	2.772,82	-	290.281,75	293.925,39
15	Jawa Timur	186.152,91	254.225,60	153,43	627.017,84	-	149.505,00	1.217.054,78	45.901,37	76.183,40	2,01	166.766,15	-	3.280.096,79	3.568.949,73
16	Banten	78.142,99	7.500,58	41.520,42	16.969,38	-	26.771,41	170.904,77	22.502,66	2.558,06	16.430,71	9.921,31	-	710.473,71	761.886,44
17	Bali	17.788,04	68.716,32	3.824,62	228,23	0,77	4.808,73	95.366,72	2.737,27	27.911,11	3.060,73	1.746,01	0,78	424.731,13	460.187,03
18	Nusa Tenggara Barat	79.162,85	376.447,05	219.386,99	76.424,93	42,75	113.783,92	865.248,49	91.679,83	61.873,75	72.809,31	73.244,56	10,23	794.264,87	1.093.882,54
19	Nusa Tenggara Timur	161.909,65	408.274,21	94.804,93	170.264,22	20.179,72	804.739,60	1.660.172,32	95.630,80	262.525,67	73.381,05	115.703,35	60.629,62	2.345.242,04	2.953.112,51
20	Kalimantan Barat	1.157.673,59	1.799.015,14	1.387.826,94	785.282,87	52.582,56	465.264,73	5.647.645,83	266.003,61	479.562,95	728.841,80	1.302.742,57	129.788,86	6.012.683,60	8.919.623,38
21	Kalimantan Tengah	1.091.377,24	972.035,53	2.800.574,94	1.951.724,09	359.025,36	216.752,66	7.391.489,83	518.829,31	371.914,30	425.042,24	1.818.466,10	1.315.399,92	3.335.567,55	7.785.219,42

No	Provinsi	Hutan						Jumlah	Non Hutan						Jumlah
		Kawasan Hutan (Ha)							Kawasan Hutan (Ha)						
		Hutan Tetap							Hutan Tetap						
		HK	HL	HPT	HP	HPK	APL		HK	HL	HPT	HP	HPK	APL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Kalimantan Selatan	146.618,77	355.285,45	82.012,47	252.473,54	8.814,04	99.653,53	944.857,80	60.367,33	150.456,34	41.826,86	426.087,49	98.544,27	1.957.823,69	2.735.105,97
23	Kalimantan Timur	202.102,63	1.738.803,23	2.743.037,24	2.129.700,85	85.989,79	986.461,51	7.886.095,25	231.699,06	44.596,93	183.250,06	790.525,53	55.401,55	3.379.178,17	4.684.651,30
24	Kalimantan Utara	1.261.994,86	1.031.489,65	2.072.959,24	877.597,54	47.643,55	626.246,98	5.917.931,82	9.021,97	13.379,48	52.478,95	192.048,47	11.188,46	745.212,44	1.023.329,78
25	Sulawesi Utara	214.658,00	110.531,19	145.686,66	32.910,69	11.473,53	41.483,92	556.743,99	29.986,96	47.657,61	64.322,19	33.154,36	3.101,63	707.668,70	885.891,45
26	Sulawesi Tengah	567.649,29	1.143.953,36	1.212.421,55	314.473,33	103.846,70	433.437,80	3.775.782,02	87.321,09	126.450,44	219.838,17	110.860,78	52.315,53	1.712.764,03	2.309.550,05
27	Sulawesi Selatan	137.580,34	816.363,27	316.810,90	63.956,70	11.495,30	134.436,76	1.480.643,28	36.145,01	280.627,62	151.155,19	71.083,03	3.360,97	2.389.926,60	2.932.298,42
28	Sulawesi Tenggara	220.043,85	941.124,29	353.120,35	207.889,48	21.625,78	116.544,64	1.860.348,39	71.853,34	132.478,08	95.279,10	202.784,98	44.325,56	1.200.609,96	1.747.331,03
29	Gorontalo	192.542,84	178.552,26	194.451,90	69.725,72	10.593,41	57.510,22	703.376,35	9.869,49	23.242,83	47.436,92	18.973,73	12.261,69	381.105,10	492.889,76
30	Sulawesi Barat	177.084,17	322.019,55	237.010,28	40.378,93	6.044,98	33.7734,58	816.272,49	10.771,56	129.909,03	91.250,21	30.246,88	14.416,63	560.279,75	836.874,05
31	Maluku	374.812,83	521.249,49	761.801,96	428.886,17	823.613,92	168.519,53	3.078.883,90	45.069,02	103.889,87	126.793,90	209.834,69	472.629,14	560.667,86	1.518.884,48
32	Maluku Utara	207.876,49	482.659,90	574.524,61	381.977,65	291.901,41	117.789,38	2.056.729,45	11.110,40	76.397,16	104.480,62	110.374,70	251.780,36	530.309,65	1.084.452,89
33	Papua	1.546.263,89	1.842.865,11	1.989.845,18	1.327.743,41	570.451,49	395.186,71	7.672.355,79	80.528,77	36.088,81	65.756,21	42.434,93	29.643,97	210.680,30	465.132,98
34	Papua Barat	662.481,33	835.198,30	1.503.411,62	1.570.591,60	616.151,76	351.755,01	5.539.589,61	10.116,86	42.370,38	38.947,93	66.046,53	44.175,05	187.309,76	388.966,51
35	Papua Selatan	917.181,27	1.354.713,33	1.816.471,87	2.236.563,80	962.790,80	591.294,89	7.879.015,97	763.254,73	329.316,75	594.153,90	700.306,18	965.454,79	420.079,54	3.772.565,89
36	Papua Tengah	1.346.269,62	2.105.700,17	982.677,95	212.390,98	422.860,36	201.865,99	5.271.765,08	270.092,28	196.175,52	42.186,86	17.336,49	95.649,82	131.822,93	753.263,91
37	Papua Pegunungan	1.469.560,92	1.565.846,84	434.880,86	318.468,81	339.540,73	26.440,74	4.154.738,90	318.140,37	269.763,76	38.671,84	17.445,74	162.167,14	132.504,70	938.693,55
38	Papua Barat Daya	1.026.588,49	718.235,11	283.317,49	558.456,03	675.904,47	299.400,43	3.561.902,02	21.485,78	44.068,38	11.448,37	31.225,08	52.094,18	137.677,40	297.999,19
Jumlah		17.497.312,07	23.895.403,84	21.741.112,14	19.039.470,86	5.619.954,93	7.740.983,90	95.534.237,75	4.248.947,50	5.244.416,99	4.952.014,67	10.029.178,82	5.342.070,33	61.682.195,17	91.498.823,49

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.
 - *: Hutan tanaman merupakan hutan hasil penanaman baik di dalam dan di luar konsesi Hutan Tanaman Industri
 - Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2024
 - Keterangan: HK = Hutan Konservasi; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi Tetap; HPK = Hutan Produksi Konversi; APL = Area Penggunaan Lain
 - - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada penutupan lahan

Tabel 1.2 Angka Deforestasi Netto Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2024

No	Provinsi	Angka Deforestasi Netto (Ribu Ha)						Jumlah
		Kawasan Hutan					APL	
		Hutan Tetap				HPK		
		HK	HL	HPT	HP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	817,1	2.023,9	279,3	2.182,8	18,0	5.887,3	11.208,5
2	Sumatera Utara	513,6	1.363,0	1.262,4	639,8	161,5	3.094,6	7.034,9
3	Sumatera Barat	1.065,7	1.511,4	1.025,6	544,0	702,5	1.785,1	6.634,2
4	Riau	2.277,9	2.292,6	7.911,8	11.227,5	1.887,8	4.104,6	29.702,1
5	Jambi	890,7	556,9	2.918,6	2.075,8	2,4	1.846,2	8.290,6
6	Sumatera Selatan	512,9	1.053,8	1.193,6	511,1	-	755,7	4.027,1
7	Bengkulu	799,5	449,4	2.440,2	690,5	-	494,9	4.874,5
8	Lampung	85,9	96,7	2,8	-	-	27,8	213,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	77,1	409,0	-	2.959,0	-	2.219,0	5.664,1
10	Kepulauan Riau	-	15,3	72,3	33,8	50,5	209,4	381,4
11	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-2,7	-2,7
12	Jawa Barat	13,8	-5,9	10,3	77,1	-	77,6	173,0
13	Jawa Tengah	-	-	31,4	23,2	-	-109,3	-54,8
14	Di Yogyakarta	-	-	-	-	-	27,2	27,2
15	Jawa Timur	500,5	184,9	-	204,7	-	25,7	915,8
16	Banten	-	-	29,7	-	-	98,5	128,1
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	15,8	1.105,3	438,2	489,6	-	90,2	2.139,1
19	Nusa Tenggara Timur	2,2	146,8	120,1	86,7	2,5	761,7	1.120,0
20	Kalimantan Barat	112,1	779,3	2.302,3	-1.636,6	-232,7	7.554,3	8.878,7
21	Kalimantan Tengah	84,5	344,8	2.973,3	5.762,4	3.420,6	3.468,7	16.054,3
22	Kalimantan Selatan	86,8	387,4	-234,8	1.643,0	20,9	2.197,0	4.100,4
23	Kalimantan Timur	57,1	188,5	7.609,9	1.994,8	1.293,0	8.063,4	19.206,8
24	Kalimantan Utara	12,9	107,9	730,8	1.460,1	213,4	2.731,1	5.256,2
25	Sulawesi Utara	3,4	6,4	69,7	7,9	-	16,4	103,8
26	Sulawesi Tengah	145,6	441,8	1.090,6	713,8	543,9	1.935,5	4.871,2
27	Sulawesi Selatan	178,8	1.752,7	607,3	391,0	-	2.879,8	5.809,6
28	Sulawesi Tenggara	62,4	1.288,5	2.076,0	2.245,2	369,4	1.884,4	7.925,9
29	Gorontalo	-71,4	47,7	-74,6	6,1	-21,3	1.779,3	1.665,8
30	Sulawesi Barat	75,3	1.367,3	2.707,6	863,9	262,1	1.548,0	6.824,3
31	Maluku	2,3	60,4	113,7	75,9	310,4	103,9	666,5
32	Maluku Utara	3,2	40,3	504,6	264,8	287,2	257,7	1.357,9
33	Papua	49,6	23,9	90,7	65,1	11,4	262,0	502,7
34	Papua Barat	31,5	32,5	83,4	12,4	39,6	177,3	376,6
35	Papua Selatan	3,8	381,7	10,4	60,7	2.115,3	2.366,9	4.938,8
36	Papua Tengah	14,2	63,5	78,7	4,5	150,4	106,7	418,0
37	Papua Pegunungan	141,5	45,4	3,3	29,4	31,6	4,2	255,3
38	Papua Barat Daya	12,6	48,1	16,7	26,8	56,1	3.588,3	3.748,7
Jumlah		8.578,8	18.611,4	38.495,6	35.737,0	11.696,6	62.318,3	175.437,7

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Keterangan: HK = Hutan Konservasi; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi Tetap; HPK = Hutan Produksi Konservasi; APL = Area Penggunaan Lain;
 - * = Tidak ada data atau tidak ada kegiatan
 - - = Data tidak teridentifikasi / Tidak ada deforestasi

Tabel 1.3 Angka Potensi Kerapatan Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Kerapatan Tegakan (Pohon/Ha)		
				DBH_5cm up	DBH_20cm up	DBH_40cm up
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	23	809,97	111,91	45,87
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	796,43	106,09	47,55
2	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	22	913,32	165,45	60,77
		Hutan lahan Kering Sekunder	25	890,87	157,28	60,00
3	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	3	858,80	155,67	59,67
4	Riau	Hutan lahan Kering Sekunder	4	917,71	113,75	45,25
		Hutan Rawa Sekunder	11	1.199,04	175,09	43,82
5	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	11	1.038,65	163,82	56,09
		Hutan lahan Kering Sekunder	12	962,08	132,92	42,50
6	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	14	765,58	120,29	42,14
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	680,75	109,09	37,64
7	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	14	786,89	134,21	53,29
		Hutan lahan Kering Sekunder	16	768,53	130,25	38,75
8	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	21	725,17	124,38	46,33
		Hutan lahan Kering Sekunder	18	763,05	121,83	43,56
		Hutan Rawa Sekunder	6	647,33	116,67	27,17
9	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan lahan Kering Sekunder	10	1.201,46	99,80	11,70
10	Kepulauan Riau	Hutan lahan Kering Sekunder	42	1.162,55	140,64	31,62
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Hutan lahan Kering Sekunder	20	793,75	107,20	31,60
13	Jawa Tengah	Hutan lahan Kering Sekunder	6	553,49	87,83	24,33
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	Hutan lahan Kering Sekunder	38	657,09	88,82	30,30
16	Banten	Hutan lahan Kering Sekunder	4	859,49	111,25	25,50
17	Bali	Hutan Lahan Kering Primer	7	754,93	148,86	51,86
		Hutan lahan Kering Sekunder	5	838,93	73,20	25,00
18	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	31	1.069,36	135,23	38,61
		Hutan lahan Kering Sekunder	19	1.013,63	107,05	25,74
19	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	21	842,47	103,71	35,62
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	650,81	95,09	30,45
20	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	12	1.175,11	135,00	53,83
		Hutan lahan Kering Sekunder	23	1.045,70	120,96	46,61
		Hutan Rawa Sekunder	5	1.329,89	153,40	39,00
21	Kalimantan Tengah	Hutan lahan Kering Sekunder	20	904,64	121,89	42,05
		Hutan Rawa Sekunder	7	1.450,72	121,43	13,71
22	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	3	1.067,11	159,67	45,33
		Hutan lahan Kering Sekunder	22	880,17	113,14	35,50
23	Kalimantan Timur	Hutan lahan Kering Sekunder	42	844,94	108,26	35,54
24	Kalimantan Utara	Hutan lahan Kering Sekunder	5	715,86	90,20	36,00
25	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	4	395,36	118,75	64,00
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	513,00	115,00	45,91
26	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	63	710,74	114,76	32,98
		Hutan lahan Kering Sekunder	30	604,43	99,50	35,10
27	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	17	787,35	122,94	38,53
		Hutan lahan Kering Sekunder	17	661,58	98,29	32,88

Lanjutan Tabel 1.3 Angka Potensi Kerapatan Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Kerapatan Tegakan (Pohon/Ha)		
				DBH_5cm up	DBH_20cm up	DBH_40cm up
1	2	3	4	5	6	7
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	4	863,77	131,50	53,50
		Hutan lahan Kering Sekunder	18	551,39	80,44	29,06
29	Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	16	670,56	125,31	49,69
		Hutan lahan Kering Sekunder	25	680,97	109,16	39,12
30	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	899,01	154,75	77,25
		Hutan lahan Kering Sekunder	3	688,15	120,33	51,33
31	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	8	634,68	122,25	46,38
		Hutan lahan Kering Sekunder	40	621,43	100,65	39,58
32	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	447,83	81,67	51,00
		Hutan lahan Kering Sekunder	6	553,62	146,33	77,50
33	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	31	839,59	135,77	42,52
		Hutan lahan Kering Sekunder	35	843,85	121,09	36,59
		Hutan Rawa Primer	5	456,80	98,60	31,60
		Hutan Rawa Sekunder	4	843,23	93,00	30,00
34	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	20	1.232,43	172,95	48,40
		Hutan lahan Kering Sekunder	15	823,96	99,60	32,40
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah			954	48.659,98	7.123,99	2.445,60

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024
Keterangan:
• DBH = Diameter at breast height/diameter setinggi dada
• - = Tidak ada data atau tidak ada kegiatan
• Data diambil berdasarkan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) Periode 2015 – 2023

Tabel 1.4 Angka Potensi Volume Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Volume Tegakan (m³/Ha)		
				DBH_5cm up	DBH_20cm up	DBH_40cm up
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	23	312,32	243,69	188,26
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	307,53	242,33	195,95
2	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	22	407,41	339,96	254,42
		Hutan lahan Kering Sekunder	25	429,28	358,70	282,28
3	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	3	426,21	321,61	240,96
4	Riau	Hutan lahan Kering Sekunder	4	295,83	212,99	159,15
		Hutan Rawa Sekunder	11	332,76	247,10	143,10
5	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	11	396,03	329,45	248,63
		Hutan lahan Kering Sekunder	12	297,89	235,16	169,14
6	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	14	312,97	254,91	195,95
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	271,62	217,06	160,93
7	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	14	447,03	388,49	328,51
		Hutan lahan Kering Sekunder	16	295,41	234,53	166,48
8	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	21	389,27	334,48	277,88
		Hutan lahan Kering Sekunder	18	361,49	294,13	235,44
		Hutan Rawa Sekunder	6	206,11	166,96	103,77
9	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan lahan Kering Sekunder	10	177,09	95,23	35,16
10	Kepulauan Riau	Hutan lahan Kering Sekunder	42	268,87	197,10	120,65
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Hutan lahan Kering Sekunder	20	238,17	185,74	127,79
13	Jawa Tengah	Hutan lahan Kering Sekunder	6	178,76	142,16	97,60
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	Hutan lahan Kering Sekunder	38	277,75	231,08	191,84
16	Banten	Hutan lahan Kering Sekunder	4	237,56	157,86	92,82
17	Bali	Hutan Lahan Kering Primer	7	373,08	313,36	239,22
		Hutan lahan Kering Sekunder	5	188,27	136,51	102,14
18	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	31	328,26	256,01	185,59
		Hutan lahan Kering Sekunder	19	241,12	168,59	109,10
19	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	21	354,25	297,13	246,67
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	216,74	171,77	123,85
20	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	12	393,32	305,99	240,92
		Hutan lahan Kering Sekunder	23	355,26	273,56	214,94
		Hutan Rawa Sekunder	5	365,24	274,65	192,90
21	Kalimantan Tengah	Hutan lahan Kering Sekunder	20	323,64	266,93	207,16
		Hutan Rawa Sekunder	7	204,90	107,37	36,78
22	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	3	420,55	347,89	261,25
		Hutan lahan Kering Sekunder	22	275,14	210,98	148,30
23	Kalimantan Timur	Hutan lahan Kering Sekunder	42	251,30	194,75	142,49
24	Kalimantan Utara	Hutan lahan Kering Sekunder	5	255,49	199,42	158,31
25	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	4	441,33	411,36	369,47
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	317,50	274,62	218,11
26	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	63	252,13	188,93	124,99
		Hutan lahan Kering Sekunder	30	241,22	190,60	140,07
27	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	17	279,07	205,15	133,66
		Hutan lahan Kering Sekunder	17	248,82	189,10	138,06

Lanjutan Tabel 1.4 Angka Potensi Volume Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Volume Tegakan (m³/Ha)		
				DBH_5cm up	DBH_20cm up	DBH_40cm up
1	2	3	4	5	6	7
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	4	399,25	317,16	246,29
		Hutan lahan Kering Sekunder	18	191,17	132,88	92,98
29	Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	16	367,52	318,95	259,93
		Hutan lahan Kering Sekunder	25	311,71	261,12	207,48
30	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	387,28	294,66	230,25
		Hutan lahan Kering Sekunder	3	318,20	241,37	179,44
31	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	8	302,88	254,62	191,64
		Hutan lahan Kering Sekunder	40	277,56	223,11	170,48
32	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	333,52	285,34	259,72
		Hutan lahan Kering Sekunder	6	450,28	390,15	327,66
33	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	31	295,49	237,02	165,34
		Hutan lahan Kering Sekunder	35	271,36	211,36	152,53
		Hutan Rawa Primer	5	214,27	184,31	135,12
		Hutan Rawa Sekunder	4	217,11	157,08	111,71
34	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	20	384,05	290,17	195,84
		Hutan lahan Kering Sekunder	15	261,00	194,58	142,59
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah			954	18.176,64	14.409,28	10.819,70

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- DBH = Diameter at breast height/diameter setinggi dada
 - - = Tidak ada data atau tidak ada kegiatan
 - Data diambil berdasarkan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) Periode 2015 – 2023

Tabel 1.5 Angka Potensi Biomassa dan Karbon Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Biomassa (Ton/Ha)	Karbon (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	23	286,48	134,64
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	281,85	132,47
2	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	22	382,24	179,65
		Hutan lahan Kering Sekunder	25	411,03	193,18
3	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	3	392,05	184,27
4	Riau	Hutan lahan Kering Sekunder	4	270,54	127,15
		Hutan Rawa Sekunder	11	291,96	137,22
5	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	11	374,39	175,96
		Hutan lahan Kering Sekunder	12	270,06	126,93
6	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	14	285,40	134,14
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	242,38	113,92
7	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	14	446,32	209,77
		Hutan lahan Kering Sekunder	16	272,72	128,18
8	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	21	374,13	175,84
		Hutan lahan Kering Sekunder	18	344,58	161,95
		Hutan Rawa Sekunder	6	190,16	89,38
9	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan lahan Kering Sekunder	10	142,57	67,01
10	Kepulauan Riau	Hutan lahan Kering Sekunder	42	244,13	114,74
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	Hutan lahan Kering Sekunder	20	199,59	93,81
13	Jawa Tengah	Hutan lahan Kering Sekunder	6	150,21	70,60
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	Hutan lahan Kering Sekunder	38	240,07	112,83
16	Banten	Hutan lahan Kering Sekunder	4	189,99	89,30
17	Bali	Hutan Lahan Kering Primer	7	322,24	151,45
		Hutan lahan Kering Sekunder	5	164,69	77,40
18	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	31	273,54	128,56
		Hutan lahan Kering Sekunder	19	193,46	90,93
19	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	21	355,34	167,01
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	181,34	85,23
20	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	12	370,45	174,11
		Hutan lahan Kering Sekunder	23	335,50	157,68
		Hutan Rawa Sekunder	5	323,27	151,93
21	Kalimantan Tengah	Hutan lahan Kering Sekunder	20	302,76	142,30
		Hutan Rawa Sekunder	7	167,05	78,51
22	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	3	387,03	181,90
		Hutan lahan Kering Sekunder	22	246,19	115,71
23	Kalimantan Timur	Hutan lahan Kering Sekunder	42	217,68	102,31
24	Kalimantan Utara	Hutan lahan Kering Sekunder	5	224,70	105,61
25	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	4	397,54	186,85
		Hutan lahan Kering Sekunder	11	271,95	127,81
26	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	63	202,25	95,06
		Hutan lahan Kering Sekunder	30	193,56	90,97
27	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	17	223,97	105,27
		Hutan lahan Kering Sekunder	17	198,75	93,41

Lanjutan Tabel 1.5

Angka Potensi Biomassa dan Karbon Tegakan Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Biomassa (Ton/Ha)	Karbon (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	4	338,94	159,30
		Hutan lahan Kering Sekunder	18	154,47	72,60
29	Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	16	319,11	149,98
		Hutan lahan Kering Sekunder	25	264,93	124,52
30	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	300,35	141,17
		Hutan lahan Kering Sekunder	3	248,22	116,66
31	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	8	250,17	117,58
		Hutan lahan Kering Sekunder	40	235,45	110,66
32	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	292,23	137,35
		Hutan lahan Kering Sekunder	6	375,17	176,33
33	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	31	337,36	158,56
		Hutan lahan Kering Sekunder	35	308,53	145,01
		Hutan Rawa Primer	5	253,59	119,19
		Hutan Rawa Sekunder	4	243,69	114,54
34	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	20	435,60	204,73
		Hutan lahan Kering Sekunder	15	294,11	138,23
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Jumlah			954	16.488,02	7.749,37

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:

- DBH = Diameter at breast height/diameter setinggi dada
- - = Tidak ada data atau tidak ada kegiatan
- Koefisien konversi untuk Karbon - Biomassa = 0,46999
- Data diambil berdasarkan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) Periode 2015 – 2023

Tabel 1.6 Luas Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Proses Review RTRWP Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Usulan Perubahan Kawasan Hutan (Ha)		
		Perubahan Fungsi	Perubahan Peruntukan	Penunjukan Baru
1	2	3	4	5
1	Aceh	179.536	131.717	31.275
2	Sumatera Utara	296.263	1.269.284	35.429
3	Sumatera Barat	216.189	211.386	13.544
4	Riau	1.087.707	3.530.696	46.914
5	Jambi	72.245	107.047	10.908
6	Sumatera Selatan	82.825	410.550	47.463
7	Bengkulu	60.503	61.861	-
8	Lampung	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	9.361	133.590	3.218
10	Kepulauan Riau	58.723	532.954	2.370
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	21.348	213.195	24.518
20	Kalimantan Barat	672.096	2.133.759	222.372
21	Kalimantan Tengah	3.900.656	2.922.314	944.715
22	Kalimantan Selatan	4.992	33.320	-
23	Kalimantan Timur	114.877	615.330	15.096
24	Kalimantan Utara	-	538.999	-
25	Sulawesi Utara	7.250	48.591	2.589
26	Sulawesi Tengah	42.830	242.207	1.749
27	Sulawesi Selatan	25.919	67.909	83
28	Sulawesi Tenggara	304.924	310.165	-
29	Gorontalo	95.395	35.832	5.951
30	Sulawesi Barat	294.630	168.860	-
31	Maluku	296.545	1.525.376	-
32	Maluku Utara	384.773	950.736	24.719
33	Papua	6.199.496	1.278.623	48.160
34	Papua Barat	1.032.759	979.452	23.870
35	Papua Selatan	275.091	1.936.795	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		15.736.932	20.390.548	1.504.943

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan :
· RTRWP = Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
· - = Tidak ada data atau tidak ada kegiatan

Tabel 1.7
 Luas Persetujuan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam
 Proses Review RTRWP Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan (Ha)		
		Perubahan Fungsi	Perubahan Peruntukan	Penunjukan Baru
1	2	3	4	5
1	Aceh	130.542	80.256	26.461
2	Sumatera Utara	207.610	643.717	17.894
3	Sumatera Barat	147.213	126.286	9.906
4	Riau	718.145	1.703.698	11.552
5	Jambi	20.529	14.048	-
6	Sumatera Selatan	44.299	239.533	41.191
7	Bengkulu	20.493	2.340	-
8	Lampung	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.878	19.756	3.218
10	Kepulauan Riau	147.926	339.198	2.370
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	12.227	54.885	11.811
20	Kalimantan Barat	338.153	555.680	52.386
21	Kalimantan Tengah	689.666	1.168.656	29.672
22	Kalimantan Selatan	10.188	26.070	-
23	Kalimantan Timur	82.670	89.481	15.095
24	Kalimantan Utara	3.237	48.760	-
25	Sulawesi Utara	761	7.037	290
26	Sulawesi Tengah	54.618	21.558	1.588
27	Sulawesi Selatan	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	115.111	110.105	-
29	Gorontalo	55.553	22.605	3.787
30	Sulawesi Barat	251.600	73.556	-
31	Maluku	20.668	364.115	3.313
32	Maluku Utara	92.222	273.361	5.081
33	Papua	5.736.830	376.385	45.258
34	Papua Barat	440.587	245.575	3.934
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		9.351.726	6.606.661	284.807

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan :

- RTRWP = Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- - = Tidak ada data atau tidak ada kegiatan

Tabel 1.8 Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Ha)			
		HPK > HP	HPK > HL	HPK > HPT	HPK > KK
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180,00	-	-	-
3	Sumatera Barat	29.486,00	-	12.150,00	-
4	Riau	133.238,00	-	49.700,00	5.920,00
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	10,26	21.750,00	3.952,00	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	79,75	-	-
21	Kalimantan Tengah	363.332,98	-	2.988,00	64.186,00
22	Kalimantan Selatan	54.151,00	-	-	-
23	Kalimantan Timur	53.760,00	49.400,00	1.820,00	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	3.221,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	15.805,00	143,00	18.445,00	-
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	9.125,00	-
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2.860,00	-	-	-
33	Papua	324.681,00	6.572,00	-	-
34	Papua Barat	4.076,00	-	2.856,00	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Jumlah		1.014.404,99	77.944,75	101.036,00	73.327,00

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Simbol (>) = Menunjukkan perubahan fungsi hutan.
 - Data dihitung secara kumulatif
 - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.9 Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (Ha)				
		KK > KK	KK > HP	KK > HPK	KK > HPT	KK > HL
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.749,59	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	28.238,00	-	-	-	-
5	Jambi	27.625,50	-	-	-	-
6	Sumatera selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	87,00	490,00	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	18.677,75	4.233,35	-	9.477,00	3.738,00
13	Jawa Tengah	6,50	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	283,58	-	-	-	-
15	Jawa Timur	214,12	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	169,95	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	102.845,79	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	12.316,00	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	8.802,60	28.339,89	465,00	-	-
23	Kalimantan Timur	61.850,00	-	25,00	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	27.274,63	-	-	341,55	285,55
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	15.644,90	171,00	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	1.763.321,46	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.396,00	575,00	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		2.374.373,42	33.809,24	659,95	9.818,55	4.023,55

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Simbol (>) = Menunjukkan perubahan fungsi hutan.
 - Data dihitung secara kumulatif
 - - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.10 Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL)
Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (Ha)			
		HL > HPK	HL > HPT	HL > HP	HL > KK
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	-	-	2.725,00	-
2	Sumatera Utara	386,50	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	170,40	-
4	Riau	-	20.290,00	-	40.390,00
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera selatan	-	-	60,00	-
7	Bengkulu	-	-	583,00	-
8	Lampung	-	-	102,00	-
9	Kepulauan Bangka belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	698,73	-	6.351,22	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	5.170,00	32.685,70
13	Jawa Tengah	-	55,00	11,66	11.075,56
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	1.000,66
15	Jawa Timur	-	-	1.959,30	-
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	2.958,00	3.155,00	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	66.474,00
20	Kalimantan Barat	-	48.021,12	-	3.923,00
21	Kalimantan Tengah	-	53.125,00	8.750,00	1.513,19
22	Kalimantan Selatan	-	56.007,21	11.926,54	6.514,95
23	Kalimantan Timur	-	59.285,00	2.460,00	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	1.260,71	1.983,00	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	10.659,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	22.063,10
28	Sulawesi Tenggara	-	5.995,75	17.584,40	4.000,00
29	Gorontalo	40,84	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	356,00	11.984,76	10.776,00	153.575,00
33	Papua	507,00	44.599,00	83.185,00	-
34	Papua Barat	468,00	1.174,00	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Jumlah		2.457,07	304.755,55	156.952,52	427.784,16

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
• Simbol (>) = Menunjukkan perubahan fungsi hutan.
• Data dihitung secara kumulatif
• - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.11 Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)			
		HP > HPK	HP > HPT	HP > HL	HP > KK
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	4.511,00	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	-
4	Riau	6.000,00	1.200,00	-	3.242,00
5	Jambi	-	-	-	25.560,00
6	Sumatera selatan	29.924,85	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	9,20	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	24.804,80
13	Jawa Tengah	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	617,00
15	Jawa Timur	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	76.793,00	-	-	604.859,00
22	Kalimantan Selatan	27.142,57	-	66.000,00	-
23	Kalimantan Timur	41.358,70	59.120,00	11.595,00	-
24	Kalimantan Utara	405,00	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	11.759,00
27	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	10.355,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.436,00	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Jumlah		202.399,32	60.320,00	77.595,00	730.724,42

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Simbol (>) = Menunjukkan perubahan fungsi hutan.
 - Data dihitung secara kumulatif
 - - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.12 Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)			
		HPT > HL	HPT > HP	HPT > HPK	HPT > KK
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	3.528,00	213.221,00	24.318,00	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	11.148,00	-	-
4	Riau	14.780,00	194.440,00	13.388,00	137.376,00
5	Jambi	-	-	-	20.700,00
6	Sumatera selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	12.950,00	342,82	505,80	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	41.025,56
13	Jawa Tengah	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	2.710,00	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075,00	20.160,00	-	2.470,00
22	Kalimantan Selatan	5.900,00	31.790,00	2.299,43	-
23	Kalimantan Timur	31.685,00	77.010,00	46,48	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	193,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	234,50	145,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	6.208,00
30	Sulawesi Barat	-	-	3.200,00	-
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	669,00	7.650,00
33	Papua	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	1.030,00	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Jumlah		201.918,00	550.821,82	45.691,21	221.931,31

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Simbol (>) = Menunjukkan perubahan fungsi hutan.
 - Data dihitung secara kumulatif
 - - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.13

Luas Kumulatif Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Tahun 2020 – 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi (Ha)											
		2020			2021			2022			2023		
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Aceh	12	39.376,65	12	39.376,65	12	39.376,65	12	39.376,65	12	39.376,65	12	39.376,65
2	Sumatera Utara	12	28.054,00	12	28.054,00	12	28.054,00	12	28.054,00	12	28.054,00	12	28.054,00
3	Sumatera Barat	11	18.334,60	11	18.334,60	11	18.334,60	11	18.334,60	11	18.334,60	11	18.334,60
4	Riau	12	68.812,98	12	68.812,98	12	68.812,98	12	68.812,98	12	68.812,98	12	68.812,98
5	Jambi	14	78.412,53	14	78.412,53	14	78.412,53	14	78.412,53	14	78.412,53	14	78.412,53
6	Sumatera Selatan	33	122.140,80	33	122.140,80	33	122.140,80	33	122.140,80	33	122.140,80	33	122.140,80
7	Bengkulu	5	14.327,45	5	14.327,45	5	14.327,45	5	14.327,45	5	14.327,45	5	14.327,45
8	Lampung	16	134.147,20	16	134.147,20	16	134.147,20	16	134.147,20	16	134.147,20	16	134.147,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	2	7.530,00	2	7.530,00	3	8.991,00	3	8.991,00	3	8.991,00	3	8.991,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950,00	2	2.950,00	2	2.950,00	2	2.950,00	2	2.950,00	2	2.950,00
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137,00	2	1.137,00	2	1.137,00	2	1.137,00	2	1.137,00	2	1.137,00
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	17	28.804,72	17	28.804,72	17	28.804,72	17	28.804,72	17	28.804,72
21	Kalimantan Tengah	35	72.582,72	35	72.582,72	35	72.582,72	35	72.582,72	35	72.582,72	35	72.582,72
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	9	31.916,00	9	31.916,00	9	31.916,00	9	31.916,00	9	31.916,00
23	Kalimantan Timur	7	36.600,08	7	36.600,08	7	36.600,08	7	36.600,08	7	36.600,08	7	36.600,08
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	2	3.291,00	2	3.291,00	2	3.291,00	2	3.291,00	2	3.291,00
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	18	21.558,15	18	21.558,15	18	21.558,15	18	21.558,15	18	21.558,15	18	21.558,15

Lanjutan Tabel 1.13 Luas Kumulatif Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi Tahun 2020 – 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi (Ha)											
		2020			2021			2022			2023		
		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas	
1	2	3	4		5	6		7	8		9	10	12
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35		6	4.015,35		6	4.015,35		6	4.015,35	4.015,35
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035,71		21	37.035,71		21	37.035,71		21	37.035,71	37.035,71
29	Gorontalo	4	5.661,30		4	5.661,30		4	5.661,30		4	5.661,30	5.661,30
30	Sulawesi Barat	3	3.730,78		3	3.730,78		3	3.730,78		3	3.730,78	3.730,78
31	Maluku	3	5.664,58		3	5.664,58		3	5.664,58		7	8.155,58	8.155,58
32	Maluku Utara	14	22.288,91		14	22.288,91		14	22.288,91		14	22.288,91	22.288,91
33	Papua	17	92.532,46		17	92.532,46		17	92.532,46		17	92.532,46	92.532,46
34	Papua Barat	8	16.397,74		8	16.397,74		8	16.397,74		8	16.397,74	16.397,74
35	Papua Selatan	-	-		-	-		-	-		-	-	-
36	Papua Tengah	-	-		-	-		-	-		-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-		-	-		-	-		-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Jumlah		285	897.302,71		285	897.302,71		286	898.763,71		290	901.254,71	901.254,71

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
• Data dihitung secara kumulatif.
- = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.14

Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan dan Pertanian Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan (Ha)											
		2020			2021			2022			2023		
		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Aceh	-	-	-	-	1	1.587,79	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8.048,85	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	1	5.012,49	-	-	-	-	-	-
4	Riau	2	1.906,08	-	-	2	121,65	2	3.164,47	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	1	823,89	2	-	659,94	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	1	250,48	-	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	1	1.527,78	-	-	1	-	7.524,40	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	1	1,90	3	37,26	1	1,04	1	625,95	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	2	67,49	1	2,91	-	-	1	-	126,73	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	1	300,49	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	1	134,58	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	11	54.712,92	13	86.112,85	35	143.555,44	8	30.965,88	6	-	22.825,30	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	1	3.080,95	3	13.774,40	-	-	2	-	5.437,91	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	5	54.075,70	-	-	2	-	246,43	-
24	Kalimantan Utara	-	-	2	9.627,52	-	-	1	404,42	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 1.14 Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan dan Pertanian Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan (Ha)											
		2020			2021			2022			2023		
		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas	
1	2	3	4		5	6		7	8		9	10	12
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	1	14.953,20	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	1	40,76	-	-	-	-	-	-	2,48
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.311,84	-
32	Maluku Utara	-	-	-	1	694,69	-	-	-	-	-	-	9.377,35
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	130,56	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,87
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		14	56.620,90		23	99.661,52		53	234.997,46		16	37.727,50	54.445,26

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
• Data dihitung secara kumulatif.
• - = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perubahan

Tabel 1.15

Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024

No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia (Ha)											Proporsi Luas KH (Daratan) (%)
		Konservasi Air	Konservasi Darat	Jumlah Kawasan Konservasi Air dan Darat	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Aceh	-	1.058.364,40	1.058.364,40	1.781.677,92	145.178,34	549.794,88	15.374,69	3.550.390,23	3.550.390,23	5.795.600,00	61,26	
2	Sumatera Utara	-	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.795,00	3.055.795,00	7.298.123,00	41,87	
3	Sumatera Barat	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.057,00	4.201.289,00	55,77	
4	Riau	-	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00	8.702.366,00	62,13	
5	Jambi	-	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00	5.005.816,00	41,92	
6	Sumatera Selatan	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.712.819,00	160.996,00	3.407.693,00	3.456.797,00	9.159.243,00	37,20	
7	Bengkulu	-	462.862,36	462.862,36	230.737,69	172.018,85	45.556,91	11.115,35	922.291,16	922.291,16	1.991.933,00	46,30	
8	Lampung	-	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	-	1.004.735,00	1.004.735,00	3.462.380,00	29,02	
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	34.500,00	34.500,00	166.371,00	-	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00	1.642.406,00	39,19	
10	Kepulauan Riau	-	4.734,73	4.734,73	96.293,65	118.832,99	79.794,62	82.071,11	381.727,10	381.727,10	820.172,00	46,54	
11	DKI Jakarta	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	-	158,35	-	475,45	108.475,45	66.401,00	0,72	
12	Jawa Barat	-	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	-	816.603,00	816.603,00	3.537.776,00	23,08	
13	Jawa Tengah	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	-	647.133,00	757.250,00	3.280.069,00	19,73	
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	910,34	910,34	2.057,90	-	13.851,28	-	16.819,52	16.819,52	313.315,00	5,37	
15	Jawa Timur	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	-	782.772,00	-	1.357.640,00	1.361.146,00	4.779.975,00	28,40	
16	Banten	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	-	201.787,00	253.254,00	966.292,00	20,88	
17	B a l i	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	-	127.271,01	130.686,01	578.006,00	22,02	
18	Nusa Tenggara Barat	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	-	1.035.838,00	1.046.959,00	1.857.232,00	55,77	
19	Nusa Tenggara Timur	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00	4.871.810,00	30,50	
20	Kalimantan Barat	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.123.714,50	197.918,00	8.195.005,50	8.385.950,50	14.730.700,00	55,63	
21	Kalimantan Tengah	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00	15.356.450,00	82,68	
22	Kalimantan Selatan	-	217.944,00	217.944,00	507.248,00	123.940,00	685.270,00	119.285,00	1.653.687,00	1.653.687,00	3.874.423,00	42,68	

Lanjutan Tabel 1.15 Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024

No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia (Ha)											Proporsi Luas KH (Daratan) (%)
		Konservasi Air	Konservasi Darat	Jumlah Kawasan Konservasi Air dan Darat	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	Kalimantan Timur	-	1.727.061,61	1.727.061,61	2.798.413,46	5.012.079,10	4.031.764,66	139.260,00	13.708.578,83	13.708.578,83	20.453.434,00	67,02	
24	Kalimantan Utara												
25	Sulawesi Utara	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00	1.385.164,00	50,17	
26	Sulawesi Tengah	340.119,00	646.148,00	986.267,00	1.258.081,00	1.421.375,00	418.489,00	170.505,00	3.914.598,00	4.254.717,00	6.184.129,00	63,30	
27	Sulawesi Selatan	606.804,00	231.029,00	837.833,00	1.162.498,00	479.518,00	140.036,00	16.412,00	2.029.493,00	2.636.297,00	4.671.748,00	43,44	
28	Sulawesi Tenggara	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00	3.806.770,00	61,11	
29	Gorontalo	-	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00	1.125.707,00	73,26	
30	Sulawesi Barat	-	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.678.718,00	65,07	
31	Maluku	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00	4.691.403,00	83,35	
32	Maluku Utara	-	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00	3.198.250,00	78,64	
33	Papua	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00	31.903.605,00	92,05	
34	Papua Barat	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00	9.967.163,00	88,14	
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		5.321.321,00	22.113.299,37	27.434.620,37	29.470.064,44	26.765.714,54	29.181.837,30	12.689.062,15	120.219.978,80	125.541.298,80	191.357.868,00	62,82	

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = data tidak teridentifikasi

Tabel 1.16 Panjang Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Panjang Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (Km)				
		Tata Batas 2020	Tata Batas 2021	Tata Batas 2022	Tata Batas 2023	Tata Batas 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	27,04	614,00	-	2.336,09	-
2	Sumatera Utara	374,51	3.232,00	-	6.674,40	-
3	Sumatera Barat		-	10,91	3.801,90	-
4	Riau	200,00	511,00	4.373,41	9.493,19	-
9	Jambi	-	-	-	11,32	-
5	Sumatera Selatan	544,00	757,00	-	437,65	46,00
6	Bengkulu	-	-	-	9,87	289,70
7	Lampung	-	9,00	-	56,38	-
8	Kepulauan Bangka Belitung	2,46	208,00	-	20,00	133,00
10	Kepulauan Riau	80,00	-	658,74	1.880,99	-
13	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
11	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	541,00	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
12	Banten	-	-	-	199,14	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	28,92	-
19	Nusa Tenggara Timur	36,00	1.108,00	-	1.782,21	-
20	Kalimantan Barat	-	1.217,00	800,51	-	-
21	Kalimantan Tengah	2.411,00	3.456,00	2.443,42	4.713,01	-
22	Kalimantan Selatan	394,52	-	3.076,00	-	60,00
23	Kalimantan Timur	-	868,00	325,00	-	100,00
	Kalimantan Timur (IKN)	-	-	199,00	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	254,00	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	430,00	2.543,00	300,00	799,45	-
27	Sulawesi Selatan	-	959,00	-	1.732,62	1.920,53
28	Sulawesi Tenggara	340,00	330,00	137,77	230,32	31,00
29	Gorontalo	8,40	-	-	11,69	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	67,00	66,00	64,42	3.938,09	10,41
32	Maluku Utara	84,13	283,00	146,88	4.833,55	-
33	Papua	2.098,34	2.111,00	262,40	2.357,58	48,90
34	Papua Barat	-	811,00	-	1.572,79	86,03
37	Papua Selatan	-	-	-	-	-
35	Papua Tengah	-	-	-	-	-
36	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		7.097,40	19.624,00	13.052,46	46.921,16	2.725,57

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perkembangan

Tabel 1.17 Luas Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (Ha)														s.d. 2024	
		2020			2021			2022			2023			2024			
		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Aceh	-	-	-	-	13	1.577.929,23	-	-	6	63.463,84	38	2.567.591,13				
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	13	133.054,64	15	126.726,03	-	-	75	2.006.731,56				
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	3	190.793,26	4	13.980,28	-	-	58	1.618.632,48				
4	Riau	-	-	3	60.215,34	11	51.577,56	42	489.439,02	10	119.594,96	119	2.849.586,70				
5	Jambi	-	-	-	-	14	580.941,18	1	4.805,63	1	16.118,11	63	2.333.526,43				
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	17	367.754,62	3	3.975,97	1	14.012,66	71	3.358.957,66				
7	Bengkulu	-	-	-	-	1	9.304,34	-	-	-	-	54	711.927,76				
8	Lampung	-	-	-	-	4	282.045,31	1	9.714,35	2	22.938,44	36	917.935,54				
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	9	80.606,41	1	480,63	6	26.170,04	100	638.344,51				
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	8	25.949,80	-	-	35	130.055,57				
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107.856,20				
12	Jawa Barat	-	-	4	91,79	3	595,75	4	415,27	-	-	151	952.686,85				
13	Jawa Tengah	-	-	3	238,63	1	0,90	5	139,90	-	-	147	802.171,53				
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.860,93				
15	Jawa Timur	-	-	-	-	7	88.587,70	2	976,26	1	16.863,00	154	1.072.008,44				
16	Banten	-	-	-	-	-	-	1	720,43	1	32,42	22	200.457,28				
17	Bali	-	-	-	-	-	-	1	3,37	-	-	26	137.431,47				
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	1.187.580,98				
19	Nusa Tenggara Timur	7	17.075,73	4	3.778,44	-	-	16	1.290,94	10	1.045,33	172	1.124.421,81				
20	Kalimantan Barat	2	8.752,44	10	284.440,22	22	1.223.087,31	11	293.970,89	1	341.066,67	208	8.277.655,73				
21	Kalimantan Tengah	-	-	1	27.868,21	16	2.862.409,15	10	1.747.018,39	1	1.718,33	56	8.524.090,14				
22	Kalimantan Selatan	2	5.788,79	4	12.331,25	3	38.153,06	5	266.586,62	2	27.691,18	58	1.854.328,78				

No	Provinsi	Luas Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (Ha)												s.d. 2024				
		2020			2021			2022			2023					2024		
		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas		Unit	Luas
23	Kalimantan Timur	1	11.773,14		6	576.829,24		11	381.435,04		24	735.261,98		-		127	9.637.577,20	
24	Kalimantan Utara	5	149.265,26		-	-		13	316.956,53		11	875.751,34		-		47	4.760.062,84	
25	Sulawesi Utara	-	-		-	-		1	26.989,60		2	293,22		-		63	408.642,27	
26	Sulawesi Tengah	-	-		1	7.289,60		-	-		2	338.383,70		2	650,56	66	2.836.644,84	
27	Sulawesi Selatan	-	-		-	-		-	-		-	-		-		68	2.035.298,50	
28	Sulawesi Tenggara	-	-		-	-		-	-		2	112.078,46		-		48	3.375.736,08	
29	Gorontalo	-	-		-	-		2	6.720,18		-	-		-		34	812.008,95	
30	Sulawesi Barat	-	-		-	-		2	14.859,10		4	49.088,98		-		24	1.063.131,59	
31	Maluku	2	943,61		2	15.291,91		6	61.002,11		-	-		2	2.508,42	129	2.746.211,07	
32	Maluku Utara	2	71.633,37		-	-		-	-		-	-		1	40.375,69	59	1.458.750,88	
33	Papua	10	72.240,54		5	287.902,52		4	1.683.200,11		2	125.934,22		-		113	26.786.382,89	
34	Papua Barat	-	-		-	-		1	27.099,36		4	1.313.899,04		-		44	9.462.897,03	
35	Papua Selatan	-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-	
36	Papua Tengah	-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-	
37	Papua Pegunungan	-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-	
38	Papua Barat Daya	-	-		-	-		-	-		5	50.258,86		-		5	50.258,86	
Jumlah		31	337.472,88		43	1.276.277,15		177	10.005.102,45		186	6.587.143,58		47	694.249,65	2.545	106.816.442,48	

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perkembangan

Tabel 1.18

Luas Perkembangan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2015 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI III	Target 2015 2024	Luas Perkembangan Penyediaan TORA (Ha)												
				2019				2020				2021				
				2015	2016	2017	2018	RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTRW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Penataan Batas KH Reguler
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Non Eksisting (Non-inver)																
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan	487.762,27	430.000,00	-	341.731,00	33.392,00	54.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.119.512,91	1.590.000,00	-	-	-	938.878,00	-	-	-	-	-	-	-	695,70	-
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.063,38	39.000,00	-	-	-	39.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1.667.338,57	2.059.000,00	-	341.731,00	33.392,00	1.032.342,00	-	-	-	-	-	-	-	695,70	-
Eksisting (Inver)																
4	Pernukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	553.745,48	490.000,00	-	41.367,00	9.342,00	213.870,00	-	-	-	-	2.772,46	-	-	-	-
5	Pernukiman fasos dan fasum	361.800,22	640.000,00	-	307.516,11	-	-	296.061,00	34.134,00	19.778,00	70.183,72	-	-	-	-	-
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2.416.516,00	360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.558,00	37.754,50	-	35.077,00
7	pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	-	590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.332.061,69	2.080.000,00	-	348.883,11	9.342,00	213.870,00	296.061,00	34.134,00	19.778,00	70.183,72	2.772,46	21.558,00	37.754,50	-	35.077,00
Target IKU		4.999.400,26	4.139.000,00	-	0,10	0,30	0,40	-	-	340.000,00	-	46.500,00	-	-	-	184.400,00
Realisasi (APL) Pertahun		-	-	-	690.614,11	42.734,00	268.105,00	-	-	349.973,00	-	72.956,18	-	-	-	95.085,20
Realisasi (APL) Akumulasi		-	-	-	690.614,11	733.348,11	1.001.453,11	-	-	1.351.426,11	-	1.424.382,29	-	-	-	1.519.467,49
Progres (APL+KH) Akumulasi		-	-	-	690.614,11	733.348,11	1.979.560,11	-	-	2.329.533,11	-	2.402.489,29	-	-	-	2.496.878,79
Persen Capaian Progres		-	-	-	0,17	0,18	0,48	-	-	0,56	-	0,58	-	-	-	0,60

No	Uraian Kegiatan	Luas Perkembangan Penyediaan TORA (Ha)												Total 2015-2024	Persen Capaian dari Target RPJMN	Sisa Target		
		2022						2023									2024	
		Peruba- han Batas (APL)	Pene- gasan Trans	Penataan Batas KH Reguler	Update 20% dari Pelepasan KH	Pene- gasan Trans	RTRW	Peruba- han Batas (APL)	SK Pen- cadangan HPK TP	SK Pelep- san dari HPK Tidak Produktif	Persetujuan PB PPTKH	Peruba- han Batas (APL)	RTRW					
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Non Eksisting (Non-Inver)																		
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perke- buran	-	-	-	53.001,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482.359,20	112%		
2	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	-	-	-	-	-	-	-	3.810,00	965,00	-	-	-	-	942.688,00	59%	647.312,00	
3	Program pe- merintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.229,00	101%	-	
Total		-	-	-	53.001,20	-	-	-	3.810,00	965,00	-	-	-	-	1.464.276,20	71%	0,29	
Eksisting (Inver)																		
4	Permukiman Transmigrasi berserta fasos-fa- sunnya yang sudah memper- oleh persetujuan prinsip	-	1.543,00	-	-	2.491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	271.385,46	55%	218.614,54	
5	Permukiman fasos dan fasum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.366,28	48.316,79	71.229,49	1.281.649,79	81%	308.350,21		
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	66.265,68	-	31.679,00	-	-	4.208,61	107.521,61	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		66.265,68	1.543,00	31.679,00	-	2.491,00	4.208,61	107.521,61	-	-	130.366,28	48.316,79	71.229,49	1.553.035,25	75%	30%		
Target IKU		-	-	94.756,00	-	-	-	-	-	-	126.268,63	-	119.543,00	-	0%	-		
Realisasi (APL) Pertahun		-	-	99.487,68	-	-	-	-	-	-	168.187,42	-	119.546,28	-	0%	-		
Realisasi (APL) Akumulasi		-	-	1.618.955,17	-	-	-	-	-	-	1.787.142,59	-	1.906.688,88	100,00	0%	-		
Progres (APL+KH) Akumulasi		-	-	2.596.366,47	-	-	-	-	-	-	2.897.765,17	-	-	3.017.311,45	0%	1.174.276,75		
Persen Capaian Progres		-	-	0,63	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	0,73	0%	0,30		

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Data tidak teridentifikasi/Tidak ada perkembangan

Tabel 1.19 Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survei/Eksplorasi (Tambang) Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Ha)									
		s.d. 2020		s.d. 2021		s.d. 2022		s.d. 2023		s.d. 2024	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	8	59.845,00	8	59.845,00	8	59.845,00	8	59.845,00	10	67.454,68
2	Sumatera Utara	14	106.387,43	15	106.391,64	19	133.836,71	21	155.229,39	22	162.402,90
3	Sumatera Barat	3	4.720,53	3	4.720,53	3	4.720,53	3	4.720,53	3	4.720,53
4	Riau	11	446.063,15	12	446.075,94	13	446.078,37	15	447.971,89	19	450.820,30
5	Jambi	53	234.627,54	54	234.634,74	55	243.274,89	56	243.279,15	60	246.606,13
6	Sumatera Selatan	47	219.773,09	48	219.776,84	50	219.788,55	51	219.792,89	56	273.099,34
7	Bengkulu	4	5.352,04	4	5.352,04	4	5.352,04	4	5.352,04	4	5.352,04
8	Lampung	1	8.574,19	1	8.574,19	1	8.574,19	2	16.929,36	2	16.929,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	20.100,72	7	20.100,72	7	20.100,72	7	20.100,72	7	20.100,72
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21.062,22
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	15	9.911,51	15	9.911,51	15	9.911,51	15	9.911,51	17	9.987,78
13	Jawa Tengah	19	24.867,40	19	24.867,40	19	24.867,40	19	24.867,40	20	24.873,95
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	28	70.207,99	28	70.207,99	28	70.207,99	28	70.207,99	30	74.600,34
16	Banten	4	1.905,11	4	1.905,11	4	1.905,11	4	1.905,11	4	1.905,11
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	16	128.433,43	16	128.433,43	16	128.433,43	16	128.433,43	17	144.810,98
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	9	39.639,29	9	39.639,29	12	60.222,48	12	60.222,48	12	60.222,48
21	Kalimantan Tengah	102	1.667.547,52	103	1.668.749,18	106	1.674.197,06	113	1.712.877,02	118	1.728.115,04
22	Kalimantan Selatan	20	97.956,50	20	97.956,50	20	97.956,50	21	99.341,60	24	107.150,79
23	Kalimantan Timur	112	414.868,56	116	431.918,35	120	438.802,48	123	455.257,68	128	479.539,43
24	Kalimantan Utara	25	114.113,67	25	114.113,67	25	114.113,67	25	114.113,67	26	118.189,74
25	Sulawesi Utara	7	48.170,74	7	48.170,74	7	48.170,74	8	61.169,62	10	68.468,88
26	Sulawesi Tengah	20	106.269,37	21	107.253,37	22	107.321,24	23	118.185,39	24	119.033,46
27	Sulawesi Selatan	7	59.767,79	7	59.767,79	7	59.767,79	7	59.767,79	8	77.007,07
28	Sulawesi Tenggara	22	93.788,93	24	93.949,68	25	93.963,80	28	95.475,78	29	96.879,08
29	Gorontalo	7	30.357,24	7	30.357,24	7	30.357,24	7	30.357,24	7	30.357,24
30	Sulawesi Barat	1	33,55	1	33,55	1	33,55	1	33,55	1	33,55
31	Maluku	19	13.450,94	19	13.450,94	20	13.463,19	20	13.463,19	21	14.550,50
32	Maluku Utara	84	310.017,80	87	316.787,00	89	326.797,11	93	332.272,69	98	357.515,36
33	Papua	10	107.876,41	10	107.876,41	11	111.653,14	11	111.653,14	11	111.653,14
34	Papua Barat	28	106.772,48	28	106.772,48	29	106.777,67	30	107.196,31	31	107.290,33
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	2	7,67	2	7,67
Jumlah		703	4.551.399,90	718	4.577.593,25	743	4.660.494,08	773	4.779.941,23	829	5.000.740,13

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024
Keterangan:
· Data dihitung secara kumulatif
· - = Data tidak teridentifikasi / Tidak ada kawasan tambang

Tabel 1.20 Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survei/ Eksplorasi Kegiatan Non Tambang Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Ha)									
		s.d. 2020		s.d. 2021		s.d. 2022		s.d. 2023		s.d. 2024	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	1	10,72	1	10,72	1	10,72	1	10,72	1	10,72
2	Sumatera Utara	2	5.454,72	2	5.454,72	4	5.588,62	4	5.588,62	6	11.402,21
3	Sumatera Barat	1	3.185,46	1	3.185,46	1	3.185,46	2	3.864,46	2	3.864,46
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera selatan	2	99,30	2	99,30	2	99,30	2	99,30	2	99,30
7	Bengkulu	1	164,00	1	164,00	1	164,00	1	164,00	1	164,00
8	Lampung	-	-	-	-	1	50,00	1	50,00	1	50,00
9	Kepulauan Bangka belitung	1	1.081,00	1	1.081,00	1	1.081,00	1	1.081,00	1	1.081,00
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4	112,00	4	112,00	5	131,90	5	131,90	5	131,90
13	Jawa Tengah	2	50,27	3	543,73	3	543,73	3	543,73	4	544,73
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,78
15	Jawa Timur	2	17,54	3	1.320,54	3	1.320,54	3	1.320,54	7	1.322,01
16	Banten	2	8,76	3	16,71	3	16,71	3	16,71	4	17,00
17	Bali	1	25,28	1	25,28	1	25,28	1	25,28	1	25,28
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	8.009,33	1	8.009,33	2	8.035,49	2	8.035,49
19	Nusa Tenggara Timur	1	2,50	1	2,50	1	2,50	1	2,50	1	2,50
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.412,65
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	1	1,01	1	1,01	2	7,09
23	Kalimantan Timur	1	23.870,28	1	23.870,28	2	25.290,12	2	25.290,12	2	25.290,12
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	2	1.375,66	3	1.835,43	4	2.295,20
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	3.079,33	1	3.079,33	1	3.079,33
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	1	4,02	1	4,02	1	4,02
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.076,14
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	1	71,40	2	75,55	2	75,55	2	75,55
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	1	52,51	1	52,51
33	Papua	-	-	-	-	1	31.985,59	1	31.985,59	1	31.985,59
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		21	34.081,83	26	43.966,97	38	82.040,37	42	83.257,81	56	96.029,58

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Data dihitung secara kumulatif
 - - = Data tidak teridentifikasi / Tidak ada penggunaan kawasan untuk non tambang

Tabel 1.21 Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang) Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Ha)									
		s.d. 2020		s.d. 2021		s.d. 2022		s.d. 2023		s.d. 2024	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	1	100,42	2	436,13	2	436,13	3	780,13	3	780,13
2	Sumatera Utara	4	754,55	5	782,42	5	782,42	6	784,31	9	808,65
3	Sumatera Barat	7	1.505,06	9	1.635,67	9	1.635,67	10	1.789,56	10	1.789,56
4	Riau	12	5.227,00	13	5.281,37	16	7.994,65	19	8.102,80	37	10.306,19
5	Jambi	21	5.816,81	24	6.466,44	27	6.653,65	34	7.699,62	39	7.992,17
6	Sumatera selatan	29	20.265,09	39	24.645,89	44	25.727,82	60	30.636,85	75	32.797,83
7	Bengkulu	5	3.385,02	5	3.385,02	7	3.793,92	7	3.793,92	7	3.793,92
8	Lampung	7	202,42	8	247,43	8	247,43	8	247,43	8	247,43
9	Kepulauan Bangka belitung	21	4.653,35	27	5.698,14	28	5.704,23	34	7.129,72	39	7.795,01
10	Kepulauan Riau	1	67,85	1	67,85	2	1.145,96	3	1.202,62	6	1.943,14
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	29	1.330,85	42	1.533,41	49	1.848,91	52	2.576,70	61	2.743,63
13	Jawa Tengah	15	424,54	18	430,69	21	596,89	22	715,30	24	772,59
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	21	1.955,49	24	2.012,23	28	2.435,82	29	2.488,37	35	2.824,86
16	Banten	-	-	1	16,79	1	16,79	1	16,79	6	531,71
17	Bali	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	-	1	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	6.950,92	3	6.950,92	5	8.111,15	6	8.175,74	6	8.175,74
19	Nusa Tenggara Timur	2	83,00	2	83,00	3	88,08	4	756,27	4	756,27
20	Kalimantan Barat	4	500,33	7	1.359,55	14	6.075,89	17	7.555,23	19	8.410,38
21	Kalimantan Tengah	62	51.738,93	71	59.855,02	95	71.376,81	123	90.722,12	164	123.387,27
22	Kalimantan Selatan	74	19.776,55	85	22.857,56	103	37.671,13	126	51.802,17	141	61.917,33
23	Kalimantan Timur	76	90.710,76	90	101.584,56	101	109.463,12	125	156.506,56	167	203.904,08
24	Kalimantan Utara	6	6.560,85	8	7.547,23	12	10.595,88	14	11.123,00	16	11.370,55
25	Sulawesi Utara	9	2.617,60	9	2.617,60	10	2.771,46	11	2.870,51	12	3.623,29
26	Sulawesi Tengah	13	7.628,12	20	9.370,87	27	11.681,58	40	19.420,98	66	27.382,98
27	Sulawesi Selatan	16	9.008,45	16	9.008,45	18	9.022,23	21	12.898,21	29	16.131,96
28	Sulawesi Tenggara	36	14.444,93	47	28.393,25	59	30.222,20	76	36.232,53	100	49.853,25
29	Gorontalo	1	93,70	1	93,70	2	1.032,88	2	1.032,88	4	3.335,84
30	Sulawesi Barat	-	-	1	603,50	1	603,50	1	603,50	2	688,60
31	Maluku	1	4,94	1	4,94	3	33,46	4	460,61	6	1.355,00
32	Maluku Utara	27	12.731,24	35	15.303,30	41	18.563,67	60	26.392,25	78	34.813,64
33	Papua	-	-	-	-	1	3.808,81	1	3.808,81	1	3.808,81
34	Papua Barat	5	745,31	7	810,10	9	1.212,15	11	2.097,22	13	2.332,58
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	2	10,70	2	10,70
Jumlah		509	269.284,06	622	319.083,02	752	381.354,28	933	500.433,41	1.190	636.385,07

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
· Data dihitung secara kumulatif
· - = Data tidak teridentifikasi / Tidak ada kawasan tambang

Tabel 1.22 Luas Kumulatif Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Tambang Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Tambang (Ha)									
		s.d. 2020		s.d. 2021		s.d. 2022		s.d. 2023		s.d. 2024	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	9	1.038,20	9	1.038,20	11	1.267,10	13	1.655,20	15	1.943,99
2	Sumatera Utara	59	3.180,79	63	3.892,32	66	4.377,30	70	4.453,67	81	4.846,30
3	Sumatera Barat	21	888,84	22	906,16	25	970,72	27	996,97	30	1.170,87
4	Riau	10	24.067,89	11	24.135,49	12	24.225,99	13	24.580,20	13	24.580,20
5	Jambi	2	93,19	4	152,62	4	152,62	4	152,62	5	329,90
6	Sumatera Selatan	14	790,14	15	892,65	20	1.095,06	24	1.982,27	25	1.987,98
7	Bengkulu	14	624,97	14	624,97	14	624,97	16	671,65	18	733,44
8	Lampung	6	317,70	7	329,78	8	341,34	10	446,10	12	499,97
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	86,38	5	86,38	5	86,38	8	139,25	8	139,25
10	Kepulauan Riau	13	461,91	14	748,72	15	759,58	15	759,58	16	766,60
11	DKI Jakarta	3	16,22	3	16,22	4	26,13	4	26,13	4	26,13
12	Jawa Barat	38	2.002,12	40	2.014,04	51	3.534,95	54	3.903,56	60	3.994,92
13	Jawa Tengah	45	6.467,39	48	6.551,77	51	7.107,37	53	7.147,39	56	7.165,67
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	42,45	1	42,45	1	42,45	1	42,45	1	42,45
15	Jawa Timur	21	1.113,36	25	1.995,99	31	2.654,15	36	3.172,35	47	3.979,10
16	Banten	2	32,85	2	32,85	3	33,79	3	33,79	4	215,34
17	Bali	17	101,87	17	101,87	17	101,87	18	102,36	20	187,85
18	Nusa Tenggara Barat	15	942,17	15	942,17	15	942,17	16	1.401,55	18	1.406,69
19	Nusa Tenggara Timur	11	258,12	13	384,81	13	384,81	13	384,81	16	401,88
20	Kalimantan Barat	8	12.831,08	9	12.856,52	10	12.903,48	12	12.953,02	15	13.054,50
21	Kalimantan Tengah	6	1.841,83	7	2.065,63	12	2.948,44	13	2.952,39	20	6.040,02
22	Kalimantan Selatan	6	1.129,12	6	1.129,12	8	1.450,74	8	1.450,74	9	3.464,98
23	Kalimantan Timur	9	259,86	11	407,37	16	891,55	18	905,54	20	943,88
24	Kalimantan Utara	8	2.423,56	13	4.305,90	15	4.551,54	15	4.551,54	16	4.578,06
25	Sulawesi Utara	3	14,03	3	14,03	5	530,91	6	598,01	7	938,26
26	Sulawesi Tengah	22	1.321,11	23	1.372,63	24	1.425,68	28	3.181,79	32	3.697,36
27	Sulawesi Selatan	13	1.155,45	14	1.156,07	16	1.195,24	17	1.275,69	18	1.350,04
28	Sulawesi Tenggara	7	2.169,61	7	2.169,61	9	2.228,03	12	2.858,53	13	2.882,10
29	Gorontalo	6	263,94	6	263,94	8	292,11	10	302,99	10	302,99
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	1	480,13	3	689,42
31	Maluku	2	86,40	2	86,40	8	1.449,92	8	1.449,92	10	1.596,65
32	Maluku Utara	2	21,89	2	21,89	2	21,89	3	212,73	4	228,00
33	Papua	8	1.859,59	9	1.869,91	11	2.019,22	11	2.019,22	13	2.051,09
34	Papua Barat	3	6.384,08	3	6.384,08	4	6.389,48	4	6.389,48	5	6.400,80
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.607,30
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		409	74.288,09	443	78.992,54	514	87.026,97	564	93.633,60	645	135.243,94

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
• Data dihitung secara kumulatif
• - = Data tidak teridentifikasi / Tidak ada penggunaan kawasan untuk non tambang

Tabel 1.23 Luas Perkembangan Lahan Kompensasi Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Perkembangan Lahan Kompensasi (Ha)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	1	100,40	2	73,92	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	1	5,87	-	-
12	Jawa Barat	3	60,69	1	8,50	3	60,02	2	31,13	1	22,93
13	Jawa Tengah	-	-	8	136,04	-	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	4	215,20	1	53,09	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3	60,69	14	460,14	6	187,03	3	36,99	1	22,93

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
· Data di atas merupakan perkembangan lahan kompensasi s.d. tahap berita acara serah terima.
· -= Data tidak teridentifikasi / Tidak ada perkembangan lahan kompensasi



BAB 2

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Sumber Foto: Erfan Ekananda TN Tanjung Puting

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Fungsi utamanya meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara lestari terhadap kawasan konservasi, jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL), serta ekosistem penting lainnya di Indonesia. Dalam menjalankan mandat ini, Ditjen KSDAE mengelola berbagai program strategis yang tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Sumber Foto: Tim Dokumentasi TN Lore Lindu

500 UNIT

JUMLAH PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
AKTIF TAHUN 2020 - 2024

REKAPITULASI PENGUNJUNG KAWASAN
KONSERVASI TAHUN 2024

6.590.985
PENGUNJUNG

JUMLAH TENAGA PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2024

2.797 **ORANG**

JUMLAH KAWASAN KONSERVASI
MENURUT FUNGSINYA TAHUN 2024

42 **KAWASAN**

SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN
HAYATI PEGUNUNGAN DALAM KAWASAN
KONSERVASI

573
KAWASAN



Sumber Foto: Simon Onggo SETJEN

Tabel 2.1 Jumlah Kawasan Konservasi menurut Fungsinya Tahun 2020 - 2024

No	Fungsi Kawasan Konservasi	Jumlah Unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Cagar Alam	212	214	214	213	212
2	Suaka Margasatwa	80	80	80	85	86
3	Taman Nasional*	54	54	54	55	55
4	Taman Wisata Alam	133	130	130	128	134
5	Taman Hutan Raya	36	39	39	44	49
6	Taman Buru	11	11	11	10	10
7	KSA/KPA	34	40	40	29	27
Jumlah		560	568	568	564	573

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024

Keterangan :

- * = Terdapat tambahan dua taman nasional pada tahun 2024, namun belum masuk di SK Direktur Jenderal KSDAE nomor SK.117/KSDAE/SETKSDAE/KSA.0/6/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya

Tabel 2.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Jumlah (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Perizinan Berusaha Pengusahaan Penyediaan Sarana Wisata Alam	6.141	1.928	1.521	1.585	1.585
2	Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam	-	4.675	1.129	2.757	2.757
3	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	1.805	2.089	1.969	1.969	2.451
4	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air	105	-	-	-	704
5	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Energi Air	275	-	-	-	1.164
Jumlah		8.326	8.692	4.619	6.311	8.661

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024

Keterangan :

- (-) Belum teridentifikasi

Tabel 2.3 Jumlah Pemegang Izin Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Aktif Tahun 2024

No	Provinsi	Jenis Spesies (Unit)														Jumlah
		Amfibi		Aves		Koral/karang hias		Mamalia		Reptil		Tumbuhan				
		Komersial	Non Komersial	Komersial	Non Komersial	Komersial	Non Komersial	Komersial	Non Komersial	Komersial	Non Komersial	Komersial	Non komersial			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Aceh	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Sumatera Utara	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
12	Jawa Barat	1	-	2	2	-	-	3	2	1	-	-	-	-	11	
13	Jawa Tengah	-	-	-	5	-	-	1	8	-	-	-	-	-	14	
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	
15	Jawa Timur	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	2	-	8	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
17	Bali	-	-	-	1	15	-	1	-	-	-	-	-	-	17	
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

Lanjutan Tabel 2.3 Jumlah Pemegang Izin Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Aktif Tahun 2024

No		Provinsi	Jenis Spesies (Unit)												Tumbuhan		Jumlah
			Amfibi		Aves		Koral/karang hias		Mamalia		Reptil						
													Komersial	Non Komersial	Komersial	Non Komersial	
22		Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
23		Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
24		Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
25		Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
26		Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
27		Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
28		Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
29		Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
30		Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
31		Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
32		Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
33		Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
34		Papua Barat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
35		Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
36		Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
37		Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
38		Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Jumlah	1	-	5	11	22	1	6	14	3	1	2	-	-	66	

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024
Keterangan :
(-) Belum teridentifikasi

Tabel 2.4 Jumlah Pemegang Izin Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Aktif Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Tahun (Unit)												Jumlah		
		2020			2021			2022			2023				2024	
		Komersial	Non Komersial		Komersial	Non Komersial		Komersial	Non Komersial		Komersial	Non Komersial			Komersial	Non Komersial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Aceh	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	6			
2	Sumatera Utara	4	2	6	4	5	1	1	1	1	1	1	25			
3	Sumatera Barat	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3			
4	Riau	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4			
5	Jambi	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	7			
6	Sumatera Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
7	Bengkulu	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
8	Lampung	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	5			
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1			
10	Kepulauan Riau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3			
11	DKI Jakarta	1	2	6	4	4	1	5	4	2	-	-	29			
12	Jawa Barat	4	-	8	6	4	4	10	8	7	4	4	55			
13	Jawa Tengah	2	9	5	11	2	21	5	32	1	13	13	101			
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1	3	14	2	1	-	7	-	2	2	30			
15	Jawa Timur	4	10	14	2	5	8	5	8	7	1	1	64			
16	Banten	-	-	9	14	2	4	6	2	-	-	-	37			
17	Bali	4	3	7	5	3	2	5	8	16	1	1	54			
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	5			
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3			
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
21	Kalimantan Tengah	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2			
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			

Lanjutan Tabel 2.4 Jumlah Pemegang Izin Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Aktif Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Tahun (Unit)												Jumlah		
		2020			2021			2022			2023				2024	
		Komersial	Non Komersial		Komersial	Non Komersial		Komersial	Non Komersial		Komersial	Non Komersial			Komersial	Non Komersial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
27	Sulawesi Selatan	2	3	4	-	3	1	11	1	1	1	-	26	26		
28	Sulawesi Tenggara	-	5	1	-	1	3	1	6	1	1	-	18	18		
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
30	Sulawesi Barat	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3		
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2		
32	Maluku Utara	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2		
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2		
34	Papua Barat	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4		
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
Jumlah		23	44	74	71	35	48	55	85	39	27	500				

Sumber: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024
Keterangan:
• Pada Provinsi Banten tahun 2022, ada satu komoditas Aves yang tidak diketahui apakah komersial/non komersial
• (-) = Belum teridentifikasi

Tabel 2.5 Jumlah Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2024

No	Provinsi	Tujuan			
		Dalam Negeri		Luar Negeri	
		Perusahaan	Jenis Komoditas	Perusahaan	Jenis Komoditas
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	2	Reptil	-	-
2	Sumatera Utara	4	Reptil, Amphibi, Tumbuhan Decaying Ramin	4	Tumbuhan, Amphibi, Reptil
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	4	Lola Merah, Reptil, Moluska	1	Tumbuhan
5	Jambi	4	Insecta, Burung, Tumbuhan, Mamalia	-	-
6	Sumatera Selatan	3	Reptil, Tumbuhan	1	Reptil
7	Bengkulu	1	Tumbuhan	1	Tumbuhan
8	Lampung	1	Moluska	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	17	Reptil, Buaya, Amphibi, Gaharu, Insekta, Arthropoda, Tumbuhan, Burung, Mamalia	14	Tumbuhan, Reptil, Karang Hias, Mamalia
12	Jawa Barat	7	Karang Hias, Gaharu, Ramin, Soa soa, Tumbuhan, Reptil, Aves, Mamalia	7	Mamalia, Burung, Amphibi, Reptil, Anggrek Hybrida
13	Jawa Tengah	5	Tumbuhan Decaying Ramin, Lola Merah, Karang Hias, Burung	10	Tumbuhan, Reptil, Burung, Mamalia, Sarang Burung Walet
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	Karang Hias	2	Reptil
15	Jawa Timur	22	Arthropoda, Burung, Reptil, Teripang, Karang Hias, Moluska, Tumbuhan, Amphibi,	17	Reptil, Tumbuhan, Karang Hias, Amphibi, Sarang Burung Walet, Burung
16	Banten	3	Mamalia, Tumbuhan, Reptil	-	-
17	Bali	11	Reptil, Gaharu, Tumbuhan, Mamalia, Karang Hias, Burung	6	Teripang, Reptil, Karang Hias
18	Nusa Tenggara Barat	3	Reptil, Tumbuhan	3	Karang Hias, Mamalia
19	Nusa Tenggara Timur	2	Reptil	-	-
20	Kalimantan Barat	4	Reptil, Tumbuhan	1	Reptil
21	Kalimantan Tengah	5	Burung, Gaharu, Moluska, Tumbuhan	5	Tumbuhan
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	1	Tumbuhan Decaying Ramin	-	-
24	Kaimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	2	Arthropoda, Moluska	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	6	Lola Merah, Reptil, Gaharu, Mamalia	5	Karang Hias, Tumbuhan, Insekta, Reptil
28	Sulawesi Tenggara	2	Burung, Moluska	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-
31	Maluku	1	Reptil	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua	4	Reptil, Gaharu, Karang Hias, Arthropoda	-	-
34	Papua Barat	1	Moluska	1	Teripang
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Jumlah		119		78	

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024
Keterangan:
· (-) = Belum teridentifikasi

Tabel 2.6 Jumlah Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Tujuan									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	-	-	1	-	3	2	1	-	2	-
2	Sumatera Utara	-	-	14	13	4	7	5	4	4	4
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
4	Riau	-	-	9	5	1	3	-	1	4	1
5	Jambi	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1
7	Bengkulu	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
8	Lampung	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	36	61	8	16	9	27	17	14
12	Jawa Barat	-	-	31	33	4	7	4	8	7	7
13	Jawa Tengah	-	-	23	14	10	7	8	4	5	10
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	5	5	-	1	3	-	4	2
15	Jawa Timur	-	-	65	59	36	33	13	12	22	17
16	Banten	-	-	17	20	3	-	2	-	3	-
17	Bali	-	-	11	19	4	7	1	7	11	6
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	5	-	6	2	-	-	3	3
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-
20	Kalimantan Barat	-	-	20	14	2	3	-	-	4	1
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	1	1	1	-	1	5	5
22	Kalimantan Selatan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	4	1	1	-	1	-	1	-
24	Kalimantan Utara	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	18	13	2	3	2	2	6	5
28	Sulawesi Tenggara	-	-	4	1	1	-	5	2	2	-
29	Gorontalo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	4	3	-	-	2	-	1	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
33	Papua	-	-	11	-	3	-	8	-	4	-
34	Papua Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	302	266	94	94	70	70	119	78

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024

Keterangan:

· (-) = Belum teridentifikasi

Tabel 2.7 Luas Target dan Realisasi Kawasan Yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Sebagai Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target Luasan (Ha)	Realisasi Target (Ha)	Lokasi
1	2	3	4	5
1	BKSDA Aceh	393.933,00	153.080,35	Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues
2	BBKSDA Sumatera Utara	283.568,00	799.801,95	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
3	BKSDA Sumatera Barat	156.607,00	372.340,90	Agam, Dharmasraya, Kota Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar
4	BBKSDA Riau	711.503,00	991.456,83	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai
5	BKSDA Bengkulu-Lampung*	-	-	-
6	BKSDA Sumatera Selatan**	351.922,00	-	-
7	BKSDA Jambi**	45.482,00	-	-
8	BKSDA Kalimantan Selatan***	-	252.121,91	Kotabaru, Tanah Bumbu
9	BKSDA Kalimantan Tengah	635.969,00	678,92	Lamandau
10	BKSDA Kalimantan Timur***	-	173.323,79	Tana Tidung
11	BKSDA Kalimantan Barat***	-	1.853.854,97	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
12	BBKSDA Jawa Barat*	-	-	-
13	BKSDA Jawa Tengah*	-	-	-
14	BBKSDA Jawa Timur*	-	-	-
15	BKSDA DIY*	-	-	-
16	BKSDA Jakarta***	-	351,38	Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat
17	BBKSDA Sulawesi Selatan	502.112,00	513.351,00	Barru, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Polewali Mandar
18	BKSDA Sulawesi Tengah	389.247,00	436.630,05	Sigi, Toli Toli
19	BKSDA Sulawesi Tenggara***	-	36.562,34	Konawe Kepulauan
20	BKSDA Sulawesi Utara***	-	555.731,33	Boalemo, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato
21	BKSDA Bali***	-	1.427,17	Badung, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Tabanan
22	BKSDA NTB*	-	-	-
23	BBKSDA NTT*	-	-	-
24	BKSDA Maluku	197.802,00	153.909,13	Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat
25	BBKSDA Papua	1.554.527,00	2.864.441,08	Asmat, Biak-Numfor, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mimika, Sarmi, Waropen, Yalimo
26	BBKSDA Papua Barat	508.828,00	794.206,24	Mnokwari, Pegunungan Arfak, Sorong, Tambrauw, Teluk Bintuni
Jumlah		5.731.500,00	9.953.269,34	

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024
Keterangan :
* = Tidak ada kegiatan indentifikasi dan verifikasi pada UPT tersebut
** = Target telah tercapai pada tahun sebelumnya
*** = Penambahan capaian di UPT

Tabel 2.8

Capaian Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi sebagai Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Konservasi Tahun 2020 - 2024

No	Unit Kerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target Luasan (Ha)	Realisasi Target (Ha)	Target Luasan (Ha)	Realisasi Target (Ha)	Target Luasan (Ha)	Realisasi Target (Ha)	Target Luasan (Ha)	Realisasi Target (Ha)	Target Luasan (Ha)	Realisasi Target (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BKSDA Aceh	333.203,00	708.389,70	393.933,00	414.469,53	393.933,00	292.031,98	393.933,00	512.834,16	393.933,00	153.080,35
2	BBKSDA Sumatera Utara	294.187,00	2.792,97	283.568,00	115.228,49	283.568,00	297.793,11	283.568,00	-	283.568,00	799.801,95
3	BKSDA Sumatera Barat	294.187,00	549.642,99	156.607,00	208.967,25	156.607,00	-	156.607,00	-	156.607,00	372.340,90
4	BBKSDA Riau	627.381,00	327.015,02	711.502,00	756.596,26	711.502,00	682.968,01	711.501,00	917.245,04	711.503,00	991.456,83
5	BKSDA Bengkulu-Lampung	294.187,00	583.940,38	156.820,00	63.842,08	156.820,00	187.726,12	-	-	-	-
6	BKSDA Sumatera Selatan	294.187,00	1.271.982,01	351.922,00	264.105,67	351.922,00	341.674,46	351.922,00	156.631,51	351.922,00	-
64	BKSDA Jambi	294.187,00	111.064,34	145.482,00	575.335,92	145.482,00	195.864,61	245.482,00	-	45.482,00	-
	BKSDA Kalimantan Selatan	333.203,00	402,14	35.141,00	333.556,89	61.656,00	107.629,51	43.769,00	92.014,47	-	252.121,91
5	BKSDA Kalimantan Tengah	333.203,00	652.669,10	1.271.937,00	101.903,82	1.271.937,00	1.664.269,20	1.907.906,00	3.413.923,42	635.969,00	678,92
	BKSDA Kalimantan Timur	549.356,00	546.557,58	1.749.602,00	2.202.204,40	874.801,00	348.317,16	874.801,00	1.982.802,38	-	173.323,79
	BKSDA Kalimantan Barat	333.204,00	97.612,73	935.663,00	146.263,06	1.871.326,00	281.299,27	935.663,00	3.226.711,20	-	1.853.854,97
	BBKSDA Jawa Barat	255.170,00	85.409,97	-	-	169.800,00	26.610,52	-	42.499,84	-	-
	BKSDA Jawa Tengah	255.170,00	96.154,75	-	-	159.100,00	78.365,05	-	-	-	-
	BBKSDA Jawa Timur	255.170,00	281.901,53	-	-	-	2.852,66	-	-	-	-
	BKSDA DIY	255.170,00	120.278,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	BKSDA Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,38
	BBKSDA Sulawesi Selatan	333.204,00	297.628,03	502.112,00	480.851,16	502.112,00	607.583,89	502.112,00	637.252,21	502.112,00	513.351,00
	BKSDA Sulawesi Tengah	333.204,00	239.782,98	389.247,00	114.113,87	389.247,00	-	389.247,00	1.558.511,07	389.247,00	436.630,05
	BKSDA Sulawesi Tenggara	333.204,00	-	225.725,00	231.485,16	225.725,00	254.181,16	451.450,00	745.583,47	-	36.562,34
	BKSDA Sulawesi Utara	333.204,00	-	64.510,00	135.142,01	129.019,00	72.526,68	64.510,00	93.235,45	-	555.731,33
	BKSDA Bali	333.204,00	65,66	-	-	-	-	-	104.093,50	-	1.427,17
	BKSDA NTB	333.204,00	681.603,60	3.544,00	3.827,15	-	-	-	-	-	-
	BBKSDA NTT	333.204,00	522,11	185.767,00	241.807,84	-	50.935,90	-	231.998,62	-	-
	BKSDA Maluku	333.204,00	775,86	197.802,00	191.198,20	197.802,00	-	197.802,00	587.288,47	197.802,00	153.909,13
	BBKSDA Papua	333.203,00	6.300,00	1.767.713,00	1.826.488,62	1.767.713,00	2.008.186,98	1.980.899,00	1.308.668,29	1.554.527,00	2.864.441,08
	BBKSDA Papua Barat	-	800,00	508.828,00	524.672,24	508.828,00	559.152,00	508.828,00	-	508.828,00	794.206,24
Jumlah		8.000.000,00	6.663.291,97	10.037.425,00	8.932.059,61	10.328.000,00	8.059.968,27	10.000.000,00	15.611.293,10	5.731.500,00	9.953.269,34

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024
Keterangan :
“-” = Realisasi target telah tercapai pada tahun sebelumnya, namun jika target belum tercapai maka dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Tabel 2.9 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
A	BALAI / BALAI BESAR TN		
1	BBTN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	79
2	BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	76
3	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	80
4	BBTN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango	77
5	BBTN Bromo Tengger Semeru	TN Bromo Tengger Semeru	80
6	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	TN Betung Kerihun	77
		TN Danau Sentarum	82
7	BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu	77
8	BBTN Teluk Cenderawasih	TN Teluk Cenderawasih	82
9	BTN Batang Gadis	TN Batang Gadis	78
10	BTN Siberut	TN Siberut	78
11	BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	73
12	BTN Bukit Dua Belas	TN Bukit Dua Belas	86
13	BTN Bukit Tiga Puluh	TN Bukit Tiga Puluh	76
14	BTN Berbak dan Sembilang	TN Sembilang	73
		TN Berbak	71
15	BTN Way Kambas	TN Way Kambas	77
16	BTN Ujung Kulon	TN Ujung Kulon	70
17	BTN Kepulauan Seribu	TN Kepulauan Seribu	77
18	BTN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	73
19	BTN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	81
20	BTN Gunung Merapi	TN Gunung Merapi	84
21	BTN Gunung Merbabu	TN Gunung Merbabu	84
22	BTN Meru Betiri	TN Meru Betiri	80
23	BTN Baluran	TN Baluran	75
24	BTN Karimun Jawa	TN Karimun Jawa	79
25	BTN Alas Purwo	TN Alas Purwo	85
26	BTN Bali Barat	TN Bali Barat	82
27	BTN Gunung Rinjani	TN Gunung Rinjani	79
28	BTN Komodo	TN Komodo	83
29	BTN Gunung Tambora	TN Gunung Tambora	77
30	BTN Kelimutu	TN Kelimutu	78
31	BTN Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang	70
32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit Raya	81
33	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung	83
34	BTN Sebangau	TN Sebangau	79
35	BTN Kutai	TN Kutai	76
36	BTN Tanjung Puting	TN Tanjung Puting	76
37	BTN Kepulauan Togean	TN Kepulauan Togean	83
38	BTN Bantimurung-Bulusaraung	TN Bantimurung-Bulusaraung	85
39	BTN Bogani Naniwartabone	TN Bogani Nani Wartabone	83
40	BTN Bunaken	TN Bunaken	83
41	BTN Aketajawe Lolobata	TN Aketajawe Lolobata	82
42	BTN Matalawa	TN Manupeu Tanah Daru	82
		TN Laiwangi Wanggameti	81
43	BTN Rawa Aopa Watomohai	TN Rawa Aopa Watomohai	75
44	BTN Taka Bonerate	TN Taka Bonerate	82

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
45	BTN Wakatobi	TN Wakatobi	88
46	BTN Manusela	TN Manusela	81
47	BTN Lorentz	TN Lorentz	68
48	BTN Wasur	TN Wasur	77
B	BALAI / BALAI BESAR KSDA		
1	BBKSDA Riau	CA Bukit Bungkok	61
		CA Pulau Berkey	60
		KSA/KPA Gunung Kijang	23
		KSA/KPA Gunung Lengkuas	28
		KSA/KPA Sungai Pulai	23
		SM Balai Raja	49
		SM Bukit Batu	69
		SM Bukit Rimbang Bukit Baling	67
		SM Giam Siak Kecil	70
		SM Kerumutan	71
		SM PLG Sebang	45
		SM Tasik Belat	73
		SM Tasik Besar (Serkap)	65
		SM Tasik Serkap (Tasik Sarang Burung)	63
		SM Tasik Tanjung Padang	63
		TB Pulau Rempang	38
		TN Zamrud	73
		TWA Buluh Cina	73
		TWA Muka Kuning	68
		TWA Sungai Dumai	63
2	BBKSDA Sumatera Utara	CA Batu Gajah	61
		CA Batu Ginurit	48
		KSA/KPA Lubuk Raya	55
		CA Dolok Saut	70
		CA Dolok Sibual-Buali	75
		CA Dolok Sipirok	73
		CA Dolok Tinggi Raja	74
		CA Aek Liang Balik	47
		CA Martelu Purba	79
		CA Sibolangit	73
		KSA/KPA Sei Ledong	42
		SM Barumon	71
		SM Dolok Surungan	71
		SM Karang Gading Langkat Timur Laut	73
		SM Siranggas	72
		TB Pulau Pini	39
		TWA Deleng Lancuk	59
		TWA Dolok Tinggi Raja	72
		TWA Holiday Resort	60
		TWA Lau Debuk-debuk	63
		TWA Sibolangit	74
		TWA Sicike-cike	76
		TWA Sijaba Hutaginjang	58

Lanjutan Tabel 2.9 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
3	BBKSDA Jawa Barat	CA Bojong Larang Jayanti	64
		CA Cadas Malang	73
		CA Cibanteng	68
		CA Cigenteng Cipanyi	22
		CA Dungus Iwul	51
		CA Gunung Burangrang	82
		CA Gunung Jagat	63
		CA Gunung Papandayan	56
		CA Gunung Simpang	63
		CA Gunung Tangkuban Perahu	74
		CA Gunung Tilu	70
		CA Gunung Tukung Gede	68
		CA Yunghun	64
		CA Kawah Kamojang	67
		CA Leuweung Sancang	69
		CA Nusa Gede Panjalu	72
		CA Pananjung Pangandaran	77
		CA Pulau Dua	60
		CA Rawa Danau	64
		CA Sukawayana	54
		CA Takokak	54
		CA Talaga Bodas	68
		CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	46
		CA Telaga Patengan	70
		CA Telaga Warna	63
		CA Yan Lapa	49
		SM Cikepuh	62
		SM Gunung Sawal	70
		SM Sindangkerta	69
		TB Masigit Kareumbi	59
		TWA Cimanggu	71
		TWA Gunung Papandayan (Kawah Darajat)	57
		TWA Gunung Guntur	62
		TWA Gunung Pancar	71
		TWA Gunung Papandayan	70
		TWA Gunung Tampomas	57
		TWA Jember	63
		TWA Gunung Tangkuban Perahu	77
		TWA Kamojang	63
		TWA Linggarjati	71
		TWA Pananjung Pangandaran	70
		TWA Pulau Sangiang	61
		TWA Sukawayana	64
		TWA Talaga Bodas	57
		TWA Telaga Patengan	54
		TWA Telaga Warna	63

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
4	BBKSDA Jawa Timur	CA Manggis Gadungan	66
		CA Besowo Gadungan	56
		CA Ceding	67
		CA Curah Manis Sempolan I-VIII	63
		CA Gua Ngilirip	67
		CA Gunung Abang	56
		CA Gunung Picis	77
		CA Gunung Sigogor	76
		CA Janggangan Rogojampi I	67
		CA Janggangan Rogojampi II	70
		CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	73
		CA Pancur Ijen I	64
		CA Pancur Ijen II	64
		CA Pulau Bawean	67
		CA Pulau Noko	63
		CA Pulau Nusa	64
		CA Pulau Sempu	82
		CA Saobi	75
		CA Sungai Kolbu Iyang Plateau	73
		CA Watangan Puger	66
		SM Dataran Tinggi Yang	44
		SM Pulau Bawean	72
		SM Pulau Nusa Barung	79
		TWA Gunung Baung	53
		TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	76
		TWA Tretes	53
5	BBKSDA NTT	CA Hutan Bakau Maubesi (RTK. 189)	71
		TN Mutis Timau (nilai dr ex CA)	61
		CA Kemang Boleng I	45
		CA Kemang Boleng II	45
		CA Ndeta Kelikima	38
		CA Riung	36
		CA Wae Wuul	65
		CA Watu Ata	66
		CA Wolo Tado	65
		SM Ale Aisio	69
		SM Danau Tuadale	59
		SM Egon Ile Medo	66
		SM Harlu	70
		SM Kateri (RTK 77)	64
		SM Perhatu	41
		TB Dataran Bena	65
		TB Pulau Ndana	40
		TWA Baumata	73
		TWA Bipolo	54
		TWA Camplong (RTK. 12)	75
		TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	54
		TWA Manipo (RTK. 188)	73

Lanjutan Tabel 2.9 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
	BBKSDA NTT	TWA Pulau Batang	40
		TWA Pulau Lapang (RTK 7)	46
		TWA Pulau Rusa (RTK.8)	48
		TWA Ruteng (RTK. 118)	75
		TWA Teluk Kupang	72
		TWA Tujuh Belas Pulau	70
		TWA Tuti Adagae (RTK.2)	54
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	CA Faruhumpenai	74
		CA Kalaena	76
		CA Ponda-ponda	79
		SM Komara	73
		TB Komara	66
		TN Gandang Dewata	61
		TWA Cani Sirenreng	62
		TWA Danau Mahalona	63
		TWA Danau Matano	68
		TWA Danau Towuti	68
		TWA Lejja	76
		TWA Malino	59
		TWA Nanggala III	71
		TWA Sidrap	60
7	BBKSDA Papua	CA Biak Utara	61
		CA Bupul	62
		CA Enarotali	41
		CA Pegunungan Cycloops	68
		CA Pegunungan Wayland	23
		CA Yapen Tengah	60
		CA Pulau Supiori	60
		CA Tanjung Wiay	60
		KSA/KPA Mapia	30
		SM Danau Bian	67
		TN Memberamo Foja (nilai ex SM)	52
		SM Pegunungan Jayawijaya	30
		SM Pulau Dolok	51
		SM Pulau Komolon	49
		SM Pulau Pombo	57
		SM Savan	52
		TWA Nabire	48
		TWA Supiori	58
		TWA Teluk Youtefa	57
8	BBKSDA Papua Barat	CA Waigeo Timur	74
		CA Waigeo Barat	74
		CA Pualu Misool	61
		CA Pegunungan Arfak	59
		CA Pegunungan Fakfak	69
		CA Pegunungan Tamrau Selatan	63
		CA Pegunungan Tamrau Utara	58
		CA Pegunungan Wondiboy	57
		CA Pulau Salawati Utara	54

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
	BKSDA Papua Barat	CA Teluk Bintuni	60
		CA Pantai Sausafor	54
		CA Pegunungan Kumawa	55
		CA Pulau Batanta Barat	58
		CA Pulau Kofiau	30
		CA Wagura Kote	40
		SM Muhrani - Kaironi	51
		SM Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	57
		SM Pulau Venu	57
		SM Sidei Wibain	61
		TWA Beriat	68
		TWA Gunung Meja	65
		TWA Klamono	65
		TWA Sorong	71
9	BKSDA Aceh	CA Hutan Pinus Janthoi	76
		CA Serbojadi	69
		SM Rawa Singkil	84
		TB Lingga Isaq	73
		TWA Janthoi	77
		TWA Kepulauan Banyak	65
		TWA Kuta Malaka	39
		TWA Pulau Weh	83
10	BKSDA Sumatera Barat	CA Baringin Sati	49
		CA Batang Palupuh	60
		CA Batang Pangean I	62
		CA Batang Pangean II	52
		CA Lembah Anai	68
		CA Lembah Harau	57
		CA Maninjau	58
		CA Rimbo Panti	67
		SM Tarusan Arau Hilir	64
		SM Barisan	70
		SM Malampah Alahan Panjang	70
		SM Pagai Selatan	64
		TWA Air Putih Kelok 9	64
		TWA Gunung Marapi	69
		TWA Gunung Sago Malintang	54
		TWA Lembah Harau	66
		TWA Mega Mendung	55
		TWA Rimbo Panti	69
		TWA Saibi Sarabua	58
		TWA Singgalang Tandikat	71
11	BKSDA Jambi	CA Durian Luncuk I	71
		CA Durian Luncuk II	73
		CA Hutan Bakau Pantai Timur	75
		CA Sungai Batara/Bukit Tambi	56
		CA Gua Ulu Tiangko	73
		KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	35
		KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	49

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
12	BKSDA Bengkulu dan Lampung	CA Air Seblat Reg. 89	71
		CA Bukit Barisan Selatan	52
		CA Danau Dusun Besar	75
		KSA/KPA Danau Menghijau (Reg 56)	59
		CA Pulau Anak Krakatau	77
		CA Kioyo I dan II	69
		CA Muko Muko I Reg. 86	61
		CA Pagar Gunung I	58
		CA Pagar Gunung II	58
		CA Pagar Gunung III	66
		CA Pagar Gunung IV	66
		CA Pagar Gunung V	66
		CA Pasar Ngalam	67
		CA Seluma	67
		CA Pasar Talo	70
		CA Sungai Baheuwo Reg. 97	79
		CA Taba Penanjung I	61
		CA Taba Pananjung II	61
		CA Talang Ulu I	75
		CA Talang Ulu II	75
		CA Tanjung Laksaha Reg 98	74
		CA Teluk Klowe Reg. 96	75
		KSA/KPA Rawa Kandis	39
		TB Gunung Nanu'ua	76
		TB Semidang Bukit Kabu	61
		TWA Air Hitam	74
		TWA Danau Tes	55
		CA Air Rami	67
		TWA Bukit Kaba	78
		TWA Danau Dendam Tak Sudah	67
		TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	45
		TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	66
		TWA Seblat	74
		TWA Way Hawang Reg. 95	53
		TWA Air Alas (ex CA air Alas)	70
13	BKSDA Sumatera Selatan	SM Bentayan	63
		SM Dangku	79
		SM Gumai Pasemah	81
		SM Gunung Raya	64
		SM Isau-isau	80
		SM Padang Sugihan	76
		TN Gunung Maras	51
		TWA Bukit Selero (eks PLG KH Isau-isau)	59
		TWA Gunung Permisan	61
		TWA Jering Menduyung	64
		TWA Punti Kayu	74

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
14	BKSDA Jakarta	CA Pulau Bokor	83
		SM Muara Angke	81
		SM Pulau Rambut	85
		TWA Angke Kapuk	84
15	BKSDA Jawa Tengah	CA Bantarbolang	82
		CA Bekutuk	79
		CA Cabak I/II	79
		CA Curug Bengkawah	77
		CA Donoloyo	79
		CA Gebugan	59
		CA Gunung Butak	80
		CA Gunung Celering	78
		CA Sub Vak 18C/19B	81
		CA Karang Bolong	78
		CA Kecubung Ulo Lanang	72
		CA Keling I ABC	69
		CA Keling II/III	80
		CA Kembang	73
		CA Moga	80
		CA Nusakambangan Barat	75
		CA Nusakambangan Timur	77
		CA Pager Wunung Darupono	76
		CA Pantodomas	82
		CA Peson Subah I	65
		CA Peson Subah II	69
		CA Pringombo I	67
		CA Pringombo II	74
		CA Sepakung	73
		CA Telogo Dringo	78
		CA Telogoranjeng	78
		CA Telogo Sumurup	77
		CA Wijaya Kusuma	76
		SM Gunung Tunggangan	76
		TWA Grojogan Sewu	82
		TWA Guci	81
		TWA Gunung Selok	76
		TWA Sumber Semen	71
		TWA Telogo Warno / Telogo Pengilon	83
16	BKSDA Yogyakarta	CA Batu Gamping	85
		CA Imogiri	82
		SM Paliyan	81
		SM Sermo	77
		TWA Batu Gamping	79
17	BKSDA Bali	CA Batukau	73
		TWA Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	81
		TWA Gunung Batur Bukit Payang	70
		TWA Panelokan	71
		TWA Sangeh (RTK.21)	69

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
18	BKSDA NTB	CA Pulau Sangiang	58
		CA Pedauh	60
		CA Toffo Kota Lambu	56
		KSA/KPA Danuera	12
		KSA/KPA Jereweh	33
		CA Pulau Panjang	63
		TWA Bangko Bangko	52
		TWA Danau Rawa Taliwang	67
		TWA Gunung Tunak	77
		TWA Kerandangan	75
		TWA Madapangga	72
		TWA Pelangan	40
		TWA Semongkat	74
		TWA Suranadi	72
		TWA Tanjung Tamba	49
		TN Moyo Satonda	59
19	BKSDA Kalimantan Barat	CA Gunung Raya Pasi	71
		CA Karimata	70
		CA Lo Pat Foen Pi	69
		CA Mandor	69
		CA Muara Kendawangan	65
		CA Nyiut Penrissen	75
		TWA Asuansang	67
		TWA Baning	65
		TWA Bukit Kelam	76
		TWA Gunung Dungan / Gunung Batu	55
		TWA Gunung Melintang	57
		TWA Sungai Liku	67
		TWA Tanjung Belimbing	76
20	BKSDA Kalimantan Selatan	CA Gunung Kentawan	72
		CA Sungai Bulan dan Sungai Lulan	62
		CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	71
		CA Teluk Pamukan	69
		SM Asam-asam	35
		SM Kuala Lupak	71
		SM Pelaihari I dan Pelaihari II	74
		SM Pulau Kaget	75
		TWA Pleihari	61
		TWA Pulau Bakut	79
		TWA Pulau Burung dan Suwangi	67
		TWA Pulau Kembang	71
21	BKSDA Kalimantan Tengah	CA Bukit Sapat Hawung	61
		CA Bukit Tangkiling	67
		CA Pararawen I dan II	67
		KSA/KPA Sungai Kapuas	46
		KSA/KPA Tanjung Malatayur	20
		SM Lamandau	64
		TWA Bukit Tangkiling	66

Lanjutan Tabel 2.9

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
	BKSDA Kalimantan Tengah	TWA Tanjung Keluang	64
		KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	33
		KSA/KPA Ex PLG IV	25
		KSA/KPA Sungai Barito	35
22	BKSDA Kalimantan Timur	CA Muara Kaman Sedulang	72
		CA Padang Luwai	70
		CA Teluk Adang	68
		CA Teluk Apar	66
		SM Pulau Semama	79
		TWA Pulau Sangalaki	80
23	BKSDA Sulawesi Tenggara	CA Kakenauwe	74
		CA Lamedae	78
		CA Napabalano	72
		SM Buton Utara	74
		SM Lambusango	78
		SM Tanjung Amolengo	72
		SM Tanjung Batikolo	72
		SM Tanjung Peropa	74
		TWA Kepulauan Padamarang	77
		TWA Mangolo	70
		TWA Teluk Lasolo	79
		TWA Tirta Rimba / Air Jatuh	76
24	BKSDA Sulawesi Tengah	CA Gunung Dako	85
		CA Gunung Sojol	65
		CA Gunung Tinombala	67
		CA Morowali	74
		CA Pamona	65
		CA Pangi Binangga	59
		CA Tanjung Api	68
		SM Bakiriang	71
		SM Lombuyan	74
		CA Pati-Pati	61
		SM Pinjan/Tanjung Matop	73
		SM Pulau Dolangan	71
		SM Tanjung Santigi	62
		TB Landusa Tomata	60
		TWA Bancea	68
		SM Pulau Pasoso	74
		TWA Pulau Tokobae	65
		TWA Wera	61
25	BKSDA Sulawesi Utara	CA Gunung Ambang	53
		CA Gunung Dua Sudara	67
		CA Gunung Lokon	63
		CA Mas Popaya Raja	57
		CA Panua	73
		CA Tangale	65
		CA Tanjung Panjang	61
		SM Nantu	70

Lanjutan Tabel 2.9 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
	BKSDA Sulawesi Utara	SM Gunung Manembo-nembo	63
		SM Karakelang	71
		TWA Batu Angus	68
		TWA Batu Putih	62
		TWA Gunung Ambang	67
26	BKSDA Maluku	CA Bekau Huhun	34
		CA Gunung Api Kisar	40
		CA Gunung Sibela Pulau Bacan	60
		CA Lifamatola	39
		CA Pulau Angwarmase	72
		CA Pulau Nustaram	59
		CA Pulau Nuswotar	56
		CA Pulau Obi	38
		CA Pulau Sehu	43
		CA Taliabu	36
		KSA/KPA Tanjung Sial	54
		KSA/KPA Tobalai	39
		KSA/KPA Daab	46
		SM Danau Tihu	52
		KSA/KPA Gunung Sahuwai	59
		KSA/KPA Pulau Larat	43
		KSA/KPA Sungai Niff	51
		KSA/KPA Tafermaar	53
		KSA/KPA Masbait	72
		SM Pulau Baun	56
		SM Pulau Kasa	70
		SM Pulau Kobror	65
		SM Pulau Manuk	37
		SM Tanimbar	69
		TWA Gunung Api Banda	76
		TWA Pulau Kasa	65
		TWA Pulau Marsegu	80
		TWA Pulau Pombo	70
C	UPTD TAHURA		
1	Dinas LHK Kota Subulussalam	TAHURA Lae Kombih	59
2	UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan	TAHURA Pocut Meurah Intan	65
3	Dinas LH Kab. Simelue	TAHURA Simeulue	33
4	UPTD Tahura Tuanku Tambusai, Dinas LH Kab Rohul	TAHURA Tuanku Tambusai	51
5	UPTD Tahura Bukit Barisan, Dinas LHK Prov. Sumut	TAHURA Bukit Barisan	73
6	UPTD KPHP Minas Tahura Sultan Syarif Hasyim, Dishut Prov. Riau	TAHURA Sultan Syarif Hasyim	60
7	Dinas Pertanian Kota Padang	TAHURA Dr. Muhammad Hatta	52
8	UPTD Tahura Bukit Sari, Dishut Prov. Jambi	TAHURA Bukit Sari	65
9	UPTD Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam), Dishut Prov. Jambi	TAHURA Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	65
10	Dinas LH Kab. Batanghari	TAHURA Sultan Thaha Syaifuddin	63
11	Dinas LH Kab. Bengkulu Selatan	TAHURA Bukit Rabang - Gluguran	57

Lanjutan Tabel 2.9 Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	UPT/UPTD	Nama Kawasan	Baseline 2024
1	2	4	5
12	UPTD Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat), Dinas LHK Kab Bengkulu Tengah	TAHURA Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	27
13	UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rahman, Dishut Prov. Lampung	TAHURA Wan Abdul Rahman	78
14	Dinas LH Kab Belitung	TAHURA Gunung Lalang	17
15	Dinas LH Kab. Bangka Tengah	TAHURA Gunung Mangkol	66
16	Dinas LH Kab. Bangka	TAHURA Gunung Menumbing	56
17	UPTD Tahura Banten, Dinas LHK Prov. Banten	TAHURA Banten	66
18	Dinas LHK Kab Sumedang	TAHURA Gunung Palasari - Gunung Kunci	65
19	UPTD Tahura Ir. H. Juanda, Dishut Prov. Jabar	TAHURA Ir. H. Juanda	71
20	UPTD Tahura Kota Depok	TAHURA Pancoran Mas	74
21	UPTD Tahura KGPAA Mangkunegoro I (Ngargoyoso), Dishut Prov Jateng	TAHURA KGPAA Mangkunegoro I	73
22	UPTD Tahura Gunung Bunder, Dinas LHK Prov. Yogyakarta	TAHURA Gunung Bunder	66
23	UPTD Balai Tahura R. Soeryo, Dishut Prov. Jatim	TAHURA R. Soeryo	86
24	UPTD Balai Tahura Ngurah Rai, Dishut Prov. Bali	TAHURA Ngurah Rai	78
25	UPTD Tahura Nuraksa, Dishut Prov NTB	TAHURA Nuraksa	68
26	Dinas LH dan Kebersihan Kab. Kupang	TAHURA Prof. Ir. Herman Johannes	37
27	UPTD Tahura Sultan Adam, Dishut Prov. Kalsel	TAHURA Sultan Adam	83
28	Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kab. Gunung Mas	TAHURA Lapak Jaru	73
29	UPTD Tahura Bukit Soeharto, Dishut Prov. Kaltim	TAHURA Bukit Soeharto	75
30	Dinas LH Kab. Paser	TAHURA Lati Petangis	77
31	UPTD Balai Tahura Murhum, Dishut Prov. Sultra	TAHURA Nipa-Nipa	61
32	Dinas LHK Kab. Sinjai	TAHURA Abdul Latief/Sinjai	72
33	UPTD Tahura Bontobahari, Dinas LHK Kab. Bulukumba	TAHURA Bontobahari	51
34	UPTD Tahura Sulteng, Dishut Prov. Sulteng	TAHURA Sulteng	61
35	UPTD Tahura Gunung Tumpa (Haveworang)	TAHURA Gunung Tumpa (Haveworang)	79
36	Dinas LH Kab. Kotabaru	TAHURA Sebatung	60
37	UPTD KPH Wil Landak, Dinas LHK Prov Kalbar	TAHURA Pandan Puloh	46
38	Dinas LH Kab. Gowa	TAHURA Malino	29
39	Dinas LH Kab. Soppeng	TAHURA Datu Mario	26
40	Dinas LH Kab Tana Toraja	TAHURA Buntu Karua	28

Sumber: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, 31 Desember 2024

- Keterangan :
- CA = Cagar Alam;
 - KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam;
 - SM = Suaka Margasatwa,
 - Tahura = Taman Hutan Raya,
 - TB = Taman Buru,
 - TN = Taman Nasional,
 - TWA = Taman Wisata Alam

Tabel 2.10 Jumlah Tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan	
		MPA (Orang)	Jumlah Regu
1	2	3	4
1	Balai Besar KSDA Jawa Barat	-	-
2	Balai Besar KSDA Jawa Timur	340	14
3	Balai Besar KSDA NTT	30	1
4	Balai Besar KSDA Papua	135	9
5	Balai Besar KSDA Papua Barat	-	-
6	Balai Besar KSDA Riau	-	-
7	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	-	-
8	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	-	-
9	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	330	3
10	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	124	9
11	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan*	-	-
12	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	-	-
13	Balai Besar TN Gunung Leuser	-	-
14	Balai Besar TN Kerinci Seblat*	-	-
15	Balai Besar TN Lore Lindu	90	-
16	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	-	-
17	Balai KSDA Aceh	-	-
18	Balai KSDA Bali*	79	2
19	Balai KSDA Bengkulu	120	2
20	Balai KSDA Jakarta	15	1
21	Balai KSDA Jambi	-	-
22	Balai KSDA Jawa Tengah	-	-
23	Balai KSDA Kalimantan Barat	-	3
24	Balai KSDA Kalimantan Selatan	-	-
25	Balai KSDA Kalimantan Tengah	-	-
26	Balai KSDA Kalimantan Timur	-	-
27	Balai KSDA Maluku	-	-
28	Balai KSDA NTB	-	-
29	Balai KSDA Sulawesi Tengah	-	-
30	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	60	-
31	Balai KSDA Sulawesi Utara	60	1
32	Balai KSDA Sumatera Barat	-	-
33	Balai KSDA Sumatera Selatan	-	-
34	Balai KSDA Yogyakarta	90	3
35	Balai TN Aketajawe Lolobata*	-	-
36	Balai TN Alas Purwo	30	1
37	Balai TN Bali Barat	-	-
38	Balai TN Baluran	-	-
39	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	-	2
40	Balai TN Batang Gadis	-	-
41	Balai TN Berbak Sembilang	287	12
42	Balai TN Bogani Nani Wartabone	-	-

Lanjutan Tabel 2.10 Jumlah Tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Tenaga Pengendalian Kebakaran Hutan	
		MPA (Orang)	Jumlah Regu
1	2	3	4
43	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	200	5
44	Balai TN Bukit Duabelas*	36	1
45	Balai TN Bukit Tigapuluh	30	1
46	Balai TN Bunaken	-	-
47	Balai TN Gunung Ciremai	153	-
48	Balai TN Gunung Halimun Salak	-	-
49	Balai TN Gunung Merapi	195	7
50	Balai TN Gunung Merbabu	-	-
51	Balai TN Gunung Palung	35	1
52	Balai TN Gunung Rinjani	-	-
53	Balai TN Karimunjawa	-	-
54	Balai TN Kayan Mentarang	10	-
55	Balai TN Kelimutu	-	-
56	Balai TN Kepulauan Seribu	-	-
57	Balai TN Kepulauan Togean	-	-
58	Balai TN Komodo*	90	3
59	Balai TN Kutai	-	-
60	Balai TN Lorentz*	-	-
61	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	85	4
62	Balai TN Manusela	16	-
63	Balai TN Meru Betiri	-	-
64	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	30	1
65	Balai TN Sebangau	-	-
66	Balai TN Siberut	-	-
67	Balai TN Taka Bonerate	-	-
68	Balai TN Tambora*	33	3
69	Balai TN Tanjung Puting*	-	-
70	Balai TN Tesso Nilo	-	-
71	Balai TN Ujung Kulon	-	-
72	Balai TN Wakatobi	-	-
73	Balai TN Wasur	94	6
74	Balai TN Way Kambas	-	-
Jumlah		2.797	95

Sumber: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, 31 Desember 2024

Keterangan:
• KSDA = Konservasi Sumber Daya Ekosistem; TN = Taman Nasional; MPA = Masyarakat Peduli Api
• - = Tidak ada tenaga pengendali kebakaran hutan

Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Pengendalian Kebakaran Tahun 2020 - 2024

No	Satuan Kerja	MPA					Regu				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Balai Besar KSDA Jawa Barat	223	214	214	262	-	-	-	-	14	-
2	Balai Besar KSDA Jawa Timur	340	340	340	340	340	14	14	14	14	14
3	Balai Besar KSDA NTT	-	-	30	30	30	-	-	-	-	1
4	Balai Besar KSDA Papua	15	108	10	20	135	3	-	-	2	9
5	Balai Besar KSDA Papua Barat	95	95	10	95	-	-	-	-	-	-
6	Balai Besar KSDA Riau	-	-	45	60	-	-	-	2	-	-
7	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	104	104	104	104	-	9	9	9	9	-
8	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	311	311	116	-	330	3	3	3	3	3
10	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	124	124	76	126	124	-	-	-	-	9
11	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-
12	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	-	48	55	55	-	-	7	-	-	-
13	Balai Besar TN Gunung Leuser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Balai Besar TN Kerinci Seblat	150	-	79	79	-	-	-	-	-	-
15	Balai Besar TN Lore Lindu	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-
16	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Balai KSDA Aceh	24	24	24	24	-	3	3	3	3	-
18	Balai KSDA Bali	120	-	79	79	79	1	-	4	4	2
19	Balai KSDA Bengkulu	120	120	120	120	120	2	2	2	2	2
20	Balai KSDA Jakarta	-	-	-	-	15	-	-	-	-	1
21	Balai KSDA Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Balai KSDA Jawa Tengah	196	166	166	166	-	-	6	17	-	-
23	Balai KSDA Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
24	Balai KSDA Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Balai KSDA Kalimantan Tengah	-	71	42	71	-	-	-	2	-	-
26	Balai KSDA Kalimantan Timur	105	-	-	-	-	4	-	-	-	-
27	Balai KSDA Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Balai KSDA NTB	75	75	-	75	-	-	-	-	-	-
29	Balai KSDA Sulawesi Tengah	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-
31	Balai KSDA Sulawesi Utara	60	60	60	60	60	-	-	-	-	1
32	Balai KSDA Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Balai KSDA Sumatera Selatan	270	338	338	338	-	-	7	7	7	-
34	Balai KSDA Yogyakarta	90	90	91	91	90	3	3	3	3	3
35	Balai TN Aketajawe Lolobata	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Balai TN Alas Purwo	22	20	19	20	30	1	20	2	20	1
37	Balai TN Bali Barat	20	20	20	-	-	2	2	2	-	-
38	Balai TN Baluran	30	30	30	30	-	6	6	6	6	-
39	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
40	Balai TN Batang Gadis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Balai TN Berbak Sembilang	-	-	-	-	287	2	2	2	2	12
42	Balai TN Bogani Nani Wartabone	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Pengendalian Kebakaran Tahun 2020 - 2024

No	Satuan Kerja	MPA					Regu				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	160	160	160	200	200	2	2	2	5	5
44	Balai TN Bukit Duabelas	32	32	32	32	36	2	2	2	2	1
45	Balai TN Bukit Tigapuluh	30	30	-	30	30	-	-	-	-	1
46	Balai TN Bunaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Balai TN Gunung Ciremai	240	200	153	153	153	-	-	-	-	-
48	Balai TN Gunung Halimun Salak	151	53	56	56	-	17	1	17	17	-
49	Balai TN Gunung Merapi	195	195	195	195	195	7	7	7	7	7
50	Balai TN Gunung Merbabu	191	191	191	191	-	2	2	2	2	-
51	Balai TN Gunung Palung	-	-	-	-	35	-	-	-	-	1
52	Balai TN Gunung Rinjani	105	105	135	135	-	4	-	75	-	-
53	Balai TN Karimunjawa	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-
54	Balai TN Kayan Mentarang	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-
55	Balai TN Kelimutu	30	30	30	30	-	2	2	2	2	-
56	Balai TN Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Balai TN Kepulauan Togean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Balai TN Komodo	90	40	90	90	90	-	-	-	-	3
59	Balai TN Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Balai TN Lorentz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	85	85	85	85	85	4	4	4	4	4
62	Balai TN Manusela	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-
63	Balai TN Meru Betiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	45	45	-	-	30	1	1	1	1	1
65	Balai TN Sebangau	75	75	102	102	-	2	2	2	2	-
66	Balai TN Siberut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Balai TN Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Balai TN Tambora	90	90	45	45	33	2	2	3	3	3
69	Balai TN Tanjung Puting	-	-	45	45	-	-	-	3	3	-
70	Balai TN Tesso Nilo	92	92	92	92	-	1	1	1	1	-
71	Balai TN Ujung Kulon	30	30	30	30	-	2	2	2	2	-
72	Balai TN Wakatobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Balai TN Wasur	-	-	-	-	94	15	15	15	15	6
74	Balai TN Way Kambas	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-
Jumlah		4.410	4.047	3.735	3.952	2.797	123	134	222	161	95

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024

Keterangan :
- = Data tidak ada/tersedia

Tabel 2.12 Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan di Kawasan Konservasi Berdasarkan Titik Tertinggi s.d. Tahun 2024

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan	Titik Tertinggi di Kawasan (MDPL)	Klasifikasi Ekosistem
1	2	3	4	5
1	Cagar Alam	CA Barisan	1.345	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Batang Palupuh	1.068	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Batang Pangean II	1.869	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Batukau	2.064	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Bekau Huhun	1.344	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Bukit Sapat Hawung	1.776	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Cadas Malang	1.007	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Cigenteng Cipanyi	1.690	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Dolok Saut	1.784	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Dolok Sibual Buali	1.774	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Dudasudara	1.033	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Enarotali	4.083	Ekosistem Alpin
		CA Faruhumpenai	1.792	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Ambang	1.697	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Burangrang	2.049	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Dako	2.252	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Papandayan	2.569	Ekosistem Sub Alpin
		CA Gunung Picis	1.395	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Gunung Sibela Pulau Bacan	2.088	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Sigogor	1.623	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Simpang	1.779	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Sojol	2.876	Ekosistem Sub Alpin
		CA Gunung Tangkuban Parahu	2.082	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Tilu	2.172	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Gunung Tinombala	2.410	Ekosistem Sub Alpin
		CA Jantho	1.852	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	2.285	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Kawah Kamojang	2.242	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Maninjau	1.728	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Martelu Purba	1.371	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Morowali	2.415	Ekosistem Sub Alpin
		CA Nyiut Penrissen	1.675	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Pamona	1.810	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Pancur Ijen II	1.002	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Panua	1.661	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Pegunungan Arfak	2.915	Ekosistem Sub Alpin
		CA Pegunungan Cycloops	1.987	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Pegunungan Fakfak	1.327	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Pegunungan Kumawa	1.672	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Pegunungan Tamrau Selatan	2.713	Ekosistem Sub Alpin
		CA Pegunungan Tamrau Utara	2.489	Ekosistem Sub Alpin

Lanjutan Tabel 2.12

 Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan di Kawasan
 Konservasi Berdasarkan Titik Tertinggi s.d. Tahun 2024

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan	Titik Tertinggi di Kawasan (MDPL)	Klasifikasi Ekosistem
1	2	3	4	5
	Cagar Alam	CA Pegunungan Wayland	3.735	Ekosistem Sub Alpin
		CA Pegunungan Wondiboy	2.186	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Pegunungan Yapen Tengah	1.458	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Pulau Obi	1.164	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Pulau Sangiang (RTK.86)	1.899	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Sepakung	1.599	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Sungai Kolbu Iyang Plateau	2.293	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Takokak	1.288	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Talaga Patengan	1.833	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Taliabu	1.297	Ekosistem Pegunungan Bawah
		CA Telaga Bodas	1.883	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Telaga Warna	1.874	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Telogo Dringo	2.077	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Telogo Sumurup	2.188	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Tlogoranjeng	1.549	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Watu Ata	1.856	Ekosistem Pegunungan Atas
		CA Yunghun	1.293	Ekosistem Pegunungan Bawah
2	KSA / KPA	KSA/KPA Kunyi	1.446	Ekosistem Pegunungan Bawah
		KSA/KPA Lubuk Raya	1.878	Ekosistem Pegunungan Atas
		KSA/KPA Masbait	1.395	Ekosistem Pegunungan Bawah
3	Suaka Margasatwa	SM Barisan	1.826	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Barumun	1.996	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Bukit Rimbang Bukit Baling	1.207	Ekosistem Pegunungan Bawah
		SM Dataran Tinggi Yang	3.073	Ekosistem Sub Alpin
		SM Dolok Surungan	2.134	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Egon Ile Medo (RTK. 140)	1.383	Ekosistem Pegunungan Bawah
		SM Gumai Pasemah	1.711	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Gunung Raya	2.155	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Gunung Sawal	1.739	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Isau isau	1.434	Ekosistem Pegunungan Bawah
		SM Malampah Alahan Panjang	2.754	Ekosistem Sub Alpin
		SM Nantu	2.067	Ekosistem Pegunungan Atas
		SM Pegunungan Jayawijaya	4.737	Ekosistem Alpin
		SM Rimbang Baling	1.240	Ekosistem Pegunungan Bawah
		SM Tarusan Arau Hilir	2.089	Ekosistem Pegunungan Atas
4	Taman Hutan Raya	Tahura Abdul Latief (Sinjai)	2.124	Ekosistem Pegunungan Atas
		Tahura Bukit Barisan	2.430	Ekosistem Sub Alpin
		Tahura Buntu Karua	2.761	Ekosistem Sub Alpin

Lanjutan Tabel 2.12 Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan di Kawasan Konservasi Berdasarkan Titik Tertinggi s.d. Tahun 2024

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan	Titik Tertinggi di Kawasan (MDPL)	Klasifikasi Ekosistem
1	2	3	4	5
	Taman Hutan Raya	Tahura Cut Nyak Dhien	1.798	Ekosistem Pegunungan Atas
		Tahura Datu Mario	1.435	Ekosistem Pegunungan Bawah
		Tahura DR. Mohammad Hatta	1.000	Ekosistem Pegunungan Bawah
		Tahura Ir. H. Djuanda	1.445	Ekosistem Pegunungan Bawah
		Tahura KGPAA Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	3.172	Ekosistem Sub Alpin
		Tahura Malino	1.076	Ekosistem Pegunungan Bawah
		Tahura R. Soeryo	3.323	Ekosistem Sub Alpin
		Tahura Sulawesi Tengah	1.094	Ekosistem Pegunungan Bawah
		Tahura Sultan Adam	1.280	Ekosistem Pegunungan Bawah
		Tahura Wan Abdul Rahman	1.671	Ekosistem Pegunungan Atas
5	Taman Buru	TB Lingga Isaq	2.821	Ekosistem Sub Alpin
		TB Masigit Kareumbi	1.713	Ekosistem Pegunungan Atas
6	Taman Nasional	TN Aketajawe Lolobata	1.175	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TN Bantimurung Bulusaraung	1.643	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Batang Gadis	2.141	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Betung Kerihun	1.932	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Bogani Nani Wartabone	1.952	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Bromo Tengger Semeru	3.669	Ekosistem Sub Alpin
		TN Bukit Baka Bukit Raya	2.300	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Bukit Barisan Selatan	2.076	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Gandang Dewata	3.067	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Ciremai	3.059	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Gede Pangrango	3.016	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Halimun Salak	2.200	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Gunung Leuser	3.455	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Merapi	2.918	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Merbabu	3.126	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Mutis	2.405	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Rinjani	3.683	Ekosistem Sub Alpin
		TN Gunung Tambora	2.705	Ekosistem Sub Alpin
		TN Kayan Mentarang	2.160	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Kelimutu	1.710	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Kerinci Seblat	3.782	Ekosistem Sub Alpin
		TN Laiwangi Wanggameti	1.195	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TN Lore Lindu	2.427	Ekosistem Sub Alpin
		TN Lorentz	4.820	Ekosistem Alpin
		TN Memberamo Foja	2.227	Ekosistem Pegunungan Atas
		TN Manusela	3.029	Ekosistem Sub Alpin
		TN Meru Betiri	1.202	Ekosistem Pegunungan Bawah

Lanjutan Tabel 2.12

 Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan di Kawasan
 Konservasi Berdasarkan Titik Tertinggi s.d. Tahun 2024

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan	Titik Tertinggi di Kawasan (MDPL)	Klasifikasi Ekosistem
1	2	3	4	5
7	Taman Wisata Alam	TWA Air Putih Kelok 9	1.172	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Bukit Kaba	1.955	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Cimanggu	2.160	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Danau Buyan Danau Tamblingan	2.106	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Danau Matano	1.346	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Danau Tes	1.285	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Deleng Lancuk	1.623	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Grojogan Sewu	1.250	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Guci	1.233	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Gunung Ambang	1.786	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Gunung Batur Bukit Payang	1.699	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Gunung Guntur	1.983	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Gunung Marapi	2.929	Ekosistem Sub Alpin
		TWA Gunung Papandayan	2.500	Ekosistem Sub Alpin
		TWA Gunung Papandayan (Kawah Darajat)	2.605	Ekosistem Sub Alpin
		TWA Gunung Sago Malintang	2.253	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Gunung Tampomas	1.682	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Gunung Tangkuban Parahu	2.087	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Jember	1.549	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	2.384	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Kawah Kamojang	1.926	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Lau Debuk Debuk	1.311	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Malino	2.859	Ekosistem Sub Alpin
		TWA Nanggala III	1.257	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Panelokan	1.367	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Ruteng (RTK. 118)	2.360	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Sicike Cike	1.470	Ekosistem Pegunungan Bawah
		TWA Sijaba Hutaginjang	1.609	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Singgalang Tandikat	2.864	Ekosistem Sub Alpin
		TWA Telaga Bodas	1.760	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Telaga Patengan	1.637	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Telaga Warna	1.539	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Telogo Warno / Telogo Pengilon	2.143	Ekosistem Pegunungan Atas
		TWA Tuti Adagae (RTK. 2)	1.153	Ekosistem Pegunungan Bawah

Keterangan :

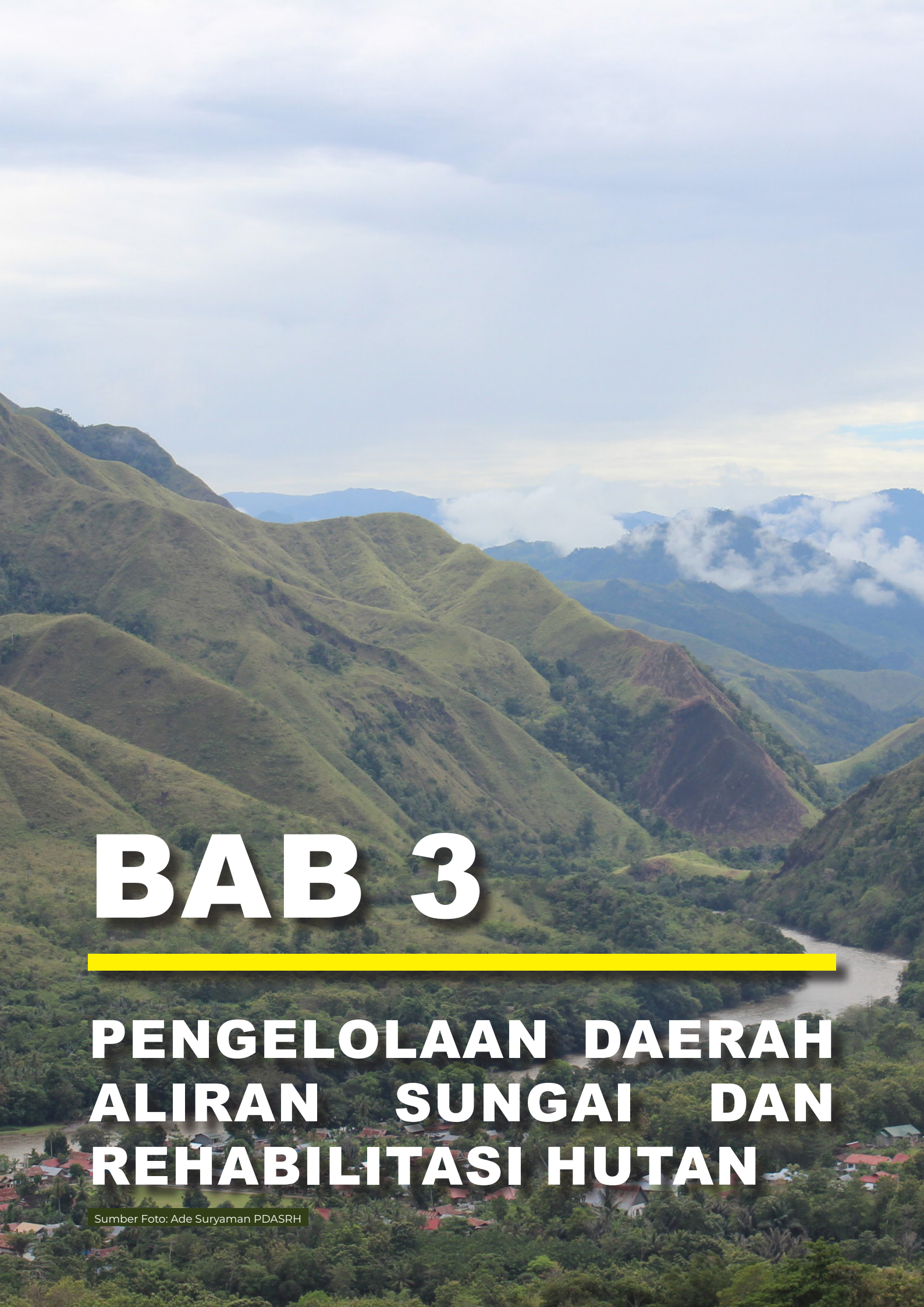
Sumber data diperoleh dari =

- Data DEM SRTM GL1 (Global 1 Arc-Second) - NASA SRTM dan Batas Kawasan Register 117/2024 Direktorat Perencanaan Konservasi yang diolah dengan Google Earth Engine.
- Shapefile klasifikasi pegunungan Kapos et al (2000) yang diunduh melalui Arcgis Online, data rasteryang tersedia Sayre, R., 2023, Global Mountains K3: U.S. Geological Survey data release.
- Klasifikasi tipe ekosistem berdasarkan tipe kelas ekosistem yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Konservasi.

Tabel 2.13 Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Kunjungan	Asal Pengunjung	Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penelitian dan Pengembangan	Dalam Negeri	1.503	3.708	5.762	4.596	4.261
		Luar Negeri	23	12	25	34	69
2	Pendidikan	Dalam Negeri	8.579	5.149	16.002	16.141	18.450
		Luar Negeri	22	1	24	86	145
3	Wisata	Dalam Negeri	3.171.689	2.871.420	4.932.951	5.431.816	5.759.320
		Luar Negeri	45.370	9.973	189.671	527.363	626.646
4	Snapshot Film Komersil	Dalam Negeri	193	409	452	1.152	1.121
		Luar Negeri	5	3	59	179	110
5	Lain-lain	Dalam Negeri	5.429	57.274	152.248	75.304	179.909
		Luar Negeri	1.267	22	210	380	954
Jumlah		Dalam Negeri	3.187.393	2.937.960	5.107.415	5.529.009	5.963.061
		Luar Negeri	46.687	10.011	189.989	528.042	627.924
		Dalam Negeri + Luar Negeri	3.234.080	2.947.971	5.297.404	6.057.051	6.590.985

Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2024

The background image is a high-angle landscape photograph. It shows a series of rolling hills with a mix of green grass and brownish soil, suggesting a semi-arid or recently deforested area. A river flows through a lush green valley in the lower right. In the distance, more hills are visible, some partially obscured by low-hanging clouds or mist. The sky is filled with soft, white and grey clouds.

BAB 3

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

Sumber Foto: Ade Suryaman PDASRH

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) merupakan unit kerja di Kementerian Kehutanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi ekologis hutan dan lahan melalui upaya konservasi tanah dan air, rehabilitasi kawasan, serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu. Tugas pokok Ditjen PDASRH mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan, rehabilitasi mangrove, konservasi lahan, dan pengelolaan DAS lintas wilayah.

226 UNIT

JUMLAH SUMUR RESAPAN
AIR TAHUN 2024

255 UNIT

JUMLAH INSTALASI PEMANENAN
AIR HUJAN/IPAH TAHUN 2024

196 UNIT

JUMLAH BANGUNAN DAM
PENAHAN TAHUN 2024

1.472 UNIT

JUMLAH PENGENDALI
JURANG

217.974,42 HA

LUAS REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN TAHUN 2024

3.808.377 BATANG

JUMLAH PENYEDIAAN BIBIT
PRODUKTIF TAHUN 2024

21.513.610 BATANG

JUMLAH PENYEDIAAN BIBIT
PERSEMAIAN PERMANENT TAHUN 2024

17.306.579 BATANG

JUMLAH PENYEDIAAN BIBIT PUSAT
PERSEMAIAN (SKALA BESAR) TAHUN 2024

Tabel 3.1 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	1.670,92	5.218,18	4.344,00	3.874,70	3.233,20
2	Sumatera Utara	4.250,00	12.553,14	20.802,20	10.370,00	9.061,58
3	Sumatera Barat	7.325,57	11.255,76	8.268,50	4.842,00	3.794,63
4	Riau	3.574,50	10.509,71	5.238,00	1.570,00	3.161,94
5	Jambi	653,63	1.834,81	3.587,00	3.469,85	2.587,39
6	Sumatera Selatan	4.423,38	8.071,48	14.289,10	7.504,47	10.531,60
7	Bengkulu	2.227,28	3.270,01	5.238,00	3.524,35	3.009,85
8	Lampung	1.147,27	5.215,70	12.067,00	6.462,00	7.921,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.746,20	5.506,28	2.916,00	1.586,00	2.246,17
10	Kepulauan Riau	1.524,79	4.283,31	2.301,00	2.438,00	1.133,52
11	DKI Jakarta	20,05	-	-	808,10	76,00
12	Jawa Barat	9.034,86	11.220,53	39.705,35	17.462,00	18.457,32
13	Jawa Tengah	13.231,97	8.409,50	11.571,00	16.081,95	12.778,44
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.586,52	372,87	3.028,00	2.594,00	2.836,37
15	Jawa Timur	4.864,70	10.824,31	9.129,00	7.923,90	9.941,06
16	Banten	212,22	1.695,05	904,00	1.193,50	887,00
17	Bali	2.741,61	3.457,07	2.833,00	2.173,00	1.299,61
18	Nusa Tenggara Barat	3.173,61	4.110,63	13.001,40	5.205,40	8.269,70
19	Nusa Tenggara Timur	681,00	5.058,63	15.611,00	5.139,50	8.471,36
20	Kalimantan Barat	1.929,59	4.366,88	5.300,00	13.994,00	3.153,11
21	Kalimantan Tengah	4.058,92	3.756,84	6.285,66	6.928,33	7.447,03
22	Kalimantan Selatan	6.855,12	4.092,55	7.615,10	7.424,80	8.533,64
23	Kalimantan Timur	12.240,64	21.605,06	19.726,90	18.726,84	30.838,09
24	Kalimantan Utara	-	1.032,00	608,00	36,60	8.244,56
25	Sulawesi Utara	1.637,84	2.439,23	6.898,20	5.762,30	4.482,80
26	Sulawesi Tengah	1.980,25	5.929,76	5.037,68	4.359,23	6.043,27
27	Sulawesi Selatan	3.880,15	7.981,40	13.301,00	9.489,87	17.725,88
28	Sulawesi Tenggara	1.621,20	6.805,38	3.531,75	3.386,00	3.395,40
29	Gorontalo	2.557,79	4.140,26	4.933,50	4.425,00	2.140,09
30	Sulawesi Barat	1.823,43	2.018,76	4.269,00	3.246,39	576,00
31	Maluku	964,37	2.769,54	3.949,00	2.401,00	4.341,14
32	Maluku Utara	1.917,41	2.860,03	3.615,80	4.101,79	5.922,57
33	Papua	701,00	3.418,27	3.319,00	4.481,22	2.742,67
34	Papua Barat	1.716,30	2.553,00	1.670,00	2.420,50	757,75
35	Papua Selatan	-	-	-	-	1.162,50
36	Papua Tengah	-	-	360,00	-	106,00
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	100,00
38	Papua Barat Daya	-	-	-	26,00	563,60
Jumlah		112.974,09	188.635,93	265.254,14	195.432,59	217.974,42

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 31 Desember 2024

Keterangan:

- = Data tidak tersedia/ada
- 2024: DAS Prioritas, Mangrove, Mangrove BRGM, RHL IKN, FPIV, Agroforestry FPIV, Rehabilitasi DAS, Reklamasi, Penanaman KBR, bibit PP, bibit Persemaian Skala Besar, bibit produktif, Penanaman serentak, UPSA, Penanaman DBH DR, DBH DR Sawit, CSR, DAK Hutan Rakyat, FOLU Net Sink dan Mewlafor.
- 2023: DAS Prioritas, Mangrove, Mangrove BRGM, Mangrove KKP, RHL IKN, FPIV, Agroforestry FPIV, Rehabilitasi DAS, Rehabilitasi DAS Mangrove, Reklamasi, Penanaman KBR, bibit PP, bibit Persemaian Skala Besar, bibit produktif, Penanaman serentak, UPSA, Mangrove TJSL, Mangrove Pemda, Mangrove bersama TNI, PBRP, PES, CSR, dan DAK Hutan Rakyat
- 2022: DAS Prioritas, Mangrove, Rehabilitasi DAS, Reklamasi, Penanaman KBR, bibit PP, bibit produktif, dan KBD
- 2021: DAS Prioritas, Rehabilitasi DAS, Reklamasi, Penanaman KBR, bibit PP, bibit Produktif dan KBDRHL Mangrove sumber dana APBN dan PKPM
- 2020: Rehabilitasi DAS, Mangrove, PKPM, reklamasi, Penanaman KBR, bibit PP, bibit produktif, dan KBD

Tabel 3.2 Luas Rehabilitasi Hutan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Rehabilitasi Hutan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	2.010,00	889,00	405,00	250,00
2	Sumatera Utara	60,00	3.017,00	3.090,20	727,00	723,00
3	Sumatera Barat	-	2.152,00	2.072,50	650,00	725,00
4	Riau	500,00	1.348,00	-	100,00	221,16
5	Jambi	-	1.100,00	1.098,00	475,00	401,82
6	Sumatera Selatan	1.318,49	3.472,42	3.789,10	667,47	598,60
7	Bengkulu	-	2.000,00	1.000,00	711,05	1.909,70
8	Lampung	4,27	2.556,70	1.600,00	833,00	919,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,77	840,00	490,00	320,00	618,70
10	Kepulauan Riau	367,49	600,00	330,00	210,00	211,55
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	1,00
12	Jawa Barat	-	3.528,00	1.217,00	750,00	735,87
13	Jawa Tengah	-	1.820,68	500,00	600,00	695,00
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	280,00	550,00	420,00	450,00
15	Jawa Timur	1,82	2.432,25	1.050,00	690,00	545,69
16	Banten	-	722,00	83,00	10,00	295,00
17	Bali	-	750,00	500,00	505,00	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	543,61	1.624,00	1.562,96	659,00	636,21
19	Nusa Tenggara Timur	-	3.665,00	1.050,00	410,00	500,00
20	Kalimantan Barat	29,02	1.628,00	800,00	405,00	505,78
21	Kalimantan Tengah	1.072,74	1.660,09	1.691,66	4.558,33	5.793,25
22	Kalimantan Selatan	3.867,43	3.565,99	2.274,10	1.691,80	2.424,31
23	Kalimantan Timur	5.596,64	5.537,97	13.164,90	7.478,84	15.087,61
24	Kalimantan Utara	-	25,00	-	25,60	539,63
25	Sulawesi Utara	-	1.600,00	957,20	351,00	278,36
26	Sulawesi Tengah	-	1.250,00	1.612,91	2.340,73	3.994,26
27	Sulawesi Selatan	-	6.353,00	1.893,00	1.121,00	6.189,90
28	Sulawesi Tenggara	2,20	5.037,00	995,75	530,00	2.871,90
29	Gorontalo	-	2.500,00	1.300,00	2.219,00	1.064,65
30	Sulawesi Barat	645,00	1.250,00	1.000,00	1.668,00	425,00
31	Maluku	1,15	1.300,00	1.250,00	405,00	734,50
32	Maluku Utara	1.119,02	2.229,50	2.070,80	1.363,79	4.236,64
33	Papua	-	1.606,00	550,00	1.480,22	1.029,07
34	Papua Barat	856,30	500,00	500,00	400,00	70,00
35	Papua Selatan	-	-	-	-	100,00
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	100,00
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	239,60
Jumlah		15.987,95	69.960,60	50.932,08	35.180,83	56.221,76

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada
 - 2024: RHL DAS Prioritas, RHL IKN, Penanaman FPIV, Penanaman Agroforestry FPIV, Rehabilitasi DAS, dan Reklamasi
 - 2023: RHL DAS Prioritas, RHL IKN, Rehabilitasi DAS, dan Reklamasi
 - 2022: RHL DAS Prioritas, RHL IKN, Rehabilitasi DAS dan Reklamasi
 - 2021: RHL DAS Prioritas, Rehabilitasi DAS dan Reklamasi
 - 2020: Rehabilitasi DAS dan Reklamasi

Tabel 3.3 Luas Rehabilitasi Lahan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Rehabilitasi Lahan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	814,92	2.403,18	3.350,00	3.395,00	2.933,20
2	Sumatera Utara	2.380,00	1.877,14	17.339,00	9.618,00	7.702,58
3	Sumatera Barat	7.225,57	9.003,76	6.171,00	4.161,00	2.994,63
4	Riau	2.307,50	2.791,71	4.396,00	1.119,00	1.220,78
5	Jambi	453,63	684,81	2.439,00	2.962,00	2.185,57
6	Sumatera Selatan	2.744,89	4.274,06	10.450,00	6.687,00	9.858,00
7	Bengkulu	2.177,28	1.245,01	4.238,00	2.781,00	1.100,15
8	Lampung	560,00	2.459,00	9.738,00	5.437,00	6.977,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.168,43	716,28	2.384,00	1.262,00	1.627,47
10	Kepulauan Riau	364,00	933,31	1.730,00	1.519,00	872,97
11	DKI Jakarta	-	-	-	600,00	-
12	Jawa Barat	8.253,60	7.398,53	38.106,35	16.619,00	17.671,45
13	Jawa Tengah	12.640,37	6.413,82	10.996,00	15.343,00	12.083,44
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.567,02	92,87	2.478,00	2.170,00	2.386,37
15	Jawa Timur	3.839,88	8.054,06	7.973,00	7.014,00	9.395,37
16	Banten	-	749,05	821,00	1.135,00	592,00
17	Bali	2.641,61	2.054,07	2.165,00	1.616,00	1.199,61
18	Nusa Tenggara Barat	2.155,00	2.236,63	11.338,44	4.495,00	7.633,49
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	1.143,63	14.536,00	4.700,00	7.971,36
20	Kalimantan Barat	1.162,57	1.433,88	4.346,00	12.978,00	2.618,33
21	Kalimantan Tengah	1.854,18	1.861,75	4.454,00	2.216,00	1.603,78
22	Kalimantan Selatan	1.897,69	476,56	5.341,00	5.645,00	6.034,33
23	Kalimantan Timur	5.209,00	10.106,37	5.517,00	10.195,00	11.305,48
24	Kalimantan Utara	-	-	50,00	1,00	1.154,93
25	Sulawesi Utara	1.337,84	735,23	5.891,00	5.378,00	4.204,44
26	Sulawesi Tengah	1.780,25	4.429,76	3.374,77	1.966,00	1.999,01
27	Sulawesi Selatan	3.349,94	1.303,40	11.298,00	8.187,87	11.535,98
28	Sulawesi Tenggara	506,00	1.443,38	2.371,00	2.780,00	448,50
29	Gorontalo	1.879,79	1.540,26	3.558,50	2.180,00	1.050,44
30	Sulawesi Barat	635,93	643,76	2.125,00	1.552,89	101,00
31	Maluku	779,22	1.219,54	2.624,00	1.969,00	3.556,64
32	Maluku Utara	653,49	580,53	1.545,00	2.709,00	1.685,93
33	Papua	336,00	312,27	2.769,00	2.195,00	1.578,60
34	Papua Barat	600,00	494,00	1.050,00	1.630,00	687,75
35	Papua Selatan	-	-	-	-	630,50
36	Papua Tengah	-	-	-	-	36,00
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	26,00	35,00
Jumlah		78.275,60	81.111,61	206.963,06	154.241,76	146.672,66

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 31 Desember 2024

Keterangan:

- 2024: Kegiatan terdiri dari Penanaman KBR, bibit PP, bibit Persemaian Skala Besar, bibit Produktif, Penanaman Serentak, UPSA, DBH DR, BH DR SAWIT, CSR, DAK Hutan Rakyat, FOLU Net Sink, dan Mewlafor
- 2023: Kegiatan terdiri dari Penanaman KBR, bibit PP, bibit Persemaian Skala Besar, bibit Produktif, Penanaman Serentak, UPSA, DBH DR, BH DR SAWIT, CSR, dan DAK Hutan Rakyat
- 2022: Kegiatan terdiri dari Penanaman KBR, bibit PP, bibit Persemaian Skala Besar, bibit Produktif dan KBD
- 2021: Kegiatan terdiri dari Penanaman KBR, bibit PP, bibit Produktif dan KBD
- 2020: Kegiatan terdiri dari Penanaman KBR, bibit PP, bibit produktif dan KBD

Tabel 3.4 Luas Rehabilitasi Mangrove Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Rehabilitasi Mangrove (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	856,00	805,00	105,00	74,70	50,00
2	Sumatera Utara	1.810,00	7.659,00	373,00	25,00	636,00
3	Sumatera Barat	100,00	100,00	25,00	31,00	75,00
4	Riau	767,00	6.370,00	842,00	351,00	1.720,00
5	Jambi	200,00	50,00	50,00	32,85	-
6	Sumatera Selatan	360,00	325,00	50,00	150,00	75,00
7	Bengkulu	50,00	25,00	-	32,30	-
8	Lampung	583,00	200,00	729,00	192,00	25,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	575,00	3.950,00	42,00	4,00	-
10	Kepulauan Riau	793,30	2.750,00	241,00	709,00	49,00
11	DKI Jakarta	20,05	-	-	208,10	75,00
12	Jawa Barat	781,26	294,00	382,00	93,00	50,00
13	Jawa Tengah	591,60	175,00	75,00	138,95	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	19,50	-	-	4,00	-
15	Jawa Timur	1.023,00	338,00	106,00	219,90	-
16	Banten	212,22	224,00	-	48,50	-
17	Bali	100,00	653,00	168,00	52,00	-
18	Nusa Tenggara Barat	475,00	250,00	100,00	51,40	-
19	Nusa Tenggara Timur	681,00	250,00	25,00	29,50	-
20	Kalimantan Barat	738,00	1.305,00	154,00	611,00	29,00
21	Kalimantan Tengah	1.132,00	235,00	140,00	154,00	50,00
22	Kalimantan Selatan	1.090,00	50,00	-	88,00	75,00
23	Kalimantan Timur	1.435,00	5.960,72	1.045,00	1.053,00	4.445,00
24	Kalimantan Utara	-	1.007,00	558,00	10,00	6.550,00
25	Sulawesi Utara	300,00	104,00	50,00	33,30	-
26	Sulawesi Tengah	200,00	250,00	50,00	52,50	50,00
27	Sulawesi Selatan	530,21	325,00	110,00	181,00	-
28	Sulawesi Tenggara	1.112,00	325,00	165,00	76,00	75,00
29	Gorontalo	678,00	100,00	75,00	26,00	25,00
30	Sulawesi Barat	542,50	125,00	1.144,00	25,50	50,00
31	Maluku	184,00	250,00	75,00	27,00	50,00
32	Maluku Utara	144,90	50,00	-	29,00	-
33	Papua	365,00	1.500,00	-	806,00	135,00
34	Papua Barat	260,00	1.559,00	120,00	390,50	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	432,00
36	Papua Tengah	-	-	360,00	-	70,00
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	289,00
Jumlah		18.709,54	37.563,72	7.359,00	6.010,00	15.080,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 31 Desember 2024

Keterangan:
· - = Data tidak tersedia/ada
· Sumber Dana dari APBN dan Non APBN

Tabel 3.5 Luas Lahan Kritis

No	Provinsi	Luas Lahan Kritis (Ha)				
		2006	2011	2013	2018	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	463.023,00	744.954,40	625.358,00	316.637,43	389.331,51
2	Sumatera Utara	1.961.726,00	1.135.340,80	1.059.467,00	1.338.809,95	41.416,94
3	Sumatera Barat	409.031,00	509.977,00	630.695,00	651.969,90	197.629,37
4	Riau	2.415.015,00	840.658,00	1.889.622,00	710.872,85	277.708,43
5	Jambi	618.891,00	1.420.602,00	779.774,00	213.985,30	72.294,28
6	Sumatera Selatan	2.824.849,00	3.886.062,00	312.864,00	733.756,16	-
7	Bengkulu	708.949,00	642.587,00	721.674,00	148.886,77	225.438,23
8	Lampung	525.463,00	589.229,00	322.924,00	403.910,33	219.632,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	576.458,00	114.836,00	216.108,00	20.687,45	392.268,62
10	Kepulauan Riau	-	254.749,00	338.208,00	8.229,91	829.555,68
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	390.017,43
12	Jawa Barat	160.382,00	483.944,20	342.966,00	911.192,04	743.783,80
13	Jawa Tengah	261.526,00	159.852,90	110.843,00	375.732,54	458.478,45
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	44.659,00	33.558,90	26.117,00	79.122,80	819.682,42
15	Jawa Timur	780.956,00	608.912,50	1.221.919,00	432.225,13	274.477,31
16	Banten	142.409,00	67.502,90	36.955,00	330.407,45	53.880,73
17	Bali	55.920,00	48.051,60	45.997,00	46.895,30	167.065,33
18	Nusa Tenggara Barat	305.732,00	91.858,80	177.577,00	65.798,95	92.573,06
19	Nusa Tenggara Timur	3.219.811,00	1.041.688,00	960.854,00	840.914,12	387.493,57
20	Kalimantan Barat	1.856.305,00	3.169.491,00	859.575,00	1.015.631,00	487.248,21
21	Kalimantan Tengah	3.206.887,00	4.636.890,00	5.144.704,00	861.240,32	483.267,65
22	Kalimantan Selatan	566.592,00	786.911,00	641.586,00	511.594,36	490.313,59
23	Kalimantan Timur	1.053.690,00	318.836,00	910.820,00	275.271,91	580.730,68
24	Kalimantan Utara	-	-	274.340,00	199.734,42	368.637,08
25	Sulawesi Utara	257.266,00	276.056,40	269.211,00	289.782,29	331.028,38
26	Sulawesi Tengah	216.487,00	317.769,00	452.232,00	264.874,42	221.828,49
27	Sulawesi Selatan	549.118,00	920.452,00	532.661,00	449.606,33	144.130,27
28	Sulawesi Tenggara	1.284.601,00	885.463,00	945.105,00	424.654,88	364.103,91
29	Gorontalo	265.778,00	257.176,00	566.637,00	332.297,54	314.317,18
30	Sulawesi Barat	27.138,00	113.960,00	319.153,00	88.420,75	392.797,05
31	Maluku	612.219,00	762.323,90	728.776,00	299.606,94	362.594,48
32	Maluku Utara	550.750,00	611.106,30	420.101,00	387.889,06	686.090,58
33	Papua	2.970.400,00	1.076.699,00	2.239.229,00	538.523,02	707.168,67
34	Papua Barat	1.304.770,00	487.343,00	179.241,00	437.287,96	777.941,94
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		30.196.801,00	27.294.841,60	24.303.293,00	14.006.449,58	12.744.925,32

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
• - = Data tidak tersedia/ada
• Data luas lahan kritis diperbarui secara periodik setiap 5 tahun dan dilakukan peninjauan ulang setiap 2 tahun

Tabel 3.6 Jumlah Sumur Resapan Air Tahun 2022-2024

No	Provinsi	Jumlah Sumur Resapan Air (Unit)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	18	12
3	Sumatera Barat	8	18	12
4	Riau	-	16	8
5	Jambi	-	12	12
6	Sumatera Selatan	8	12	12
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	8	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	8	8	12
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	10	8	13
13	Jawa Tengah	24	26	24
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	8	12
15	Jawa Timur	12	8	14
16	Banten	55	8	9
17	Bali	10	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	11
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	6	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	6	4
23	Kalimantan Timur	8	8	12
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	15
26	Sulawesi Tengah	-	-	10
27	Sulawesi Selatan	10	12	15
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	8	14	13
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua	-	10	6
34	Papua Barat	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		189	206	226

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada

Tabel 3.7 Jumlah Instalasi Pemanenan Air Hujan/IPAH Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Instalasi Pemanenan Air Hujan/IPAH (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	18	12
3	Sumatera Barat	-	-	8	18	12
4	Riau	-	-	-	16	8
5	Jambi	-	-	-	12	12
6	Sumatera Selatan	-	-	8	12	12
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	12	8	8	11
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	10	10	8	14
13	Jawa Tengah	-	10	24	26	28
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	16	10	8	12
15	Jawa Timur	14	12	12	8	14
16	Banten	-	10	10	8	11
17	Bali	-	10	10	16	12
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	53	8	15
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	20	24	9
20	Kalimantan Barat	-	-	-	6	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	12	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	6	5
23	Kalimantan Timur	-	111	8	8	12
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	12
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	10
27	Sulawesi Selatan	-	-	10	12	15
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	8	14	13
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	10	6
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		14	191	199	258	255

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada

Tabel 3.8 Jumlah Bangunan DAM Penahan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Bangunan DAM Penahan (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	5	29	39	7	4
2	Sumatera Utara	15	20	73	4	28
3	Sumatera Barat	-	10	54	2	25
4	Riau	21	-	-	-	-
5	Jambi	0	10	25	-	10
6	Sumatera Selatan	10	5	20	2	7
7	Bengkulu	-	-	20	5	2
8	Lampung	10	20	54	-	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	62	51	69	19	14
13	Jawa Tengah	86	64	146	9	39
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	3	-	-	-	-
15	Jawa Timur	46	69	106	18	11
16	Banten	-	-	27	2	7
17	Bali	-	-	-	-	1
18	Nusa Tenggara Barat	11	10	70	-	3
19	Nusa Tenggara Timur	20	20	43	8	1
20	Kalimantan Barat	-	10	20	10	2
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	1	1
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	1	3
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	10	-	3
25	Sulawesi Utara	-	-	5	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	3	15	-	1
27	Sulawesi Selatan	15	30	62	14	3
28	Sulawesi Tenggara	-	-	45	5	1
29	Gorontalo	13	20	40	-	11
30	Sulawesi Barat	10	10	40	5	1
31	Maluku	-	10	-	5	1
32	Maluku Utara	-	-	-	-	1
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		327	391	983	117	196

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

- Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada
 - 2020-2023: Sumber Dana APBN
 - 2024: Sumber Dana APBN dan Pembiayaan Folu Netsink

Tabel 3.9 Jumlah Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Bangunan Pengendali Jurang/Gully Plug (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	33	-	-	50	45
2	Sumatera Utara	240	80	160	10	188
3	Sumatera Barat	0	80	120	0	111
4	Riau	109	-	-	-	-
5	Jambi	0	60	50	-	94
6	Sumatera Selatan	200	10	40	-	72
7	Bengkulu	0	0	40	50	15
8	Lampung	220	90	180	-	95
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	620	198	123	67	178
13	Jawa Tengah	351	214	298	86	185
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	165	-	-	-	-
15	Jawa Timur	201	49	224	117	98
16	Banten	-	-	93	28	27
17	Bali	-	-	-	-	7
18	Nusa Tenggara Barat	100	-	100	-	7
19	Nusa Tenggara Timur	150	100	115	63	19
20	Kalimantan Barat	-	-	40	37	10
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	5
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	12
23	Kalimantan Timur	-	-	30	-	6
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	5
26	Sulawesi Tengah	-	-	30	-	7
27	Sulawesi Selatan	370	25	109	59	25
28	Sulawesi Tenggara	-	45	90	30	15
29	Gorontalo	126	82	80	-	195
30	Sulawesi Barat	30	70	80	50	25
31	Maluku	-	60	-	40	13
32	Maluku Utara	-	-	-	-	13
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		2.915	1.163	2.002	687	1.472

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:

- = Data tidak tersedia/ada
- 2020-2023: Sumber Dana APBN
- 2024: Sumber Dana APBN, Pembiayaan FPIV, dan Pembiayaan Folu Netsink

Tabel 3.10 Jumlah Penyediaan Bibit Produktif Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Penyediaan Bibit Produktif (Batang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	96.300	75.760	125.000	136.000	81.000
2	Sumatera Utara	139.100	125.900	148.000	230.460	142.000
3	Sumatera Barat	24.000	48.000	54.335	100.000	36.886
4	Riau	74.000	83.171	93.009	125.000	31.000
5	Jambi	50.000	10.000	44.500	100.175	81.854
6	Sumatera Selatan	75.000	65.319	80.000	130.000	131.000
7	Bengkulu	53.500	20.000	122.275	50.000	16.000
8	Lampung	42.740	80.300	125.000	256.000	242.550
9	Kepulauan Bangka Belitung	85.200	61.500	59.625	40.000	68.512
10	Kepulauan Riau	20.000	38.000	38.000	58.000	26.000
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	299.950	435.604	242.500	365.000	241.650
13	Jawa Tengah	369.200	196.330	158.780	664.024	227.750
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	100.000	120.000	111.000	304.888	230.000
15	Jawa Timur	287.000	188.000	233.600	305.000	258.500
16	Banten	-	-	-	-	406.209
17	Bali	77.000	10.000	68.000	115.000	86.000
18	Nusa Tenggara Barat	85.000	122.586	113.091	141.900	131.000
19	Nusa Tenggara Timur	50.000	220.000	202.695	183.965	166.000
20	Kalimantan Barat	81.000	114.000	139.500	240.947	166.000
21	Kalimantan Tengah	80.000	70.000	58.000	80.000	55.000
22	Kalimantan Selatan	71.391	40.280	116.500	184.362	51.730
23	Kalimantan Timur	87.000	87.000	46.950	140.000	130.250
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	51.000	40.000	38.000	66.166	16.000
26	Sulawesi Tengah	30.000	68.000	38.000	67.800	56.000
27	Sulawesi Selatan	215.000	164.643	344.754	255.000	290.000
28	Sulawesi Tenggara	38.280	58.000	30.500	132.500	16.000
29	Gorontalo	68.800	80.000	71.000	53.000	16.000
30	Sulawesi Barat	193.100	35.590	58.000	90.000	80.000
31	Maluku	48.010	111.690	79.530	145.240	116.000
32	Maluku Utara	30.000	58.000	67.850	184.800	114.486
33	Papua	46.000	58.000	30.000	90.000	81.000
34	Papua Barat	83.000	30.500	30.000	126.200	16.000
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		3.050.571	2.916.173	3.167.994	5.161.427	3.808.377

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada

Tabel 3.11 Jumlah Penyediaan Bibit Persemaian Permanen Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Penyediaan Bibit Persemaian Permanen (Batang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	250.000	425.000	500.000	700.000	300.000
2	Sumatera Utara	796.402	1.000.000	1.500.000	400.000	300.000
3	Sumatera Barat	1.139.000	1.500.000	1.611.750	850.000	750.000
4	Riau	753.500	758.000	1.500.000	550.000	500.000
5	Jambi	375.000	625.000	750.000	750.000	600.000
6	Sumatera Selatan	2.000.235	2.504.509	2.500.000	1.450.000	2.500.000
7	Bengkulu	826.500	1.000.000	1.250.000	750.000	500.000
8	Lampung	1.660.000	2.400.000	2.500.000	950.000	766.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	800.000	679.000	750.000	600.000	400.000
10	Kepulauan Riau	161.000	500.000	500.000	500.000	350.000
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	2.500.000	4.200.000	4.650.000	450.000	700.000
13	Jawa Tengah	1.959.000	2.650.000	2.550.000	1.450.000	1.535.072
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	250.000	800.000	800.000	800.000	700.000
15	Jawa Timur	1.501.553	1.505.315	1.500.000	800.000	700.000
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	350.000	750.000	215.000	100.000	-
18	Nusa Tenggara Barat	625.000	1.250.000	1.995.000	400.000	1.405.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.655.000	1.800.000	3.400.000	500.000	1.000.000
20	Kalimantan Barat	500.000	1.000.000	1.000.000	750.000	600.000
21	Kalimantan Tengah	400.000	800.000	1.000.000	700.000	1.015.000
22	Kalimantan Selatan	1.070.000	1.800.000	1.850.000	2.100.000	-
23	Kalimantan Timur	400.364	796.154	800.000	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	750.000	1.500.000	1.500.000	-	743.048
26	Sulawesi Tengah	400.000	750.000	750.000	750.000	506.000
27	Sulawesi Selatan	1.750.935	2.850.521	2.900.290	1.890.000	2.840.000
28	Sulawesi Tenggara	350.000	320.000	500.000	850.000	400.000
29	Gorontalo	1.000.000	750.000	750.000	800.000	500.000
30	Sulawesi Barat	350.000	100.000	100.000	300.000	50.000
31	Maluku	250.000	500.000	500.000	470.000	550.000
32	Maluku Utara	200.000	300.000	300.000	600.000	503.490
33	Papua	250.000	500.000	700.000	470.000	400.000
34	Papua Barat	200.000	200.000	240.000	550.000	400.000
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		25.473.489	36.513.499	41.362.040	22.230.000	21.513.610

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada

Tabel 3.12 Jumlah Penyediaan Bibit Pusat Persemaian (Skala Besar) Tahun 2022-2024

No	Provinsi	Jumlah Penyediaan Bibit Pusat Persemaian (Batang)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.000.000	3.000.000	2.159.853
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	8.000.000	4.000.000	3.500.000
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	1.800.000	1.000.000	1.100.000
18	Nusa Tenggara Barat	-	600.000	1.000.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	2.500.000
23	Kalimantan Timur	1.000.000	3.980.000	5.000.000
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	2.500.000	2.000.000	1.046.726
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		19.300.000	15.580.000	17.306.579

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada

Tabel 3.13

Jumlah Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	35	700.000	47	1.410.000	56	1.680.000	44	1.430.000	24	730.000
2	Sumatera Utara	50	1.000.000	29	870.000	20	660.000	31	890.000	48	1.560.000
3	Sumatera Barat	40	1.200.000	31	930.000	19	600.000	21	626.000	24	730.000
4	Riau	45	900.000	25	750.000	21	627.000	16	460.000	5	160.000
5	Jambi	-	-	-	-	9	240.027	14	420.000	15	490.000
6	Sumatera Selatan	40	800.000	32	960.000	32	960.000	32	958.000	34	1.020.000
7	Bengkulu	20	400.000	-	-	22	660.000	12	360.000	3	100.000
8	Lampung	25	500.000	32	930.031	45	1.376.000	60	887.500	73	2.190.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	300.000	12	360.000	12	370.000	8	240.000	3	90.000
10	Kepulauan Riau	10	240.000	12	300.020	12	330.000	12	360.000	3	90.000
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	121	3.630.000	127	4.340.147	136	4.805.000	116	4.150.020	162	5.835.000
13	Jawa Tengah	108	3.300.000	108	3.780.000	124	4.351.500	105	3.710.000	99	3.495.000
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	50	1.500.000	-	-	8	295.000	-	-	2	70.000
15	Jawa Timur	143	4.320.000	122	4.270.000	99	3.465.000	103	3.585.000	119	4.165.000
16	Banten	14	420.000	22	770.000	32	1.120.000	17	595.000	23	805.000
17	Bali	35	700.000	32	960.000	24	720.000	24	720.000	18	540.000
18	Nusa Tenggara Barat	40	800.000	33	990.000	40	3.445.500	42	1.270.000	37	1.150.000
19	Nusa Tenggara Timur	30	600.000	32	960.000	42	1.230.000	43	1.302.000	59	1.780.000
20	Kalimantan Barat	40	800.000	42	1.260.000	52	1.560.000	43	1.290.000	54	1.620.000
21	Kalimantan Tengah	24	480.000	22	660.000	22	660.000	30	1.369.500	15	450.000
22	Kalimantan Selatan	15	300.000	11	330.000	12	360.000	4	120.000	8	250.000
23	Kalimantan Timur	29	580.000	24	660.044	30	934.000	27	810.000	26	790.000
24	Kalimantan Utara	6	120.000	-	-	2	80.000	-	-	2	80.000
25	Sulawesi Utara	20	400.000	13	390.000	4	120.000	9	270.000	3	90.000
26	Sulawesi Tengah	15	300.000	20	570.019	12	370.000	16	510.000	13	410.000

Lanjutan Tabel 3.13 Jumlah Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)	Kebun (Unit)	Bibit (Batang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sulawesi Selatan	90	1.800.000	21	450.090	-	-	65	1.590.000	76	2.380.000
28	Sulawesi Tenggara	20	400.000	22	660.000	22	660.000	25	750.000	3	90.000
29	Gorontalo	30	600.000	13	390.000	12	420.000	15	470.000	8	250.000
30	Sulawesi Barat	25	500.000	25	750.000	67	2.040.000	22	660.000	22	660.000
31	Maluku	15	300.000	22	525.021	32	789.500	32	860.000	38	960.000
32	Maluku Utara	15	300.000	22	550.000	22	547.500	21	525.000	18	470.000
33	Papua	12	240.000	22	550.000	22	520.000	22	550.000	5	125.000
34	Papua Barat	30	600.000	10	250.000	12	300.000	12	300.000	1	25.000
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	25	625.000
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.000
Jumlah		1.207	29.030.000	985	30.575.372	1.076	36.296.027	1.043	32.038.020	1.070	34.335.000

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, 2024

Keterangan:
- = Data tidak tersedia/ada

BAB 4

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Sumber Foto: Tim Dokumentasi PBPH-HT

6.624.665,00 HA

LUAS ARAHAN PEMANFAATAN UNTUK
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN
HUTAN TAHUN 2024

30.158.968,68 HA

579 UNIT

LUAS AREAL DAN JUMLAH PERIZINAN
BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN
2024

Rp 43.018.658.437.356

NILAI INVESTASI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN
PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN HHK-HA DAN HT
TAHUN 2024

50.205 ORANG

JUMLAH TENAGA KERJA PADA PERIZINAN
BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN HHK-HA
DAN HT TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) merupakan unsur pelaksana di Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan hutan lestari. Fungsi utama Ditjen PHL mencakup penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan.

12.417 ORANG

JUMLAH TENAGA KERJA PADA PBPH
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN HHK-
HA TAHUN 2024

723 UNIT

JUMLAH PBPHH SKALA USAHA BESAR, PBPHH
SKALA USAHA MENENGAH DAN PBPHH SKALA
USAHA KECIL YANG MEMILIKI SERTIFIKASI
LEGALITAS DAN KELESTARIAN HUTAN TAHUN 2024

37.788 ORANG

JUMLAH TENAGA KERJA PADA PBPH
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN HHK -
HT TAHUN 2024

374 UNIT

JUMLAH PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) YANG MEMILIKI
SERTIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN TAHUN
2024

Tabel 4.1 Luas Arahán Pemanfaatan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Arahán Pemanfaatan Hutan (Ha)			
		HL	HPT/HP	HPK	Jumlah Luas
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	7.725,00	212.255,00	-	219.980,00
2	Sumatera Utara	36.220,00	191.755,00	-	227.975,00
3	Sumatera Barat	235,00	108.550,00	-	108.785,00
4	Riau	370,00	273.625,00	24.725,00	298.720,00
5	Jambi	42.665,00	105.810,00	-	148.475,00
6	Sumatera Selatan	735,00	133.445,00	-	134.180,00
7	Bengkulu	1.805,00	52.285,00	-	54.090,00
8	Lampung	8.420,00	12.220,00	-	20.640,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	980,00	57.645,00	-	58.625,00
10	Kepulauan Riau	1.090,00	52.265,00	625,00	53.980,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	2.660,00	-	2.660,00
18	Nusa Tenggara Barat	12.525,00	168.135,00	-	180.660,00
19	Nusa Tenggara Timur	715,00	129.620,00	-	130.335,00
20	Kalimantan Barat	4.210,00	622.735,00	5.840,00	632.785,00
21	kalimantan Tengah	125,00	298.410,00	175,00	298.710,00
22	Kalimantan Selatan	32.285,00	158.525,00	1.010,00	191.820,00
23	Kalimantan Timur	510,00	205.850,00	-	206.360,00
24	Kalimantan Utara	210,00	74.045,00	-	74.255,00
25	Sulawesi Utara	5.120,00	40.310,00	-	45.430,00
26	Sulawesi Tengah	1.175,00	634.505,00	655,00	636.335,00
27	Sulawesi Selatan	38.965,00	216.125,00	-	255.090,00
28	Sulawesi Tenggara	76.500,00	289.255,00	2.220,00	367.975,00
29	Gorontalo	80,00	37.345,00	-	37.425,00
30	Sulawesi Barat	-	117.295,00	20,00	117.315,00
31	Maluku	85,00	460.700,00	6.705,00	467.490,00
32	Maluku Utara	5.440,00	118.210,00	670,00	124.320,00
33	Papua	330,00	395.535,00	102.810,00	498.675,00
34	Papua Barat	-	30.285,00	-	30.285,00
35	Papua Selatan	175,00	666.010,00	109.355,00	775.540,00
36	Papua Tengah	-	29.665,00	-	29.665,00
37	Papua Pegunungan	30.290,00	66.610,00	-	96.900,00
38	Papua Barat Daya	2.265,00	95.595,00	1.325,00	99.185,00
Jumlah		311.250,00	6.057.280,00	256.135,00	6.624.665,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Desember 2024

- Keterangan:
- HL = Hutan Lindung; HPT = v; HP = Hutan Produksi Tetap; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
 - = Tidak ada arahan pemanfaatan untuk PBPH
 - DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten tidak memiliki PBPH

Tabel 4.2 Luas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Ha)	
		Jumlah PBPH	Luas
1	2	3	4
1	Aceh	5	217.561,00
2	Sumatera Utara	13	535.780,11
3	Sumatera Barat	7	219.922,90
4	Riau	55	1.871.658,80
5	Jambi	23	809.476,48
6	Sumatera Selatan	22	1.384.289,51
7	Bengkulu	3	76.663,82
8	Lampung	4	109.452,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	214.054,64
10	Kepulauan Riau	3	2.050,90
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	-	-
17	Bali	1	252,00
18	Nusa Tenggara Barat	3	39.917,55
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	67	2.846.756,41
21	Kalimantan Tengah	110	5.361.924,28
22	Kalimantan Selatan	20	660.598,00
23	Kalimantan Timur	108	4.975.148,56
24	Kalimantan Utara	31	2.377.346,67
25	Sulawesi Utara	-	-
26	Sulawesi Tengah	9	441.386,00
27	Sulawesi Selatan	3	15.229,06
28	Sulawesi Tenggara	1	18.980,00
29	Gorontalo	2	74.146,78
30	Sulawesi Barat	1	30.525,00
31	Maluku	14	748.858,00
32	Maluku Utara	19	840.838,75
33	Papua	11	1.234.468,79
34	Papua Barat	21	2.727.642,72
35	Papua Selatan	10	1.537.317,95
36	Papua Tengah	4	646.752,00
37	Papua Pegunungan	-	-
38	Papua Barat Daya	1	139.970,00
Jumlah		579	30.158.968,68

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:
• - = Tidak ada PBPH
• DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten tidak memiliki PBPH

Tabel 4.3 Nilai Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2024

No	Provinsi	Nilai Investasi PBPH (IDR)	
		Jumlah PBPH	Nilai Investasi
1	2	3	4
1	Aceh	3	4.874.800.000
2	Sumatera Utara	11	1.484.194.196.286
3	Sumatera Barat	5	84.185.158.525
4	Riau	49	4.780.925.168.878
5	Jambi	16	2.731.843.863.318
6	Sumatera Selatan	19	5.334.851.032.711
7	Bengkulu	1	1.200.000.000
8	Lampung	3	390.218.000.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	41.896.081.462
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	-	-
17	Bali	1	130.564.400.000
18	Nusa Tenggara Barat	2	49.503.503.727
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	50	4.164.050.425.374
21	Kalimantan Tengah	82	4.962.771.027.145
22	Kalimantan Selatan	10	242.461.946.481
23	Kalimantan Timur	85	8.656.282.194.549
24	Kalimantan Utara	22	2.976.863.710.512
25	Sulawesi Utara	-	-
26	Sulawesi Tengah	3	48.173.369.752
27	Sulawesi Selatan	3	27.943.060.000
28	Sulawesi Tenggara	-	-
29	Gorontalo	2	92.230.000.000
30	Sulawesi Barat	-	-
31	Maluku	10	327.785.227.751
32	Maluku Utara	12	739.879.174.388
33	Papua	8	252.067.617.120
34	Papua Barat	17	4.865.277.431.486
35	Papua Selatan	5	250.811.004.500
36	Papua Tengah	3	217.887.692.391
37	Papua Pegunungan	-	-
38	Papua Barat Daya	1	159.918.351.000
Jumlah		428	43.018.658.437.356

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA dan HT yang Memiliki Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)
- Sumber Data Berasal dari Aplikasi SIPASHUT
- - = Tidak ada PBPH/ Nilai investasi

Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kerja Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Untuk Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA dan HT Tahun 2024

No	Provinsi	Tenaga Kerja Pada PBPH (Orang)		
		Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Lepas	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Aceh	13	216	229
2	Sumatera Utara	1.189	98	1.287
3	Sumatera Barat	280	92	372
4	Riau	2.976	4.645	7.621
5	Jambi	1.344	3.465	4.809
6	Sumatera Selatan	2.085	35	2.120
7	Bengkulu	5	16	21
8	Lampung	434	509	943
9	Kepulauan Bangka Belitung	138	131	269
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	35	179	214
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	4.176	5.815	9.991
21	Kalimantan Tengah	4.421	1.133	5.554
22	Kalimantan Selatan	85	181	266
23	Kalimantan Timur	4.315	5.579	9.894
24	Kalimantan Utara	1.631	1.511	3.142
25	Sulawesi Utara	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	46	46
27	Sulawesi Selatan	18	6	24
28	Sulawesi Tenggara	17	24	41
29	Gorontalo	84	216	300
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	317	132	449
32	Maluku Utara	477	118	595
33	Papua	416	83	499
34	Papua Barat	913	182	1.095
35	Papua Selatan	92	131	223
36	Papua Tengah	190	-	190
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	8	3	11
Jumlah		25.659	24.546	50.205

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - HHK-HA = Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam; HHK-HT = Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman
 - - = Tidak ada tenaga kerja

Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	430	192	281	262	176
3	Sumatera Barat	410	208	5	52	313
4	Riau	329	333	409	338	951
5	Jambi	-	27	30	31	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	12	20	21
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	78	88
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1.866	2.320	567	627	645
21	Kalimantan Tengah	8.606	6.556	4.742	4.695	3.892
22	Kalimantan Selatan	97	105	121	-	2
23	Kalimantan Timur	3.017	1.809	2.534	2.377	2.288
24	Kalimantan Utara	1.977	1.720	1.187	1.171	1.307
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	26	11	58	16	9
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	35	35	-	-	-
31	Maluku	440	440	453	458	397
32	Maluku Utara	721	362	421	575	413
33	Papua	932	350	1.185	1.269	499
34	Papua Barat	1.562	866	2.510	1.263	1.047
35	Papua Selatan	-	-	-	-	168
36	Papua Tengah	-	-	-	-	190
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	11
Jumlah		20.448	15.334	14.515	13.232	12.417

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- HHK-HA = Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam
- - = Tidak ada tenaga kerja

Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK - HT Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK - HT (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	92	12	37	229
2	Sumatera Utara	2.939	3.535	2.234	2.176	1.111
3	Sumatera Barat	-	122	-	73	59
4	Riau	3.697	4.010	5.287	8.623	6.670
5	Jambi	1.647	2.294	5.396	6.501	4.809
6	Sumatera Selatan	5.316	1.163	-	4.142	2.120
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	68	31	3.910	1.377	943
9	Kepulauan Bangka Belitung	74	2.038	113	130	269
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	127	48	47	126
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	805	833	2.419	3.181	9.346
21	Kalimantan Tengah	193	3.778	2.933	1.779	1.662
22	Kalimantan Selatan	279	353	863	1.078	264
23	Kalimantan Timur	1.887	2.750	4.094	3.868	7.606
24	Kalimantan Utara	-	3.049	2.238	1.446	1.835
25	Sulawesi Utara	-	25	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	99	96	37
27	Sulawesi Selatan	-	21	3.426	-	24
28	Sulawesi Tenggara	-	22	6	61	41
29	Gorontalo	-	-	10	102	300
30	Sulawesi Barat	-	-	68	-	-
31	Maluku	-	-	7	21	52
32	Maluku Utara	96	-	33	91	182
33	Papua	-	76	176	81	-
34	Papua Barat	-	-	5	21	48
35	Papua Selatan	-	-	-	-	55
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papau Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		17.001	24.319	33.377	34.931	37.788

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - HHK - HT = Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman
 - - = Tidak ada tenaga kerja

Tabel 4.7

Luas Penanaman Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA dan HT Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Penanaman Pada PBPH (Ha)	
		Jumlah PBPH	Luas
1	2	3	4
1	Aceh	2	380,07
2	Sumatera Utara	9	14.954,60
3	Sumatera Barat	3	1.752,39
4	Riau	44	191.889,60
5	Jambi	10	60.153,37
6	Sumatera Selatan	15	98.225,40
7	Bengkulu	1	43,90
8	Lampung	3	6.452,88
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	464,94
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	-	-
17	Bali	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2	196,65
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	34	34.225,02
21	Kalimantan Tengah	65	39.300,37
22	Kalimantan Selatan	5	4.216,60
23	Kalimantan Timur	65	72.582,97
24	Kalimantan Utara	16	11.826,63
25	Sulawesi Utara	-	-
26	Sulawesi Tengah	2	296,18
27	Sulawesi Selatan	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-
29	Gorontalo	2	277,22
30	Sulawesi Barat	-	-
31	Maluku	9	1.538,46
32	Maluku Utara	8	974,88
33	Papua	5	741,02
34	Papua Barat	10	3.206,65
35	Papua Selatan	5	1.402,79
36	Papua Tengah	4	1.038,45
37	Papua Pegunungan	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-
Jumlah		326	546.141,04

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- - = Tidak ada PBPH
- 326 adalah data yang tercatat berdasarkan kepemilikan RKTPH (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan)
- HHK-HA = Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam; HHK-HT = Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanam

Tabel 4.8 Luas Penanaman Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HA Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Penanaman PBPH Pada HHK-HA (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	116,50	465,00	538,00	844,07	848,29
3	Sumatera Barat	133,25	261,08	3.900,26	123,32	275,19
4	Riau	2.172,28	2.558,81	5.288,53	5.805,04	4.662,48
5	Jambi	-	-	1.881,90	3.686,20	6.220,44
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	69,07	43,90
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	360,38	177,85
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	65,00	6.165,29	7.753,77	5.575,87	3.286,79
21	Kalimantan Tengah	10.374,11	9.541,36	27.232,78	20.081,72	21.760,46
22	Kalimantan Selatan	131,00	33,00	84,30	48,00	60,50
23	Kalimantan Timur	1.495,73	3.719,78	14.218,21	5.430,28	13.120,51
24	Kalimantan Utara	596,00	1.335,25	3.421,19	3.737,49	1.869,44
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	122,53	185,00	185,60
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	993,92	1.381,45	1.478,94	1.189,87
32	Maluku Utara	114,00	904,60	1.632,19	420,53	699,47
33	Papua	296,90	4.471,48	6.861,47	2.140,14	741,02
34	Papua Barat	-	5.517,36	2.265,00	2.351,97	1.909,25
35	Papua Selatan	-	-	-	-	1.256,23
36	Papua Tengah	-	-	-	-	1.038,45
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		15.494,77	35.966,93	76.581,58	52.338,02	59.345,74

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:
· HHA - HA = Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam
· - = Tidak ada PBPH

Tabel 4.9

Luas Penanaman Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK-HT Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Penanaman PBPH Pada Sub Kegiatan HHK-HT (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	1.277,00	401,00	380,07
2	Sumatera Utara	11,00	18.726,00	13.896,52	12.175,33	14.106,31
3	Sumatera Barat	10,00	468,00	728,90	1.347,00	1.477,20
4	Riau	129.510,00	93.947,00	207.866,92	214.828,47	187.227,12
5	Jambi	2.180,00	31.813,00	53.260,58	56.099,79	53.932,93
6	Sumatera Selatan	5.044,00	63.883,00	147.958,71	115.242,14	98.225,40
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	1.125,00	2.346,88	4.792,03	6.452,88
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.391,00	5,00	376,46	905,08	464,94
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	82,00	35,65	21,11	18,80
19	Nusa Tenggara Timur	8.656,00	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	68.513,00	22.233,00	29.662,11	46.702,89	30.938,23
21	Kalimantan Tengah	61.955,00	5.611,00	22.426,05	30.449,97	17.539,91
22	Kalimantan Selatan	5.251,00	1.512,00	3.687,16	3.728,51	4.156,10
23	Kalimantan Timur	5.390,00	17.560,00	65.217,35	235.980,22	59.462,46
24	Kalimantan Utara	1.864,00	6.543,00	8.637,96	8.834,86	9.957,19
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	77,00	-	547,68	251,00	110,58
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	116,00	64,51	90,48	-
29	Gorontalo	-	733,00	-	100,72	277,22
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	394,66	904,27	348,59
32	Maluku Utara	-	-	-	50,20	275,41
33	Papua	1.142,00	1.291,00	318,69	221,98	-
34	Papua Barat	-	-	-	3.153,98	1.297,40
35	Papua Selatan	-	-	-	-	146,56
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
39	Perum Perhutani	52.444,00	54.540,00	-	-	-
Jumlah		344.438,00	320.188,00	558.703,79	736.281,03	486.795,30

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- HHA - HA = Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam
- - = Tidak ada PBPH

Tabel 4.10 Jumlah Produksi Kayu Bulat Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK - HA dan HHK - HT Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Kayu Bulat Pada PBPH Sub Kegiatan Pemanfaatan HHK - HA dan HHK - HT (M ³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	1.513,12	10.096,00	9.569,00	10.652,00	10.093,14
2	Sumatera Utara	1.406.224,25	1.649.079,00	1.978.439,00	2.026.454,00	1.901.593,30
3	Sumatera Barat	124.452,78	116.843,00	77.528,00	131.880,00	191.864,27
4	Riau	23.111.900,61	24.010.235,00	24.608.469,00	25.732.066,00	23.469.514,12
5	Jambi	5.862.870,22	5.210.234,00	5.519.005,00	5.764.257,00	5.124.389,93
6	Sumatera Selatan	9.697.101,14	10.180.335,00	10.747.393,00	11.122.796,00	10.363.894,83
7	Bengkulu	5.247,48	7.526,00	1.823,00	2.033,00	3.979,26
8	Lampung	25.981,70	85.200,00	37.199,00	54.525,00	127.606,09
9	Kepulauan Bangka Belitung	499,72	256,00	-	39,00	3.657,30
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	1.000,00	832,00	1.189,46
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	791.570,17	850.212,00	1.213.452,00	1.643.070,00	1.637.676,76
21	Kalimantan Tengah	2.587.525,11	3.052.940,00	3.141.360,00	3.150.175,00	2.914.628,43
22	Kalimantan Selatan	35.036,32	24.632,00	7.819,00	99.889,00	250.687,41
23	Kalimantan Timur	4.301.887,29	4.262.300,00	4.218.527,00	5.318.922,00	6.037.592,68
24	Kalimantan Utara	1.212.838,30	1.241.355,00	1.243.960,00	1.260.042,00	1.444.476,71
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	8.488,14	3.142,00	12.678,00	1.001,00	400,37
27	Sulawesi Selatan	6.851,20	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	33.013,00	-	-	-
29	Gorontalo	-	1.513,00	250,00	725,00	36.189,29
30	Sulawesi Barat	235,96	-	77,00	-	-
31	Maluku	215.453,06	211.030,00	249.008,00	174.837,00	139.132,47
32	Maluku Utara	95.258,53	131.947,00	118.903,00	87.901,00	268.189,93
33	Papua	463.470,30	574.748,00	548.402,00	276.893,00	119.158,54
34	Papua Barat	707.170,85	827.202,00	590.689,00	387.175,00	507.395,68
35	Papua Selatan	-	-	-	69.937,00	113.672,39
36	Papua Tengah	-	-	-	24.577,00	58.867,01
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	1.151,00	5.012,64
Total		50.661.576,25	52.483.838,00	54.325.550,00	57.341.829,00	54.730.862,01

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - HHK - HT = Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman; HHK - HA = Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam
 - - = Tidak ada produksi kayu bulat

Tabel 4.11

Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Pada PBPH Per Kelompok Jenis Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Pada PBPH Per Kelompok Jenis (Ton)													
		Atap	Bambu Hutan	Biji Kopi	Biji-bijian	Buah-buahan dan Umbi-umbian	Daun-daunan dan Akar-akaran	Getah Kayu Hutan	Hasil Sylvofishery System	Hasil Sylvopartural System	Kulit Kayu	Resin	Rotan	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	-	-	-	-	538,65	-	2.803,89	-	-	-	9,00	3.405,80	-	6.757,34
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	21.116,13	-	5.400,15	-	3.416,00	-	-	224,20	-	30.156,49
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	1.366,09	-	-	-	-	3.549,90	-	4.915,99
4	Riau	-	-	-	-	-	-	740,79	-	-	-	-	-	6.701,34	7.442,13
5	Jambi	-	-	-	-	1.068,00	-	8.832,48	-	-	-	2,00	-	298,02	10.200,49
6	Sumatera Selatan	-	-	143,33	-	-	458,27	883,34	-	-	-	1,00	-	7,17	1.493,11
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	227,50	-	-	-	-	-	-	227,50
8	Lampung	-	-	3.551,67	39,33	1.746,74	-	2.862,55	-	-	-	-	38,00	150.141,84	158.380,13
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	2.107,91	-	103,47	-	120,00	-	-	-	-	2.331,38
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	232,25	1.885,60	105,39	553,08	18.360,33	186,19	-	-	171,73	-	5.297,42	26.791,98
13	Jawa Tengah	-	142,77	878,53	18.685,73	1.240,35	449,50	40.644,64	-	-	-	122,21	-	73.331,77	135.495,49
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	2.168,75	-	-	-	-	-	-	-	2.168,75
15	Jawa Timur	-	269,91	2.522,67	38.095,50	4.122,43	5.247,38	30.765,94	-	1,33	8,40	109,63	-	158.373,73	239.516,93
16	Banten	-	41,28	9,82	182,40	10,95	-	208,30	5,73	-	-	-	-	-	458,48
17	Bali	-	-	56,58	380,55	126,10	60,00	70,58	-	-	-	-	-	86,50	780,30
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	142,35	101,20	166,80	-	-	-	-	-	-	-	35,70	446,05
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	87,39	-	-	1.545,57	-	-	-	-	-	-	1.632,96
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	2.028,33	-	5.437,97	-	-	-	-	-	-	7.466,30
21	Kalimantan Tengah	40.000,00	-	-	-	166.331,80	-	-	-	-	-	-	198,02	-	206.529,81

Lanjutan Tabel 4.11 Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Pada PBPH Per Kelompok Jenis Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Pada PBPH Per Kelompok Jenis (Ton)													Jumlah	
		Atap	Bambu Hutan	Biji Kopi	Biji-bijian	Buah-buahan dan Umbi-umbian	Daun-daunan dan Akar-akaran	Getal Kayu Hutan	Hasil Syl-vofishery System	Hasil Sylvo-partural System	Kulit Kayu	Resin	Rotan	Lain-lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	0,59	930,65	-	2.579,79	-	-	-	-	-	4,75	3.515,77	
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	167,13	-	-	-	-	-	-	167,13	
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,00	2.362,00	-	3.101,00	
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	4.697,27	-	-	-	12,70	561,40	2,38	5.273,74	
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	393,00	-	-	-	-	413,00	-	806,00	
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	146,68	-	-	-	-	78,00	-	224,68	
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	1.946,69	-	-	-	-	-	-	1.946,69	
31	Maluku	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	819,07	-	-	6.819,07	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,00	-	-	101,00	
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,30	-	-	-	14,30	
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00	
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	6,00	
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.142,98	4.142,98	
Jumlah		40.000,00	453,96	7.537,19	59.458,28	201.640,21	14.936,97	130.184,16	191,92	3.537,33	1.128,70	2.087,33	10.830,31	398.423,59	870.409,96	

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:
PBPH = Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- = Tidak ada produksi HHBK

Tabel 4.12 Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah PBPHH Skala Usaha Besar (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	1	1	1	1	1
2	Sumatera Utara	40	37	31	32	32
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	31	32	21	23	23
5	Jambi	33	34	25	28	25
6	Sumatera Selatan	18	18	11	12	12
7	Bengkulu	3	3	2	3	3
8	Lampung	11	10	9	9	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	1	1	-	-	-
11	DKI Jakarta	1	-	-	-	-
12	Jawa Barat	20	19	15	19	20
13	Jawa Tengah	115	122	121	133	134
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	1	1	1
15	Jawa Timur	157	152	143	161	154
16	Banten	5	4	4	4	5
17	Bali	1	1	1	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	17	13	10	12	11
21	Kalimantan Tengah	23	23	11	14	14
22	Kalimantan Selatan	31	20	16	18	16
23	Kalimantan Timur	45	46	25	28	28
24	Kalimantan Utara	7	7	3	3	4
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	1	1	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	6	6	5	5	3
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	1	2	2	2	2
30	Sulawesi Barat	2	2	-	-	1
31	Maluku	4	4	1	1	2
32	Maluku Utara	2	2	1	2	2
33	Papua	15	14	12	14	14
34	Papua Barat	15	16	14	13	13
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		607	591	485	539	530

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- = Tidak ada PBPH dengan skala usaha besar

Tabel 4.13 Jumlah Kapasitas Izin Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Kapasitas Izin Produksi Pemegang PBPBH (M ³ /Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Sumatera Utara	2.729.402,00	2.609.402,00	2.725.752,00	2.750.752,00	2.510.152,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	23.599.593,00	23.624.593,00	-	33.077.569,00	22.122.993,00
5	Jambi	9.096.070,00	9.114.070,00	9.451.570,00	9.805.070,00	8.684.988,00
6	Sumatera Selatan	11.856.840,00	11.856.840,00	14.038.885,00	14.038.885,00	11.565.340,00
7	Bengkulu	112.000,00	112.000,00	82.000,00	112.000,00	112.000,00
8	Lampung	672.500,00	575.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	119.000,00	119.000,00	33.004.069,00	-	-
11	DKI Jakarta	50.400,00	-	-	-	-
12	Jawa Barat	814.200,00	878.200,00	802.500,00	919.750,00	2.210.600,00
13	Jawa Tengah	7.385.201,00	8.008.151,00	7.828.780,00	8.186.980,00	8.347.001,00
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	73.200,00	73.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	Jawa Timur	8.972.173,00	9.303.393,00	9.297.353,00	9.736.913,00	9.530.811,00
16	Banten	638.210,00	553.210,00	553.210,00	553.210,00	571.210,00
17	Bali	18.000,00	45.367,60	45.300,00	45.300,00	45.367,60
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	2.161.603,00	1.966.503,00	1.348.775,00	1.476.725,00	1.414.375,00
21	Kalimantan Tengah	2.679.416,00	2.679.416,00	2.138.736,00	2.223.736,00	2.298.736,00
22	Kalimantan Selatan	4.306.919,00	3.651.369,00	1.412.219,00	1.480.619,00	1.873.419,00
23	Kalimantan Timur	11.037.464,00	11.097.464,00	7.437.109,00	8.051.108,00	9.473.596,00
24	Kalimantan Utara	1.824.972,45	1.824.972,45	305.000,00	305.000,00	2.005.000,00
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	36.000,00	36.000,00	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	642.960,00	642.960,00	597.910,00	597.910,00	456.410,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	6.000,00
29	Gorontalo	524.680,00	1.471.480,00	1.412.200,00	1.412.200,00	1.471.480,00
30	Sulawesi Barat	32.200,00	32.200,00	-	-	25.000,00
31	Maluku	494.700,00	494.700,00	132.000,00	132.000,00	146.000,00
32	Maluku Utara	511.200,00	906.872,00	662.000,00	897.200,00	906.872,00
33	Papua	3.651.632,00	3.634.632,00	3.088.632,00	3.334.632,00	3.622.632,00
34	Papua Barat	1.550.536,00	1.562.536,00	1.472.536,00	1.279.000,00	883.000,00
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		95.611.071,45	96.893.531,05	98.451.536,00	101.031.559,00	90.897.982,60

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPBH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- - = Tidak ada PPBPBH/ Izin produksi pemegang PBPBH

Tabel 4.14

Nilai Investasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Nilai Investasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Sumatera Utara	2.002.164.276.845	1.821.564.276.845	1.540.901.216.718	1.540.901.216.718	1.850.869.884.763
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	19.297.212.220.673	19.237.712.220.673	17.752.535.391.864	17.797.473.043.080	17.804.605.869.358
5	Jambi	2.920.674.820.102	2.933.574.820.102	2.242.785.117.774	2.408.805.117.774	2.477.273.532.274
6	Sumatera Selatan	6.911.508.103.551	6.911.508.103.551	6.821.396.550.535	6.821.396.550.535	6.848.673.050.535
7	Bengkulu	402.440.000.000	402.440.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	402.440.000.000
8	Lampung	794.782.875.000	653.782.875.000	475.092.875.000	475.092.875.000	455.782.875.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	212.002.700.000	212.002.700.000	-	-	-
11	DKI Jakarta	92.091.600.000	-	-	-	-
12	Jawa Barat	521.463.686.277	514.616.605.277	499.599.190.977	470.783.783.277	54.992.518.229.746
13	Jawa Tengah	4.267.554.053.008	5.612.489.960.484	5.792.935.177.167	5.781.712.261.167	6.231.111.317.793
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	9.691.450.000	9.691.450.000	29.351.318.000	29.351.318.000	29.351.318.000
15	Jawa Timur	5.830.265.551.359	5.777.818.675.768	5.510.768.617.014	5.896.569.602.028	5.474.611.914.878
16	Banten	248.947.827.148	232.715.112.059	232.715.112.059	232.715.112.059	233.715.112.059
17	Bali	7.509.500.000	106.061.427.000	106.061.427.000	106.061.427.000	106.061.427.000
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1.529.901.215.538	1.518.592.193.652	1.220.326.843.702	1.220.326.843.702	1.295.326.843.702
21	Kalimantan Tengah	2.653.333.768.011	2.653.333.768.011	2.357.417.999.106	2.388.717.999.106	2.455.322.752.402
22	Kalimantan Selatan	2.038.860.855.695	1.689.764.468.715	1.250.432.292.224	1.251.337.800.524	1.250.432.292.224
23	Kalimantan Timur	12.616.587.609.600	12.620.662.609.600	11.879.421.163.562	11.486.482.724.599	11.744.317.769.693
24	Kalimantan Utara	966.567.576.501	966.567.576.501	577.079.403.831	577.079.403.831	20.991.055.569.699
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	6.736.025.379	6.736.025.379	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	407.032.683.521	407.032.683.521	365.882.683.521	365.882.683.521	36.575.383.521
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	11.000.000.000
29	Gorontalo	1.255.000.000.000	1.678.000.000.000	1.678.000.000.000	1.678.000.000.000	1.678.000.000.000
30	Sulawesi Barat	19.964.175.000	19.964.175.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
31	Maluku	673.265.447.000	673.265.447.000	22.986.000.000	22.986.000.000	37.986.000.000
32	Maluku Utara	238.553.093.360	1.767.039.159.837	1.687.195.000.000	1.767.039.159.837	1.767.039.159.837
33	Papua	2.250.937.372.713	2.351.937.372.713	2.349.508.692.713	2.349.508.692.713	2.363.708.692.713
34	Papua Barat	1.009.394.027.342	1.011.394.027.342	859.194.027.342	845.637.138.093	944.637.138.093
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		69.194.442.513.624	71.800.267.734.031	65.278.686.100.109	65.540.960.752.564	141.504.416.133.290

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- Data dihitung akumulatif mulai tahun 2005 s.d. 2024
- Kep. Riau, izin dicabut tahun 2022
- DKI Jakarta, izin dicabut di akhir 2020
- Sulawesi Tengah, izin dicabut tahun 2022
- Sulawesi Tenggara, izin baru ada pada tahun 2024
- = Tidak ada izin/ Tidak ada nilai investasi
- Data Kinerja Pertahun

Tabel 4.15 Jumlah Tenaga Kerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Tenaga Kerja PBPHH (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	50	50	50	50	50
2	Sumatera Utara	13.739	12.165	13.234	13.234	10.351
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	27.640	28.012	20.986	23.262	22.303
5	Jambi	20.547	20.587	16.787	16.879	12.931
6	Sumatera Selatan	7.677	7.677	4.380	4.380	5.540
7	Bengkulu	1.011	1.011	821	821	1.011
8	Lampung	4.820	2.793	2.327	2.327	2.079
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	1.578	1.578	-	-	-
11	DKI Jakarta	696	-	-	-	-
12	Jawa Barat	9.589	9.574	9.261	9.186	12.347
13	Jawa Tengah	63.991	67.084	69.007	69.277	69.967
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	469	469	559	559	559
15	Jawa Timur	86.869	86.642	85.017	85.959	79.451
16	Banten	8.760	6.124	6.124	6.124	6.623
17	Bali	200	182	182	182	182
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	16.574	14.602	10.929	10.929	10.969
21	Kalimantan Tengah	10.118	10.118	5.555	5.863	6.190
22	Kalimantan Selatan	26.916	15.855	13.420	13.490	13.420
23	Kalimantan Timur	29.483	29.719	22.038	24.843	23.406
24	Kalimantan Utara	4.573	4.573	3.950	3.950	4.623
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	221	221	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	5.569	5.569	5.446	5.446	3.148
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	30
29	Gorontalo	170	746	746	746	746
30	Sulawesi Barat	231	231	-	-	220
31	Maluku	5.889	5.889	538	538	658
32	Maluku Utara	3.504	5.725	3.815	5.725	5.725
33	Papua	7.424	7.459	7.414	7.414	7.442
34	Papua Barat	4.606	4.631	3.379	3.183	4.083
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		362.914	349.286	305.965	314.367	304.054

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Desember 2024

- Keterangan:
- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
 - = Tidak ada tenaga kerja

Tabel 4.16

Jumlah Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Realisasi Pemenuhan Bahan Baku PBPHH Skala Usaha Besar (M ³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	2.042.727,17	1.810.893,07	2.071.584,06	1.912.613,36	1.680.786,43
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	27.751.648,78	28.110.317,52	28.379.431,13	32.410.297,72	32.033.328,87
5	Jambi	4.412.695,14	4.412.789,88	4.540.109,51	4.584.641,28	4.704.651,91
6	Sumatera Selatan	13.473.706,92	13.398.845,42	14.347.951,63	14.907.570,68	13.984.560,56
7	Bengkulu	-	-	-	4.476,96	8.436,27
8	Lampung	193.473,72	222.687,98	277.093,79	215.515,11	269.621,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	161.026,20	232.838,60	233.414,29	156.393,66	152.668,49
13	Jawa Tengah	2.637.578,62	3.590.706,65	3.834.402,04	3.736.058,02	3.344.681,84
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	18.721,71	20.175,17	12.144,97	11.290,28	7.916,79
15	Jawa Timur	3.264.207,83	4.244.440,96	4.510.112,52	4.051.573,84	4.148.467,45
16	Banten	35.326,49	62.707,04	173.617,02	135.408,39	92.301,36
17	Bali	14.386,76	16.706,70	15.841,97	26.392,86	19.726,30
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	515.939,24	454.564,81	541.757,62	213.055,01	209.498,91
21	Kalimantan Tengah	1.017.788,10	1.287.947,41	1.235.790,94	1.320.162,45	1.302.809,96
22	Kalimantan Selatan	1.057.731,83	1.078.291,17	882.184,46	760.044,21	826.135,43
23	Kalimantan Timur	576.090,18	1.343.155,24	1.315.951,19	1.409.999,35	1.308.739,59
24	Kalimantan Utara	309.235,11	274.292,98	295.745,11	260.253,92	415.400,73
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	215.168,59	195.300,97	148.410,50	8.165,40	27.381,82
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	22.238,76	84.853,52	249.606,92
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	7.535,33	8.280,43	6.991,00	6.658,85	505,06
32	Maluku Utara	-	-	-	19.951,35	165.807,15
33	Papua	615.933,87	791.999,67	728.809,08	343.018,74	407.507,53
34	Papua Barat	167.880,64	178.247,58	156.453,24	130.310,81	11.801,69
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	59.820,04
Jumlah		58.488.802,23	61.735.189,25	63.730.034,83	66.708.705,77	65.432.163,01

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- - = Tidak ada izin PBPHH dengan skala usaha besar

Tabel 4.17 Jumlah Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar (M ³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	14.326,00	17.856,20
2	Sumatera Utara	2.062.754,92	1.850.592,44	2.122.541,64	2.054.446,00	1.846.844,65
3	Sumatera Barat	-	-	-	5.524,00	1.400,12
4	Riau	27.532.167,51	28.824.411,39	28.299.576,08	31.491.258,00	31.420.254,22
5	Jambi	4.481.971,28	4.484.481,68	4.506.061,93	4.652.235,00	4.681.845,86
6	Sumatera Selatan	14.042.052,18	13.481.064,84	14.087.217,61	14.089.232,00	14.212.547,09
7	Bengkulu	-	-	-	1.116,00	8.049,35
8	Lampung	286.711,21	218.133,77	260.741,54	306.523,00	382.787,46
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	597,00	703,38
10	Kepulauan Riau	-	-	-	2.438,00	2.523,73
11	DKI Jakarta	-	-	-	1.020,00	444,04
12	Jawa Barat	200.000,53	231.724,75	211.509,65	198.267,00	189.888,76
13	Jawa Tengah	2.644.191,92	3.157.950,83	3.516.665,04	3.798.947,00	3.750.597,40
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	18.899,49	19.676,82	11.442,14	25.945,00	23.162,48
15	Jawa Timur	3.376.715,67	4.097.873,33	4.206.786,67	4.316.186,00	4.423.895,18
16	Banten	42.617,14	61.750,71	163.768,00	160.145,00	130.939,76
17	Bali	18.781,25	16.891,13	17.497,90	24.820,00	24.680,64
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2.867,11
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	445.082,75	462.336,32	454.179,07	245.911,00	192.475,84
21	Kalimantan Tengah	1.017.860,20	1.319.065,20	1.259.029,25	1.419.105,00	1.395.136,86
22	Kalimantan Selatan	1.009.436,13	1.011.163,31	806.714,92	774.283,00	918.327,50
23	Kalimantan Timur	666.032,72	1.288.946,58	1.330.521,07	1.511.682,00	1.354.255,29
24	Kalimantan Utara	305.460,21	267.233,19	230.009,69	258.915,00	303.036,63
25	Sulawesi Utara	-	-	-	60,00	149,86
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	36.268,00	13.380,11
27	Sulawesi Selatan	243.349,25	187.677,61	-	5.888,00	33.400,64
28	Sulawesi Tenggara	-	-	158.316,35	32.256,00	24.533,83
29	Gorontalo	-	-	21.086,34	85.772,00	236.807,93
30	Sulawesi Barat	-	-	-	849,00	651,34
31	Maluku	10.545,44	8.234,22	7.825,09	14.656,00	6.001,27
32	Maluku Utara	-	-	-	22.671,00	158.848,99
33	Papua	672.568,10	801.927,36	697.038,02	394.440,00	445.943,29
34	Papua Barat	190.873,03	163.819,45	164.943,46	129.699,00	33.018,15
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	367,10
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	76.883,18
Jumlah		59.268.070,94	61.954.954,93	62.533.471,46	66.075.480,00	66.314.505,25

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

- Keterangan :
- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
 - PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
 - = Tidak ada penggunaan bahan baku kayu bulat

Tabel 4.18 Jumlah Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar Per Jenis Produksi Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Produksi	Jumlah Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar (M ³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Kayu Lapis dan LVL	6.139.074,67	7.038.734,44	7.298.296,76	6.269.165,00	6.453.496,65
2	Veneer	2.044.602,12	2.297.878,18	2.277.777,08	2.190.203,00	2.122.727,30
3	Kayu Gergajian	2.893.599,84	2.964.266,59	2.740.516,96	3.791.794,00	3.806.701,05
4	Serpih Kayu dan Pulp	47.992.376,27	49.403.248,67	49.613.936,45	53.106.830,00	53.046.415,56
5	Produk Lain	198.418,04	250.827,05	602.944,20	717.488,00	885.164,69
Jumlah		59.268.070,94	61.954.954,93	62.533.471,46	66.075.480,00	66.314.505,25

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan

Tabel 4.19 Jumlah Produksi Plywood Dan Laminated Veneer Lumber (LVL) Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Volume Produksi Plywood Dan Laminated Veneer Lumber (LVL) Dari PBPHH Skala Usaha Besar (M ³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	41.623,16	50.573,29	50.300,12	39.899,02	20.796,28
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	36.929,47	40.963,54	36.871,72	28.828,49	11.864,76
5	Jambi	100.944,81	111.815,59	125.389,30	114.839,93	109.682,85
6	Sumatera Selatan	15.537,60	14.804,32	14.735,35	13.257,19	14.040,34
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	13.643,13	21.836,19	23.189,51	29.705,91	28.206,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	42.772,30	62.136,52	65.470,37	49.919,27	61.932,48
13	Jawa Tengah	785.151,96	1.117.553,42	1.052.991,22	1.033.675,18	1.085.247,45
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.044,36	717,28	1.062,29	120,27	176,61
15	Jawa Timur	1.008.950,67	1.468.340,23	1.486.096,06	90.217,30	1.463.758,82
16	Banten	112.296,67	121.252,50	113.956,88	90.253,57	21.571,85
17	Bali	1.816,39	3.567,72	3.036,01	2.914,04	2.153,07
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	180.741,52	198.600,60	195.293,14	103.059,98	78.409,15
21	Kalimantan Tengah	69.183,75	85.325,01	72.187,31	78.273,16	109.431,78
22	Kalimantan Selatan	483.091,10	482.081,73	317.124,79	281.081,04	331.057,94
23	Kalimantan Timur	282.682,53	266.175,75	213.517,00	90.217,30	44.168,34
24	Kalimantan Utara	115.296,54	113.999,88	99.228,29	101.295,53	102.128,04
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	73.634,10	64.584,33	45.995,21	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	5.926,50	3.891,02	5.138,98	3.663,74	796,29
32	Maluku Utara	-	-	-	-	3.191,04
33	Papua	137.425,06	162.884,10	133.534,84	36.951,47	62.044,92
34	Papua Barat	142,88	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		3.508.834,50	4.391.103,03	4.055.118,39	2.188.172,38	3.550.658,00

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- = Tidak ada produksi plywood dan LVL

Tabel 4.20 Jumlah Produksi Veneer Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Veneer Dari PBPHH Skala Usaha Besar (M ³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	16.512,93	21.764,68	24.104,04	16.568,80	24.427,41
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	10.759,59	-	-	-	-
5	Jambi	32.503,45	43.391,62	46.502,06	38.750,70	43.739,89
6	Sumatera Selatan	41.104,49	28.454,79	51.086,08	39.531,28	36.435,62
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	26.317,64	28.617,80	30.806,56	28.575,21	18.425,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	36.486,44	47.534,48	36.859,34	21.907,24	23.931,78
13	Jawa Tengah	287.457,40	393.339,89	402.741,49	361.909,86	364.374,39
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	447.432,01	625.327,36	507.366,86	459.543,87	431.194,80
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	760,92	3.698,75	3.412,36	2.936,24
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	3.404,44	4.112,57	4.947,37	2.175,51	-
21	Kalimantan Tengah	28.304,41	32.086,54	31.719,70	43.358,14	48.156,07
22	Kalimantan Selatan	18.813,47	30.652,64	50.171,32	25.550,33	22.991,57
23	Kalimantan Timur	13.680,28	48.709,73	37.712,84	43.358,14	30.683,48
24	Kalimantan Utara	376,10	1.744,23	3.663,27	1.955,46	806,20
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	59.465,78	51.881,08	35.414,46	2.071,57	16.286,90
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	5.310,76	4.963,56	4.668,06	4.433,38	390,74
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	65.927,96	77.214,31	84.489,46	57.516,83	54.629,17
34	Papua Barat	6.606,72	-	5.042,35	4.524,20	3.986,51
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		1.100.463,87	1.440.556,19	1.360.994,00	1.155.142,88	1.123.396,58

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- = Tidak ada produksi veneer

Tabel 4.21 Jumlah Produksi Kayu Gergajian Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Kayu Gergajian Dari PBPHH Skala Usaha Besar (M³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	153.197,48	143.137,17	164.219,52	145.719,01	113.548,77
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	73.238,29	76.415,85	78.623,35	56.634,89	57.968,85
5	Jambi	19.593,76	24.971,30	34.073,53	22.861,18	28.980,36
6	Sumatera Selatan	8.242,60	23.897,92	45.350,12	64.602,98	64.183,18
7	Bengkulu	-	-	-	-	2.157,44
8	Lampung	29.921,23	32.076,11	27.641,82	29.705,91	29.912,22
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	12.970,40	11.272,98	9.093,44	10.482,67	24.549,03
13	Jawa Tengah	341.521,86	415.294,57	343.440,79	322.083,56	332.582,86
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	298,66	-	-	-	-
15	Jawa Timur	580.327,80	650.010,26	508.637,29	535.022,04	521.633,65
16	Banten	188,69	3.938,15	3.145,75	7.333,09	7.638,55
17	Bali	7.951,00	6.102,09	6.312,94	10.627,77	11.242,34
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	10.439,51	10.525,97	8.235,34	4.606,58	9.581,30
21	Kalimantan Tengah	22.164,50	17.617,39	17.178,73	16.271,35	15.591,78
22	Kalimantan Selatan	1.506,33	1.631,39	1.461,96	6.252,01	16.082,54
23	Kalimantan Timur	38.406,93	45.839,42	38.263,27	19.926,25	23.081,40
24	Kalimantan Utara	21.253,03	14.972,74	8.676,15	15.375,40	22.079,03
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	5.808,57	2.267,59	1.846,30	66,96	235,24
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	346,76	264,18	244,15	362,11	22,66
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	114.308,09	134.521,63	118.831,40	94.670,94	104.342,69
34	Papua Barat	79.107,61	77.189,38	85.601,50	55.319,59	37.657,28
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	13.590,23
Jumlah		1.520.793,10	1.691.946,10	1.500.877,36	1.417.924,29	1.436.661,42

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
 - PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
 - = Tidak ada produksi kayu gergajian

Tabel 4.22 Jumlah Produksi Serpih Kayu Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Serpih Kayu Dari PBPHH Skala Usaha Besar (M³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1.407.863,12	1.270.547,21	-	1.294.123,37	1.149.435,81
3	Sumatera Barat	-	-	1.427.222,60	-	-
4	Riau	21.858.266,68	23.078.850,58	22.665.904,42	24.723.081,73	24.356.602,55
5	Jambi	3.412.007,12	3.700.438,54	3.724.469,59	3.835.943,74	3.774.103,99
6	Sumatera Selatan	10.488.225,50	10.419.985,03	10.603.808,29	10.877.418,83	10.627.637,40
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	58.890,43	53.528,24	99.837,59	57.283,28	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	290,50	290,50	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	5,00	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	657.597,61	958.600,77	939.076,30	959.118,27	923.292,38
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	10,77
23	Kalimantan Timur	14,77	296.919,60	282.571,80	457.837,01	530.139,93
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	22.876,91
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	44,36	90,89	-	88,50
34	Papua Barat	36.310,64	25.353,04	9.196,00	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		37.919.466,37	39.804.557,87	39.752.182,48	42.204.805,00	41.384.188,24

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- = Tidak ada produksi serpih kayu

Tabel 4.23 Jumlah Produksi Pulp Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Produksi Pulp Dari PBPHH Skala Usaha Besar (M³)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	205.932,91	200.191,97	198.429,43	153.623,89	142.584,82
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	4.422.886,66	4.631.010,31	4.766.233,96	5.653.559,08	5.884.057,72
5	Jambi	1.026.345,42	1.051.651,86	1.035.043,55	1.043.569,00	1.064.821,84
6	Sumatera Selatan	2.937.275,21	2.714.729,33	2.871.384,10	2.937.968,12	3.063.302,74
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		8.592.440,20	8.597.583,47	8.871.091,04	9.788.720,09	10.154.767,12

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan hasil hutan skala usaha besar terdiri dari pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6000M³/Tahun atau lebih
- PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- - = Tidak ada produksi pulp

Tabel 4.24 Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Negara Tujuan Tahun 2020 - 2024

No	Negara Tujuan	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Negara Tujuan (USD)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	China	3.185.767.925,58	3.955.915.971,67	3.475.025.871,58	3.365.820.478,97	3.415.342.322,07
2	United States	1.615.367.594,05	2.420.303.315,32	2.242.290.185,66	1.648.879.968,82	1.899.783.173,59
3	Japan	1.148.104.899,39	1.390.205.987,76	1.529.323.145,79	1.244.114.327,33	1.165.948.540,84
4	The European Union	777.626.897,69	883.857.102,16	979.819.803,58	795.387.576,11	881.026.624,83
5	Korea, Republic Of	689.319.244,88	762.297.897,21	806.918.068,89	666.784.453,71	638.693.314,10
6	India	324.940.947,90	386.802.951,01	542.954.362,91	729.901.737,33	636.338.483,93
7	Malaysia	291.477.448,01	386.205.220,10	425.343.486,43	391.495.475,86	373.810.030,53
8	Australia	347.542.800,74	400.145.460,90	384.145.305,63	340.446.755,15	344.573.139,70
9	Vietnam	251.862.250,34	360.072.943,24	355.357.764,56	396.954.281,95	339.315.751,63
10	United Kingdom	217.036.600,44	274.424.316,61	269.153.115,23	259.252.620,15	253.986.914,68
11	Taiwan, Province Of China	323.963.485,44	313.562.147,76	320.620.379,94	306.132.663,39	274.002.626,98
12	Philippines	216.250.881,66	247.259.949,17	268.851.075,15	252.003.349,45	244.598.536,70
13	Saudi Arabia	184.784.811,38	142.075.397,42	203.858.148,22	204.601.497,53	224.963.969,60
14	United Arab Emirates	130.192.645,31	166.334.953,01	235.475.421,66	251.003.293,39	236.910.059,83
15	Thailand	134.182.726,97	170.236.147,85	198.907.540,36	171.825.275,38	152.664.839,96
16	Bangladesh	107.821.399,48	135.680.186,20	136.150.000,76	148.843.947,48	137.224.098,39
17	Turkey	38.574.666,54	71.676.566,15	225.755.486,15	74.548.583,47	67.653.085,89
18	Singapore	83.691.430,66	98.581.728,14	97.067.705,00	91.098.566,48	78.029.089,69
19	Mexico	50.158.176,99	59.503.686,66	202.764.611,03	118.184.880,68	78.698.783,33
20	Pakistan	61.482.064,37	74.170.221,98	81.572.912,77	57.297.417,67	62.194.148,89
21	Lain-Lain	869.775.020,75	863.414.344,59	1.223.767.569,00	1.241.058.588,79	1.086.043.452,87
Jumlah		11.049.923.918,57	13.562.726.494,91	14.205.121.960,30	12.755.635.739,09	12.591.800.988,03

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Desember 2024

Tabel 4.25 Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Jenis Produk Tahun 2020 - 2024

No	Produk	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan (USD)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Panel	2.163.012.329,81	3.065.547.871,70	2.903.982.091,69	2.205.171.489,76	2.279.877.881,34
2	Kertas	3.527.854.476,30	3.698.469.635,93	4.313.240.484,78	4.313.335.730,03	3.981.305.565,49
3	Pulp	2.530.024.570,99	3.242.940.925,11	3.717.872.440,06	3.451.207.765,89	3.558.126.318,23
4	Woodworking	1.075.495.368,27	1.185.054.333,86	963.972.615,78	900.774.028,31	847.768.694,50
5	Serpih Kayu (Chipwood)	50.450.382,16	99.032.121,08	98.439.013,06	164.940.790,50	179.420.889,12
6	Veneer	80.660.079,50	114.626.727,23	115.459.687,49	132.494.854,19	120.356.760,57
7	Furnitur Kayu	1.533.908.961,44	2.045.964.304,05	1.979.295.605,74	1.491.384.927,00	1.532.702.453,28
8	Bangunan Prefabrikasi	2.030.294,55	2.075.374,44	2.847.181,60	2.775.930,72	4.490.617,18
9	Kerajinan Kayu	86.487.455,54	109.015.201,50	110.012.840,10	93.550.222,69	87.751.808,32
Jumlah		11.049.923.918,57	13.562.726.494,91	14.205.121.960,30	12.755.635.739,09	12.591.800.988,03

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Desember 2024

Tabel 4.26 Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan (USD)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	238.234.730,86	283.447.144,97	274.473.005,62	203.082.859,88	225.954.374,01
3	Sumatera Barat	479.346,15	494.399,74	853.381,31	432.215,12	57.993,02
4	Riau	530.377.181,71	502.776.253,92	590.259.549,54	561.595.048,99	800.507.474,00
5	Jambi	182.529.391,59	85.140.303,35	65.677.535,21	153.099.371,85	109.578.914,89
6	Sumatera Selatan	1.251.969.960,97	1.405.689.270,92	1.707.753.294,29	1.518.436.322,49	1.513.632.939,64
7	Bengkulu	1.012.703,76	-	-	489.348,32	1.163.635,11
8	Lampung	16.412.181,03	24.427.821,81	25.263.968,14	25.430.476,49	26.524.670,83
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	67.112,42
10	Kepulauan Riau	62.678.671,58	64.355.166,99	24.111.935,19	17.182.049,83	29.094.240,42
11	DKI Jakarta	4.123.584.661,63	5.124.585.440,10	5.767.501.003,56	5.626.264.046,70	5.226.699.109,80
12	Jawa Barat	377.017.711,34	463.260.467,34	471.055.664,14	357.254.379,39	367.637.661,93
13	Jawa Tengah	1.413.333.226,26	1.910.038.452,19	1.840.086.868,69	1.570.152.547,17	1.544.051.743,15
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	57.237.117,32	71.285.716,39	64.065.541,95	52.994.935,15	64.372.915,34
15	Jawa Timur	1.757.220.378,97	2.297.081.099,85	2.194.152.165,24	1.816.937.271,06	1.852.296.432,78
16	Banten	205.154.755,40	283.196.746,31	278.464.186,30	232.544.128,75	203.628.263,92
17	Bali	68.898.956,42	81.927.578,03	104.443.888,25	90.030.422,24	94.556.148,77
18	Nusa Tenggara Barat	17.791,69	286.253,54	-	4.492,50	-
19	Nusa Tenggara Timur	536.681,24	710.818,25	1.144.771,75	1.340.566,68	1.243.939,26
20	Kalimantan Barat	92.372.219,45	149.699.315,82	148.331.476,09	64.037.910,20	59.345.955,39
21	Kalimantan Tengah	51.239.178,53	68.462.870,73	62.733.351,13	85.769.409,53	67.824.245,25
22	Kalimantan Selatan	252.306.565,24	326.465.594,97	251.780.432,77	134.458.731,40	148.422.633,03
23	Kalimantan Timur	141.785.894,20	179.031.682,02	164.813.123,72	126.987.993,43	95.809.315,98
24	Kalimantan Utara	58.933.924,91	45.864.271,99	45.440.043,92	33.533.681,96	33.323.129,99
25	Sulawesi Utara	-	-	16.224,00	42.138,00	15.259,80
26	Sulawesi Tengah	1.293.203,12	1.058.858,98	860.971,23	898.790,31	450.993,82
27	Sulawesi Selatan	25.226.840,80	5.369.490,68	5.759.275,63	4.556.360,91	3.579.168,99
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	3.204.193,67	12.990.019,20	26.994.672,36
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	3.390.119,98	2.485.893,54	2.972.207,99	1.657.709,73	324.211,72
32	Maluku Utara	-	-	-	-	6.656.204,14
33	Papua	10.439.237,52	18.379.666,19	98.967.912,03	56.583.717,35	83.388.729,49
34	Papua Barat	126.241.286,90	167.205.916,30	10.935.988,95	6.848.794,46	4.598.898,78
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		11.049.923.918,57	13.562.726.494,91	14.205.121.960,30	12.755.635.739,09	12.591.800.988,03

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada ekspor/nilai ekspor

Tabel 4.27

Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang Memiliki Sertifikasi Legalitas Dan Kelestarian Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah PBPHH yang Memiliki Sertifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	2	2
2	Sumatera Utara	8	17	22	25	27
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	3
4	Riau	1	4	8	10	10
5	Jambi	5	8	12	14	18
6	Sumatera Selatan	1	3	5	7	7
7	Bengkulu	1	1	1	1	1
8	Lampung	2	4	5	7	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	8	14	15	15	15
12	Jawa Barat	10	19	29	31	34
13	Jawa Tengah	40	99	138	150	162
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	1	1	1
15	Jawa Timur	52	132	184	214	232
16	Banten	3	9	13	14	15
17	Bali	-	-	2	3	4
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	3	4	6	9	13
21	kalimantan Tengah	13	14	20	30	34
22	Kalimantan Selatan	12	15	22	27	30
23	Kalimantan Timur	14	21	28	33	39
24	Kalimantan Utara	1	1	1	1	2
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	1	1	9	9	9
27	Sulawesi Selatan	6	6	7	7	7
28	Sulawesi Tenggara	-	-	1	1	1
29	Gorontalo	-	1	3	4	4
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	1	3	4	5
32	Maluku Utara	-	-	1	7	7
33	Papua	5	8	10	13	15
34	Papua Barat	5	8	12	15	16
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	1	3	3	3	3
Jumlah		193	394	561	657	723

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:

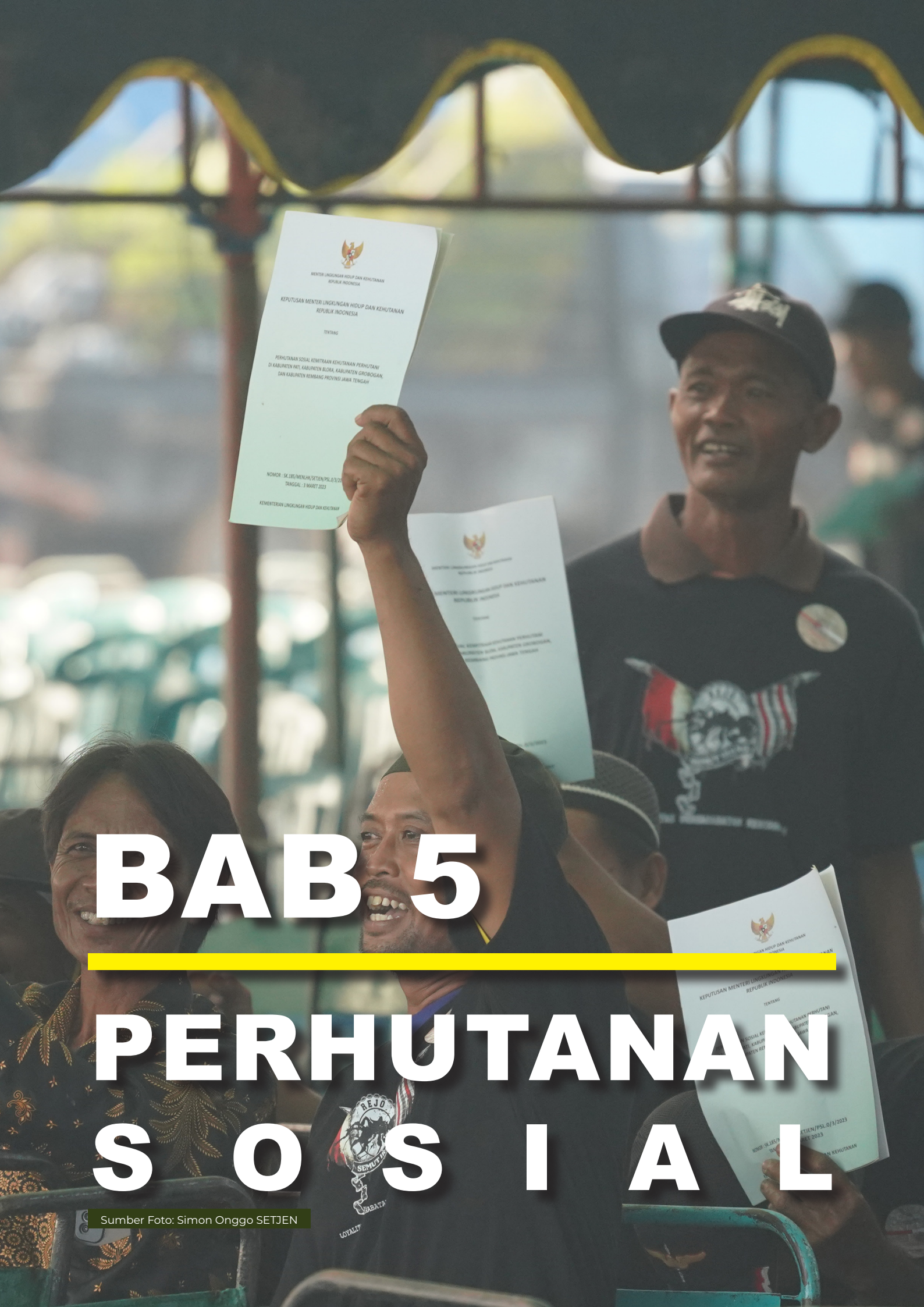
- Mencakup PBPHH Skala Usaha Besar, PBPHH Skala Usaha Menengah, PBPHH Skala Usaha Kecil.
- - = Tidak ada SLK

Tabel 4.28 Jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Yang Memiliki Sertifikasi Legalitas Dan Kelestarian Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah PBPH Yang Memiliki Sertifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	1	1	3	3
2	Sumatera Utara	2	5	6	8	8
3	Sumatera Barat	1	2	9	13	17
4	Riau	8	11	13	19	20
5	Jambi	8	9	10	14	17
6	Sumatera Selatan	1	1	1	4	8
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	1	1	3	12	19
12	Jawa Barat	3	3	6	7	7
13	Jawa Tengah	13	31	44	57	61
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	12	17	24	40	42
16	Banten	-	-	2	2	2
17	Bali	1	1	2	2	2
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	6	7	12	19	19
21	kalimantan Tengah	3	10	16	28	36
22	Kalimantan Selatan	3	9	13	13	13
23	Kalimantan Timur	2	6	11	18	26
24	Kalimantan Utara	-	1	1	4	5
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	1	3	5	11	11
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	2
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	1	2	3	5
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	1	3	4	6	7
32	Maluku Utara	2	5	7	12	13
33	Papua	2	9	11	16	20
34	Papua Barat	2	5	5	6	10
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	1	1
Jumlah		72	141	208	318	374

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada SLK



BAB 5

PERHUTANAN S O S I A L

Sumber Foto: Simon Onggo SETJEN

PERHUTANAN SOSIAL

1.852.523,99^{Ha}

JUMLAH LUAS PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2024

Sumber Foto: Donny Heru Kristianto - TN Lore Lindu

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Kehutanan yang memiliki mandat utama dalam memperkuat keadilan akses kelola hutan bagi masyarakat serta mendorong pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan, partisipasi, dan kearifan lokal. Tugas pokok Ditjen PS mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhutanan sosial, serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Jumlah
Pembentukan
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial
Tahun 2024

1.078
KUPS



JUMLAH CAPAIAN SURAT KEPUTUSAN PERHUTANAN SOSIAL S.D. TAHUN 2024



156 SK
HUTAN ADAT



2.367 SK
HUTAN DESA



3.428 SK
HUTAN KEMASYARAKATAN



1.195 SK
KEMITRAAN KEHUTANAN



2.821 SK
HUTAN TANAMAN RAKYAT

33 KONFLIK

JUMLAH PENANGANAN KONFLIK TENURIAL
DI KAWASAN HUTAN TAHUN 2024



1.183



447

JUMLAH PENDAMPING LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN KELOMPOK PERHUTANAN
SOSIAL TAHUN 2024

JUMLAH SURAT KEPUTUSAN PERHUTANAN SOSIAL S.D. TAHUN 2024

9.967 SK

BIRU

8.698

PERAK

5.445

EMAS

1.290

PLATINA

83

JUMLAH KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN KELAS S.D.
TAHUN 2024

Tabel 5.1 Luas Pemberian Akses Kelola Masyarakat Terhadap Hutan s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial (Ha)	
		PIAPS	Realisasi
1	2	3	4
1	Aceh	490.655,96	292.611,27
2	Sumatera Utara	595.772,17	119.517,60
3	Sumatera Barat	754.070,31	357.977,29
4	Riau	628.492,46	177.863,87
5	Jambi	349.630,12	270.182,42
6	Sumatera Selatan	411.400,57	149.479,41
7	Bengkulu	151.883,55	91.728,19
8	Lampung	366.836,11	235.871,15
9	Kepulauan Bangka Belitung	126.771,45	49.840,97
10	Kepulauan Riau	152.051,85	34.183,00
11	DKI Jakarta	-	34,72
12	Jawa Barat	68.614,42	86.556,64
13	Jawa Tengah	102.095,09	161.750,46
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.418,15	1.879,64
15	Jawa Timur	193.448,69	197.889,24
16	Banten	14.657,06	29.790,79
17	Bali	30.556,83	30.378,89
18	Nusa Tenggara Barat	303.667,99	77.734,43
19	Nusa Tenggara Timur	520.874,85	84.938,38
20	Kalimantan Barat	1.627.942,46	911.883,42
21	Kalimantan Tengah	1.474.055,17	507.539,92
22	Kalimantan Selatan	291.214,19	101.844,25
23	Kalimantan Timur	1.210.903,70	345.272,62
24	Kalimantan Utara	606.622,59	547.268,25
25	Sulawesi Utara	130.635,04	47.734,35
26	Sulawesi Tengah	470.057,28	262.186,81
27	Sulawesi Selatan	733.385,14	445.065,89
28	Sulawesi Tenggara	307.902,96	164.185,99
29	Gorontalo	104.161,16	32.307,35
30	Sulawesi Barat	134.697,44	69.279,39
31	Maluku	295.944,04	246.115,43
32	Maluku Utara	281.880,40	307.425,68
33	Papua	162.424,30	164.240,86
34	Papua Barat	253.446,00	446.481,00
35	Papua Selatan	1.451.922,57	840.787,84
36	Papua Tengah	195.870,51	9.962,00
37	Papua Pegunungan	108.525,22	6.070,94
38	Papua Barat Daya	253.216,37	394.257,00
Jumlah		15.359.704,15	8.300.117,35

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Desember 2024

Keterangan :
· PIAPS = Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
· (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.2 Jumlah Luas Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun s.d. 2024

No	Provinsi	Luas Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)					Jumlah
		2007-2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	221.568,40	14.659,00	-	37.162,20	14.019,00	287.408,60
2	Sumatera Utara	65.662,68	8.386,76	7.453,68	9.398,72	26.905,64	117.807,48
3	Sumatera Barat	231.744,72	9.033,49	54.518,49	38.121,27	21.905,41	355.323,38
4	Riau	126.430,54	1.024,00	13.371,00	21.566,94	9.979,30	172.371,78
5	Jambi	219.428,47	3.694,64	14.485,31	3.905,10	5.362,20	246.875,72
6	Sumatera Selatan	120.996,21	964,00	11.429,68	2.213,00	4.902,83	140.505,72
7	Bengkulu	72.974,16	2.168,00	1.188,00	11.182,00	3.282,00	90.794,16
8	Lampung	214.052,87	11.309,87	2.803,29	6.392,69	149,07	234.707,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	38.188,72	3.214,73	5.060,58	1.319,94	2.057,00	49.840,97
10	Kepulauan Riau	32.304,00	701,00	-	869,00	309,00	34.183,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0,00
12	Jawa Barat	34.953,70	3.534,18	293,00	13.368,08	29.844,56	81.993,52
13	Jawa Tengah	35.470,79	54.935,43	-	10.201,87	1.487,00	102.095,09
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.565,88	-	-	-	-	1.565,88
15	Jawa Timur	138.159,65	37.958,74	-	17.330,30	132,00	193.580,69
16	Banten	19.259,99	409,07	4.834,00	-	5.051,00	29.554,06
17	Bali	18.043,15	3.719,32	2.006,36	1.383,21	4.938,94	30.090,98
18	Nusa Tenggara Barat	35.632,01	7.067,19	10.498,65	12.954,15	9.849,40	76.001,40
19	Nusa Tenggara Timur	53.155,29	5.556,34	13.029,00	3.688,20	5.231,00	80.659,83
20	Kalimantan Barat	574.930,78	67.237,51	48.909,00	65.298,00	144.980,00	901.355,29
21	Kalimantan Tengah	270.786,20	5.855,00	18.183,20	124.941,19	81.337,00	501.102,59
22	Kalimantan Selatan	53.223,02	25.457,00	14.132,00	4.313,00	3.853,23	100.978,25
23	Kalimantan Timur	205.530,63	22.069,89	60.262,05	35.331,61	22.028,44	345.222,62
24	Kalimantan Utara	468.382,75	36.876,96	10.227,00	6.930,96	6.798,00	529.215,67
25	Sulawesi Utara	36.970,16	3.103,19	-	7.072,00	589,00	47.734,35
26	Sulawesi Tengah	185.617,69	28.812,00	3.336,00	14.519,25	8.564,20	240.849,14
27	Sulawesi Selatan	294.896,22	14.975,19	21.009,42	12.608,00	14.953,60	358.442,43
28	Sulawesi Tenggara	87.802,32	13.618,01	4.685,00	15.971,60	15.912,00	137.988,93
29	Gorontalo	18.484,01	5.329,00	6.104,52	568,32	1.674,00	32.159,85
30	Sulawesi Barat	46.698,06	499,00	9.985,00	3.933,00	8.164,33	69.279,39
31	Maluku	186.445,00	2.665,96	8.110,00	38.996,00	4.714,00	240.930,96
31	Maluku Utara	142.234,00	32.453,00	36.917,00	27.887,00	67.012,00	306.503,00
32	Papua	95.036,30	33.799,00	25.987,00	1.585,00	3.171,00	159.578,30
34	Papua Barat	61.250,00	34.146,00	24.812,00	9.115,00	293.945,00	423.268,00
35	Papua Selatan	-	-	-	22.669,00	818.118,84	840.787,84
36	Papua Tengah	-	-	-	9.962,00	-	9.962,00
37	Papua Pegunungan	1.521,00	2.204,00	-	-	-	3.725,00
38	Papua Barat Daya	-	-	-	182.953,00	211.304,00	394.257,00
Jumlah		4.409.399,37	497.436,47	433.630,23	775.710,60	1.852.523,99	7.968.700,66

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :

- Hingga akhir Desember 2024 telah didistribusikan akses sumber daya dari kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial seluas 7.968.700,66 hektar bagi 1.361.581 KK dengan jumlah 9.967 unit SK dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat serta hasil kerja kolaborasi dengan Unit Kerja Ditjen KSDAE dan Perum Perhutani. Telah ditetapkan Kemitraan Konservasi seluas 321.836,62 hektar sebanyak 632 unit SK bagi penerima manfaat sebanyak 21.123 KK dan Kemitraan Perhutani seluas 9.580,07 hektar sebanyak 416 unit SK bagi penerima manfaat sebanyak 26.025 KK. Sehingga total hasil kerja kolaborasi untuk mendukung program Perhutanan Sosial seluas 8.300.117,35 hektar sebanyak 11.015 unit SK bagi penerima manfaat sebanyak 1.408.729 KK.
- (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.3 Jumlah Surat Keputusan Perhutanan Sosial s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Surat Keputusan Perhutanan Sosial (SK)					Total
		2007-2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	46	11	-	30	18	105
2	Sumatera Utara	132	41	33	36	42	284
3	Sumatera Barat	244	8	40	35	22	349
4	Riau	82	4	20	40	15	161
5	Jambi	379	7	9	19	26	440
6	Sumatera Selatan	178	6	27	4	11	226
7	Bengkulu	67	5	4	10	8	94
8	Lampung	320	66	18	37	5	446
9	Kepulauan Bangka Belitung	348	12	16	9	3	388
10	Kepulauan Riau	23	6	-	10	4	43
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0
12	Jawa Barat	118	11	2	46	97	274
13	Jawa Tengah	80	11	-	52	4	147
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	45	-	-	-	-	45
15	Jawa Timur	280	67	-	62	5	414
16	Banten	26	5	3	-	14	48
17	Bali	87	30	16	7	45	185
18	Nusa Tenggara Barat	151	64	85	74	60	434
19	Nusa Tenggara Timur	206	43	58	24	30	361
20	Kalimantan Barat	162	18	16	22	42	260
21	Kalimantan Tengah	183	6	16	51	52	308
22	Kalimantan Selatan	128	31	16	13	15	203
23	Kalimantan Timur	99	19	38	22	32	210
24	Kalimantan Utara	72	5	8	7	4	96
25	Sulawesi Utara	206	14	-	34	1	255
26	Sulawesi Tengah	1.208	27	4	25	13	1.277
27	Sulawesi Selatan	572	33	91	50	35	781
28	Sulawesi Tenggara	161	63	13	30	34	301
29	Gorontalo	126	24	24	4	9	187
30	Sulawesi Barat	470	1	18	22	14	525
31	Maluku	121	11	14	20	5	171
32	Maluku Utara	105	54	49	47	74	329
33	Papua	32	27	12	5	4	80
34	Papua Barat	54	25	9	4	103	195
35	Papua Selatan	-	-	-	5	191	196
36	Papua Tengah	-	-	-	5	-	5
37	Papua Pegunungan	3	4	-	-	-	7
38	Papua Barat Daya	-	-	-	68	69	137
Jumlah		6.514	759	659	929	1.106	9.967

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :

• (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.4 Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa (HD) s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa		
		Luas (Ha)	Surat Keputusan (SK)	Kepala Keluarga (KK)
1	2	3	4	5
1	Aceh	92.854,20	61	14.818
2	Sumatera Utara	6.831,00	23	4.516
3	Sumatera Barat	290.377,83	159	160.536
4	Riau	79.076,79	39	13.885
5	Jambi	103.722,00	51	14.593
6	Sumatera Selatan	35.610,00	28	14.490
7	Bengkulu	18.299,00	19	6.105
8	Lampung	2.015,00	22	8.562
9	Kepulauan Bangka Belitung	12.351,00	23	21.600
10	Kepulauan Riau	3.777,00	3	1.413
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	29.311,00	80	17.751
13	Jawa Tengah	5.103,00	17	805
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	5.426,00	32	9.790
16	Banten	4.810,00	12	860
17	Bali	18.259,61	57	56.823
18	Nusa Tenggara Barat	179,16	6	309
19	Nusa Tenggara Timur	7.230,00	25	4.565
20	Kalimantan Barat	576.756,00	185	74.740
21	Kalimantan Tengah	217.843,00	94	14.691
22	Kalimantan Selatan	66.906,00	69	20.476
23	Kalimantan Timur	284.174,48	84	18.628
24	Kalimantan Utara	111.056,00	41	10.849
25	Sulawesi Utara	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	80.388,00	97	23.649
27	Sulawesi Selatan	62.172,00	95	40.509
28	Sulawesi Tenggara	42.280,00	27	5.986
29	Gorontalo	10.014,00	39	10.738
30	Sulawesi Barat	19.358,00	7	1.995
31	Maluku	156.054,00	108	27.924
32	Maluku Utara	217.809,00	274	45.683
33	Papua	87.648,00	61	11.961
34	Papua Barat	402.197,00	184	10.578
35	Papua Selatan	840.787,84	196	4.998
36	Papua Tengah	9.962,00	5	194
37	Papua Pegunungan	3.725,00	7	1.017
38	Papua Barat Daya	394.257,00	137	2.420
Jumlah		4.298.619,91	2.367	678.457

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
• (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.5 Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (Hkm)		
		Luas (Ha)	Surat Keputusan (SK)	Kepala Keluarga (KK)
1	2	3	4	5
1	Aceh	55.743,00	30	7.161
2	Sumatera Utara	58.291,20	198	12.743
3	Sumatera Barat	47.376,17	90	7.557
4	Riau	61.668,45	104	10.720
5	Jambi	40.141,30	104	8.519
6	Sumatera Selatan	50.680,89	110	11.431
7	Bengkulu	29.601,16	52	10.344
8	Lampung	165.577,60	245	66.201
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.665,52	84	4.188
10	Kepulauan Riau	7.579,00	34	1.436
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	16.370,64	81	11.830
13	Jawa Tengah	9.906,87	42	9.497
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.238,15	42	3.777
15	Jawa Timur	33.225,07	64	27.069
16	Banten	2.094,35	9	1.967
17	Bali	6.289,90	65	4.938
18	Nusa Tenggara Barat	60.072,35	319	34.054
19	Nusa Tenggara Timur	66.246,98	285	22.074
20	Kalimantan Barat	21.985,00	24	3.277
21	Kalimantan Tengah	152.282,38	145	16.937
22	Kalimantan Selatan	17.512,23	72	4.670
23	Kalimantan Timur	19.806,00	69	2.754
24	Kalimantan Utara	9.363,96	15	1.264
25	Sulawesi Utara	19.356,00	95	4.239
26	Sulawesi Tengah	33.052,27	81	7.975
27	Sulawesi Selatan	103.469,76	431	31.696
28	Sulawesi Tenggara	58.694,60	218	16.862
29	Gorontalo	20.653,84	84	5.182
30	Sulawesi Barat	31.288,33	123	6.599
31	Maluku	33.438,00	54	3.668
32	Maluku Utara	16.018,00	47	2.436
33	Papua	672,00	2	67
34	Papua Barat	2.218,00	10	523
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		1.279.578,97	3.428	363.655

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :

• (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.6 Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		
		Luas (Ha)	Surat Keputusan (SK)	Kepala Keluarga (KK)
1	2	3	4	5
1	Aceh	3.545,40	6	3.905
2	Sumatera Utara	17.101,61	16	2.832
3	Sumatera Barat	2.241,81	91	884
4	Riau	5.669,54	10	495
5	Jambi	37.730,65	194	4.885
6	Sumatera Selatan	23.266,07	70	3.071
7	Bengkulu	22.177,00	10	2.219
8	Lampung	20.159,00	13	7.800
9	Kepulauan Bangka Belitung	9.502,69	274	1.803
10	Kepulauan Riau	22.827,00	6	2.267
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	327,73	3	1.228
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	177	1	350
18	Nusa Tenggara Barat	3.122,55	12	2.062
19	Nusa Tenggara Timur	3.770,77	19	1.842
20	Kalimantan Barat	9.598,41	14	1.760
21	Kalimantan Tengah	58.770,96	52	7.461
22	Kalimantan Selatan	9.768,52	20	861
23	Kalimantan Timur	16.215,48	18	1.142
24	Kalimantan Utara	3.150,75	34	472
25	Sulawesi Utara	28.104,01	158	2.408
26	Sulawesi Tengah	3.193,20	1084	1.083
27	Sulawesi Selatan	7.966,16	221	1.300
28	Sulawesi Tenggara	18.689,02	31	3.959
29	Gorontalo	1.364,01	63	309
30	Sulawesi Barat	7.730,06	394	984
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	13.341,00	3	1.334
33	Papua	17.180,30	4	558
34	Papua Barat	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		366.690,70	2.821	59.274

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
• (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.7 Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA) s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA)		
		Luas (Ha)	Surat Keputusan (SK)	Kepala Keluarga (KK)
1	2	3	4	5
1	Aceh	135.266,00	8	20.933,00
2	Sumatera Utara	29.329,83	13	4.048,00
3	Sumatera Barat	14.690,00	5	1.154,00
4	Riau	19.113,00	2	5.246,00
5	Jambi	32.508,74	29	10.837,00
6	Sumatera Selatan	380	2	578
7	Bengkulu	19.843,00	6	1.859,00
8	Lampung	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	655,22	1	117
13	Jawa Tengah	64,00	1	121
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	18.189,00	8	11.322,00
17	Bali	1.014,00	6	7.768,00
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	242.216,37	32	7.667,00
21	Kalimantan Tengah	71.810,25	16	4.142,00
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	17.448,85	2	218
24	Kalimantan Utara	402.153,00	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	123.601,00	6	2.456,00
27	Sulawesi Selatan	133.492,99	8	4.646,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	10.400,00	-	-
31	Maluku	49.860,00	4	1.479,00
32	Maluku Utara	58.170,00	-	-
33	Papua	42.453,00	6	732
34	Papua Barat	18.853,00	1	221
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		1.441.511,25 *)	156	85.544

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :

- (-) Data ada data/kegiatan
- *) Penetapan Hutan Adat = 332.505 Ha, Indikatif Hutan Adat = 1.109.006,58

Tabel 5.8 Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)		
		Luas (Ha)	Surat Keputusan (SK)	Kepala Keluarga (KK)
1	2	3	4	5
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.253,84	34	2.010
3	Sumatera Barat	637,57	4	130
4	Riau	6.844,00	6	586
5	Jambi	32.773,03	62	1.277
6	Sumatera Selatan	30.568,76	16	4.433
7	Bengkulu	874	7	218
8	Lampung	46.956,19	166	6.477
9	Kepulauan Bangka Belitung	321,76	7	172
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	31.107,16	101	15.744
13	Jawa Tengah	79.321,42	59	8.174
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	148.141,93	296	97.354
16	Banten	4.460,71	19	2.460
17	Bali	4.350,47	56	3.640
18	Nusa Tenggara Barat	12.627,34	97	7.360
19	Nusa Tenggara Timur	3.412,08	32	1.795
20	Kalimantan Barat	50.799,51	5	598
21	Kalimantan Tengah	396	1	17
22	Kalimantan Selatan	6.791,50	42	1.824
23	Kalimantan Timur	7.577,81	37	185
24	Kalimantan Utara	3.491,96	6	194
25	Sulawesi Utara	274,34	2	34
26	Sulawesi Tengah	614,67	9	340
27	Sulawesi Selatan	51.341,52	26	918
28	Sulawesi Tenggara	18.325,31	25	791
29	Gorontalo	128	1	34
30	Sulawesi Barat	503	1	250
31	Maluku	1.578,96	5	85
32	Maluku Utara	1.165,00	5	151
33	Papua	11.625,00	7	295
34	Papua Barat	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		563.262,840	1.134	157.546

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
• (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.9 Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) s.d. Tahun 2024

No	Provinsi	Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)		
		Luas (Ha)	Surat Keputusan (SK)	Kepala Keluarga (KK)
1	2	3	4	5
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	4.549,50	11	3.293
13	Jawa Tengah	7.699,80	28	8.374
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	6.787,69	22	5.438
16	Banten	-	-	-
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Jumlah		19.036,99	61	17.105

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan:
· (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.10 Jumlah Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	5	7	13	56	9
2	Sumatera Utara	17	78	71	59	70
3	Sumatera Barat	20	28	59	76	46
4	Riau	44	4	24	41	33
5	Jambi	18	18	13	28	17
6	Sumatera Selatan	22	16	17	53	19
7	Bengkulu	9	13	3	14	9
8	Lampung	19	84	46	66	19
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	19	21	10	3
10	Kepulauan Riau	3	12	1	2	7
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	39	17	1	84	50
13	Jawa Tengah	4	33	-	64	1
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	37	186	-	65	10
16	Banten	-	8	3	7	12
17	Bali	6	51	10	25	36
18	Nusa Tenggara Barat	8	52	79	151	89
19	Nusa Tenggara Timur	15	52	46	29	65
20	Kalimantan Barat	25	48	41	40	40
21	Kalimantan Tengah	49	25	31	56	45
22	Kalimantan Selatan	40	44	36	20	5
23	Kalimantan Timur	11	36	76	75	88
24	Kalimantan Utara	9	44	26	14	8
25	Sulawesi Utara	26	19	-	22	3
26	Sulawesi Tengah	13	41	7	37	3
27	Sulawesi Selatan	68	78	125	105	40
28	Sulawesi Tenggara	25	61	20	35	46
29	Gorontalo	3	26	29	6	11
30	Sulawesi Barat	27	2	23	20	14
31	Maluku	5	21	15	10	5
32	Maluku Utara	13	46	89	97	60
33	Papua	4	32	6	5	4
34	Papua Barat	22	33	9	3	67
35	Papua Selatan	-	9	3	1	97
36	Papua Tengah	1	13	6	2	2
37	Papua Pegunungan	3	5	-	-	1
38	Papua Barat Daya	10	5	-	20	44
Jumlah		623	1.266	949	1.398	1.078

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
- (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.11 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berdasarkan Kelas s.d. Tahun 2024

No	Provisi	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berdasarkan Kelas (KUPS)				Jumlah
		Biru	Perak	Emas	Platina	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	80	77	12	-	169
2	Sumatera Utara	158	267	80	-	505
3	Sumatera Barat	405	189	76	4	674
4	Riau	202	26	4	0	232
5	Jambi	364	46	91	1	502
6	Sumatera Selatan	141	76	132	-	349
7	Bengkulu	56	81	70	1	208
8	Lampung	347	468	105	2	922
9	Kepulauan Bangka Belitung	331	54	47	2	434
10	Kepulauan Riau	28	70	5	-	103
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	0
12	Jawa Barat	265	64	97	7	433
13	Jawa Tengah	185	57	11	2	255
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	5	35	56	3	99
15	Jawa Timur	461	365	37	4	867
16	Banten	61	-	2	-	63
17	Bali	168	161	17	9	355
18	Nusa Tenggara Barat	300	208	30	1	539
19	Nusa Tenggara Timur	289	148	81	1	519
20	Kalimantan Barat	333	223	36	20	612
21	Kalimantan Tengah	290	317	31	1	639
22	Kalimantan Selatan	184	258	34	5	481
23	Kalimantan Timur	256	138	24	2	420
24	Kalimantan Utara	89	117	18	-	224
25	Sulawesi Utara	206	68	1	-	275
26	Sulawesi Tengah	1.130	282	17	2	1.431
27	Sulawesi Selatan	548	827	119	13	1.507
28	Sulawesi Tenggara	281	108	3	-	392
29	Gorontalo	149	114	1	-	264
30	Sulawesi Barat	411	300	8	-	719
31	Maluku	137	138	20	-	295
32	Maluku Utara	321	152	23	3	499
33	Papua	83	7	-	-	90
34	Papua Barat	196	4	-	-	200
35	Papua Selatan	114	-	-	-	114
36	Papua Tengah	28	-	-	-	28
37	Papua Pegunungan	9	-	-	-	9
38	Papua Barat Daya	87	-	2	-	89
Jumlah		8.698	5.445	1.290	83	15.516

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
• (-) Data ada data/kegiatan

Tabel 5.12 Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Menjadi Kelas Emas dan Platina Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Peningkatan Kelas KUPS menjadi Kelas Emas/Platina (KUPS)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	9
2	Sumatera Utara	-	-	1	2	74
3	Sumatera Barat	15	2	2	2	9
4	Riau	-	-	-	-	6
5	Jambi	-	4	1	-	5
6	Sumatera Selatan	-	6	1	3	18
7	Bengkulu	-	-	-	1	5
8	Lampung	-	15	-	1	14
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	4	1	-	2
10	Kepulauan Riau	-	-	-	1	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	2	11	-	1	15
13	Jawa Tengah	3	2	1	1	2
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	-	-	-	2
15	Jawa Timur	3	4	3	2	7
16	Banten	-	1	-	-	-
17	Bali	1	2	-	1	4
18	Nusa Tenggara Barat	0	5	8	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	1	-	1	1	2
20	Kalimantan Barat	1	-	4	3	4
21	Kalimantan Tengah	2	2	1	2	2
22	Kalimantan Selatan	4	11	3	7	7
23	Kalimantan Timur	1	-	-	3	19
24	Kalimantan Utara	3	-	1	4	3
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	8	8
27	Sulawesi Selatan	9	13	30	36	46
28	Sulawesi Tenggara	2	-	-	-	2
29	Gorontalo	-	-	-	2	2
30	Sulawesi Barat	1	1	2	3	2
31	Maluku	4	4	3	1	10
32	Maluku Utara	3	2	3	2	12
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	3	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	8
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	5
Jumlah		59	89	66	88	305

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
- (-) Data tidak teridentifikasi atau tidak ada Kelompok KUPS yang ditingkatkan
- Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PS, s.d. tahun 2024 telah dikembangkan sebanyak 607 KUPS yang ditingkatkan kelasnya menjadi Gold/Platina melalui Surat Keputusan Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Tabel 5.13 Jumlah Pendamping Kelompok Perhutanan Sosial Tahun 2024

No	Provinsi	Pendamping (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Aceh	17	3	20
2	Sumatera Utara	57	19	76
3	Sumatera Barat	38	57	95
4	Riau	38	15	53
5	Jambi	65	13	78
6	Sumatera Selatan	36	18	54
7	Bengkulu	25	8	33
8	Lampung	68	24	92
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	20	46
10	Kepulauan Riau	12	1	13
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	21	1	22
13	Jawa Tengah	43	12	55
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	12	3	15
15	Jawa Timur	60	22	82
16	Banten	8	0	8
17	Bali	30	5	35
18	Nusa Tenggara Barat	25	10	35
19	Nusa Tenggara Timur	22	8	30
20	Kalimantan Barat	49	10	59
21	Kalimantan Tengah	60	11	71
22	Kalimantan Selatan	66	32	98
23	Kalimantan Timur	28	13	41
24	Kalimantan Utara	21	8	29
25	Sulawesi Utara	23	12	35
26	Sulawesi Tengah	44	16	60
27	Sulawesi Selatan	80	35	115
28	Sulawesi Tenggara	39	17	56
29	Gorontalo	31	8	39
30	Sulawesi Barat	45	10	55
31	Maluku	19	16	35
32	Maluku Utara	28	7	35
33	Papua	12	3	15
34	Papua Barat	10	4	14
35	Papua Selatan	3	2	5
36	Papua Tengah	4	0	4
37	Papua Pegunungan	6	1	7
38	Papua Barat Daya	12	3	15
Jumlah		1.183	447	1.630

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
· (-) Data ada data/kegiatan
· Pendamping Perhutanan Sosial sesuai mandat Perpres 28 tahun 2023 tercapai sejumlah 4.300 pendamping, dimana yang disajikan didalam tabel 5.13 adalah pendamping yang direkrut dan dibina oleh Kementerian Kehutanan.

Tabel 5.14 Jumlah Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan (Kasus)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	2	-
2	Sumatera Utara	1	4	3	14	-
3	Sumatera Barat	1	-	27	2	-
4	Riau	4	2	38	9	-
5	Jambi	2	6	16	4	12
6	Sumatera Selatan	3	-	2	1	7
7	Bengkulu	-	1	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	5	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	2	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	4
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	3	-	7	-
13	Jawa Tengah	1	12	-	6	-
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	0	-
15	Jawa Timur	2	41	-	8	-
16	Banten	-	1	-	1	-
17	Bali	-	1	-	1	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	-	2	-
20	Kalimantan Barat	1	-	-	1	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	7	3	9
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	1	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	5	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	1	-
25	Sulawesi Utara	1	-	1	1	-
26	Sulawesi Tengah	-	1	-	1	-
27	Sulawesi Selatan	-	3	1	1	-
28	Sulawesi Tenggara	-	2	-	1	1
29	Gorontalo	-	-	-	1	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	2	-
31	Maluku	-	-	-	2	-
32	Maluku Utara	-	-	-	0	-
33	Papua	-	-	-	3	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		16	78	95	87	33

Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 31 Desember 2024

Keterangan :
- : Data tidak teridentifikasi atau tidak ada Penanganan konflik tenurial di kawasan hutan tahun 2020 - 2024

A firefighter in a green uniform and a bucket hat is using a hose to spray water in a forest. The firefighter is wearing a respirator mask. The background is filled with trees and a large plume of white smoke or steam rising from the ground. The firefighter's uniform has a red patch on the shoulder with a cartoon character and a name tag that says "BUDHANTO".

BAB 6

PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Sumber Foto: Naoval Aqly Manggala Agni
Kalimantan III/Pangkalan Bun

PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) merupakan unit utama di Kementerian Kehutanan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan. Fokus utama Ditjen Gakkum adalah menjamin kepatuhan terhadap hukum untuk mencegah dan menindak pelanggaran kehutanan.

376.805,05 **HA**

**LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2024**

233 **OPERASI**

JUMLAH OPERASI PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2024

535 **BADAN USAHA**

JUMLAH PENGAWASAN BADAN
USAHA TAHUN 2024

880

PENGADUAN TAHUN 2024

206 **SANKSI**

JUMLAH PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF TAHUN 2024

197 **KASUS**

JUMLAH KASUS YANG BERHASIL
DITANGANI HINGGA P21 TAHUN 2024

3.832 **TITIK HOTSPOT**

JUMLAH HOTSPOT TAHUN 2024

Sumber Foto: Fatya Kresnawan BPPHLHK

Tabel 6.1 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	1.078,00	1.267,00	3.716,00	1.936,86	7.257,35
2	Sumatera Utara	3.744,00	4.078,00	7.516,00	2.113,75	7.032,27
3	Sumatera Barat	1.573,00	2.068,00	9.832,00	4.885,13	3.052,20
4	Riau	15.442,00	8.970,00	4.915,00	7.267,03	11.027,96
5	Jambi	1.002,00	540,00	918,00	6.539,68	5.636,69
6	Sumatera Selatan	950,00	5.245,00	3.723,00	132.082,86	15.422,48
7	Bengkulu	221,00	93,00	1.620,00	75,94	355,05
8	Lampung	1.358,00	5.411,00	7.989,00	6.506,67	13.242,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	576,00	385,00	328,00	4.752,98	2.915,46
10	Kepulauan Riau	8.805,00	1.588,00	23,00	724,26	1.498,66
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	0,51
12	Jawa Barat	2.344,00	1.299,00	2.005,00	11.524,80	4.548,58
13	Jawa Tengah	7.516,00	599,00	107,00	9.965,59	3.726,78
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	181,00	-	-	119,91	51,91
15	Jawa Timur	19.148,00	15.458,00	2.380,00	49.498,32	20.957,17
16	Banten	2,00	-	-	1,01	362,83
17	Bali	29,00	3,00	-	2.011,27	316,36
18	Nusa Tenggara Barat	29.157,00	101.173,00	30.567,00	66.716,43	46.189,73
19	Nusa Tenggara Timur	114.719,00	137.343,00	70.637,00	102.536,89	113.089,51
20	Kalimantan Barat	7.646,00	20.590,00	21.836,00	111.848,43	24.154,63
21	Kalimantan Tengah	7.681,00	3.653,00	1.554,00	165.896,44	11.459,89
22	Kalimantan Selatan	4.017,00	8.625,00	429,00	190.394,58	4.993,88
23	Kalimantan Timur	5.221,00	3.029,00	373,00	39.494,41	22.570,50
24	Kalimantan Utara	1.721,00	1.678,00	370,00	796,36	2.429,21
25	Sulawesi Utara	177,00	579,00	469,00	2.531,44	651,68
26	Sulawesi Tengah	2.555,00	3.133,00	3.704,00	10.844,28	4.920,70
27	Sulawesi Selatan	1.902,00	916,00	997,00	6.489,26	3.522,91
28	Sulawesi Tenggara	3.206,00	2.124,00	3.098,00	18.736,47	1.629,74
29	Gorontalo	80,00	163,00	101,00	666,33	767,03
30	Sulawesi Barat	569,00	886,00	488,00	2.132,31	994,74
31	Maluku	20.270,00	11.807,00	14.954,00	45.999,39	13.404,83
32	Maluku Utara	59,00	108,00	171,00	542,18	102,57
33	Papua	28.277,00	15.979,00	8.336,00	604,01	544,19
34	Papua Barat	5.716,00	77,00	1.738,00	259,03	198,85
35	Papua Selatan	-	-	-	150.813,34	27.182,19
36	Papua Tengah	-	-	-	2.593,91	104,02
37	Papua Pegunungan	-	-	-	787,11	461,56
38	Papua Barat Daya	-	-	-	504,24	28,42
Jumlah		296.942,00	358.867,00	204.894,00	1.161.192,90	376.805,05

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan
 - ==Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.2 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2024

No	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Berdasarkan Kawasan Hutan (Ha)					APL	Jumlah
		HP	HK	HL	HPK	HPT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	1.361,02	1.161,77	1.237,65	66,13	101,40	3.329,38	7.257,35
2	Sumatera Utara	692,07	194,75	2.295,08	134,72	546,73	3.168,92	7.032,27
3	Sumatera Barat	328,71	37,51	339,74	1.141,60	243,58	961,05	3.052,20
4	Riau	1.497,12	522,00	520,13	4.615,74	1.172,02	2.700,96	11.027,96
5	Jambi	1.228,46	257,38	1.381,63	-	355,55	2.413,66	5.636,69
6	Sumatera Selatan	2.770,30	434,65	378,18	1.854,47	64,98	9.919,91	15.422,48
7	Bengkulu	80,36	6,75	-	-	208,32	59,63	355,05
8	Lampung	254,04	8.024,59	24,57	-	-	4.938,81	13.242,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.270,35	1,31	123,83	-	-	1.519,98	2.915,46
10	Kepulauan Riau	71,63	11,40	119,08	397,19	249,90	649,46	1.498,66
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0,51	0,51
12	Jawa Barat	2.778,71	375,39	138,94	-	232,26	1.023,27	4.548,58
13	Jawa Tengah	2.144,87	-	8,07	-	237,61	1.336,23	3.726,78
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	51,91	51,91
15	Jawa Timur	10.760,08	4.683,49	1.603,52	-	49,57	3.860,51	20.957,17
16	Banten	59,04	-	17,46	-	52,59	233,73	362,83
17	Bali	-	-	171,42	-	-	144,94	316,36
18	Nusa Tenggara Barat	6.492,62	11.207,95	2.755,77	-	3.627,84	22.105,55	46.189,73
19	Nusa Tenggara Timur	5.663,48	3.334,32	14.477,07	4.259,95	6.003,53	79.351,16	113.089,51
20	Kalimantan Barat	7.150,33	1.002,54	2.174,32	335,85	2.718,47	10.773,12	24.154,63
21	Kalimantan Tengah	4.160,09	935,65	2.205,91	1.451,51	429,92	2.276,80	11.459,89
22	Kalimantan Selatan	842,78	239,16	137,80	112,25	53,48	3.608,41	4.993,88
23	Kalimantan Timur	6.794,58	2.105,58	358,65	443,74	492,72	12.375,22	22.570,50
24	Kalimantan Utara	267,48	12,13	31,31	29,86	291,82	1.796,61	2.429,21
25	Sulawesi Utara	2,78	-	6,61	-	316,82	325,46	651,68
26	Sulawesi Tengah	450,05	376,91	211,50	260,86	815,40	2.805,98	4.920,70
27	Sulawesi Selatan	42,77	10,47	73,44	-	50,93	3.345,31	3.522,91
28	Sulawesi Tenggara	394,66	108,86	65,93	20,66	74,75	964,88	1.629,74
29	Gorontalo	23,70	0,45	6,80	22,05	16,05	697,98	767,03
30	Sulawesi Barat	199,18	62,41	213,97	16,23	199,68	303,27	994,74
31	Maluku	4.287,78	-	1.116,67	5.997,21	143,53	1.859,64	13.404,83
32	Maluku Utara	-	-	-	4,47	-	98,11	102,57
33	Papua	-	7,20	12,16	92,45	13,77	418,61	544,19
34	Papua Barat	-	58,48	32,70	0,44	8,93	98,30	198,85
35	Papua Selatan	229,37	12.075,28	1.564,13	10.876,72	738,61	1.698,07	27.182,19
36	Papua Tengah	-	2,77	14,77	77,51	-	8,97	104,02
37	Papua Pegunungan	-	55,44	53,15	68,96	-	284,01	461,56
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	28,42	28,42
Jumlah		62.298,41	47.306,59	33.871,96	32.280,57	19.510,76	181.536,74	376.805,05

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:

- HP = Hutan Produksi Tetap
- HK = Hutan Konservasi
- HL = Hutan Lindung
- HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
- HPT = Hutan Produksi Terbatas
- APL = Area Penggunaan Lain
- -=Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.3 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Berdasarkan Tipe Tanah Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan/Karhutla Berdasarkan Tipe Tanah (Ha)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Gambut	Mineral	Gambut	Mineral	Gambut	Mineral	Gambut	Mineral	Gambut	Mineral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	193,00	885,00	430,00	836,00	1,00	2.505,00	378,22	1.558,64	656,12	6.601,23
2	Sumatera Utara	897,00	2.847,00	387,00	3.690,00	480,00	7.036,00	618,97	1.494,78	637,52	6.394,75
3	Sumatera Barat	473,00	1.101,00	840,00	1.228,00	5.600,00	4.232,00	2.793,22	2.091,91	1.097,30	1.954,90
4	Riau	11.587,00	3.855,00	8.194,00	776,00	3.234,00	1.681,00	4.348,34	2.918,69	8.361,17	2.666,79
5	Jambi	7,00	994,00	34,00	506,00	103,00	815,00	139,58	6.400,11	2.838,34	2.798,35
6	Sumatera Selatan	517,00	433,00	302,00	4.943,00	43,00	3.680,00	57.107,34	74.975,52	4.210,77	11.211,71
7	Bengkulu	-	221,00	-	93,00	4,00	1.616,00	-	75,94	-	355,05
8	Lampung	-	1.358,00	5,00	5.406,00	-	7.989,00	45,59	6.461,08	38,75	13.203,27
9	Kepulauan Bangka Belitung	226,00	350,00	68,00	317,00	26,00	303,00	391,95	4.361,03	98,21	2.817,25
10	Kepulauan Riau	7,00	8.798,00	61,00	1.527,00	-	23,00	-	724,26	69,80	1.428,86
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51
12	Jawa Barat	-	2.344,00	-	1.299,00	-	2.005,00	-	11.524,80	-	4.548,58
13	Jawa Tengah	-	7.516,00	-	599,00	-	107,00	-	9.965,59	-	3.726,78
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	181,00	-	-	-	-	-	119,91	-	51,91
15	Jawa Timur	-	19.148,00	-	15.458,00	-	2.380,00	-	49.498,32	-	20.957,17
16	Banten	-	2,00	-	2,00	-	-	-	1,01	-	362,83
17	Bali	-	29,00	-	3,00	-	-	-	2.011,27	-	316,36
18	Nusa Tenggara Barat	-	29.157,00	-	101.173,00	-	30.567,00	-	66.716,43	-	46.189,73
19	Nusa Tenggara Timur	-	114.719,00	-	137.343,00	-	70.637,00	-	102.536,89	-	113.089,51
20	Kalimantan Barat	1.413,00	6.234,00	13.447,00	7.143,00	9.241,00	12.595,00	31.867,22	79.981,21	5.648,97	18.505,66
21	Kalimantan Tengah	1.546,00	6.135,00	692,00	2.960,00	138,00	1.417,00	60.773,95	96.122,49	4.621,12	6.838,77
22	Kalimantan Selatan	39,00	3.978,00	836,00	7.789,00	14,00	415,00	7.605,94	182.788,64	166,54	4.827,33
23	Kalimantan Timur	137,00	5.084,00	-	3.029,00	-	373,00	6.259,02	33.235,39	2.824,63	19.745,87
24	Kalimantan Utara	-	1.721,00	-	1.678,00	-	370,00	13,36	783,00	95,38	2.333,83
25	Sulawesi Utara	-	177,00	-	579,00	-	469,00	-	2.531,44	-	651,68
26	Sulawesi Tengah	-	2.555,00	-	3.133,00	-	3.704,00	22,99	10.821,29	28,61	4.892,53
27	Sulawesi Selatan	-	1.902,00	-	916,00	-	997,00	-	6.489,26	-	3.522,91
28	Sulawesi Tenggara	-	3.206,00	-	2.124,00	-	3.098,00	-	18.736,47	-	1.629,74
29	Gorontalo	-	80,00	-	163,00	-	101,00	-	666,33	-	767,03
30	Sulawesi Barat	-	569,00	-	886,00	-	488,00	64,38	2.067,94	-	994,74
31	Maluku	-	20.270,00	-	11.807,00	-	14.954,00	-	45.999,39	-	13.404,83
32	Maluku Utara	-	59,00	-	108,00	-	171,00	-	542,18	-	102,57
33	Papua	424,00	27.853,00	613,00	15.366,00	209,00	8.127,00	-	604,01	-	544,19
34	Papua Barat	2.534,00	3.182,00	-	77,00	683,00	1.055,00	47,51	211,52	-	198,85
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	4.283,68	146.529,67	14,35	27.167,85
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	1.517,87	1.076,04	41,90	62,12
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	787,11	-	461,56
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	504,24	-	28,42
Jumlah		20.000,00	276.944,00	25.910,00	332.954,00	20.984,00	183.912,00	178.279,13	973.913,80	31.449,48	345.356,02

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan
· -=Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.4 Jumlah Hotspot Berdasarkan Status Lahan Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Hotspot Berdasarkan Status Lahan (Titik)													Jumlah	
		APL	CA	HL	HP	HPK	HPT	KSA	KPA	SM	Tahura	TB	TN	Tubuh Air		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Aceh	11	-	1	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	19	
2	Sumatera Utara	9	-	6	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	26	
3	Sumatera Barat	13	-	4	1	28	1	-	1	-	-	-	-	-	48	
4	Riau	28	-	3	38	35	41	-	17	-	-	-	-	-	162	
5	Jambi	32	-	24	28	-	9	-	1	-	1	-	-	-	95	
6	Sumatera Selatan	172	-	15	19	3	8	-	-	5	-	-	1	-	223	
7	Bengkulu	8	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	19	
8	Lampung	52	-	-	12	-	2	-	29	-	-	-	-	-	95	
9	Kepulauan Bangka Belitung	67	-	5	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	
10	Kepulauan Riau	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	7	
11	DKI Jakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
12	Jawa Barat	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
13	Jawa Tengah	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	62	-	71	
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
15	Jawa Timur	119	-	7	5	-	-	-	-	-	-	-	9	-	140	
16	Banten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
17	Bali	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
18	Nusa Tenggara Barat	44	1	6	7	-	7	-	-	5	-	2	-	-	72	
19	Nusa Tenggara Timur	158	-	207	26	1	18	-	-	1	-	-	1	-	412	
20	Kalimantan Barat	658	1	37	177	25	92	-	-	-	-	-	-	2	992	
21	Kalimantan Tengah	42	-	16	85	50	41	-	-	3	-	-	-	2	239	
22	Kalimantan Selatan	18	-	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
23	Kalimantan Timur	223	-	1	125	11	33	-	7	-	-	-	-	2	402	
24	Kalimantan Utara	13	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	25	
25	Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26	Sulawesi Tengah	21	-	6	3	1	6	-	4	-	-	-	-	-	41	

No	Provinsi	Jumlah Hotspot Berdasarkan Status Lahan (Titik)													Jumlah
		APL	CA	HL	HP	HPK	HPT	KSA	KPA	SM	Tahura	TB	TN	Tubuh Air	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Sulawesi Selatan	177	-	139	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	317
28	Sulawesi Tenggara	12	-	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	20
29	Gorontalo	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
30	Sulawesi Barat	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
31	Maluku	3	-	-	8	10	1	-	-	-	-	-	-	-	22
32	Maluku Utara	1	-	33	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
33	Papua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Papua Barat	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
35	Papua Selatan	11	-	7	5	46	5	85	-	-	-	-	-	-	159
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	Papua Pegunungan	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		1.929	2	519	630	218	288	88	59	17	1	2	73	6	3.832

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:

- Tahura = Taman Hutan Rakyat
- APL = Area Penggunaan Lain
- CA = Cagar Alam
- HL = Hutan Lindung
- HP = Hutan Produksi
- HPK = Hutan Produksi yang dapat dikonversi
- -= Tidak ada data/kegiatan

- HPT = Hutan Produksi Terbatas
- HAS = Hutan Suaka Alam
- KSA = Kawasan Suaka Alam
- KPA = Kawasan Pelestarian Alam
- SM = Suaka Margasatwa

- TB = Taman Buru
- TN = Taman Nasional
- Tahura = Taman Hutan Raya
- TWA = Taman Wisata Alam

Tabel 6.5 Jumlah Hotspot Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Hotspot (Titik)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	16	13	11	20	19
2	Sumatera Utara	28	26	28	26	26
3	Sumatera Barat	12	12	79	71	48
4	Riau	299	169	53	156	162
5	Jambi	7	1	10	107	95
6	Sumatera Selatan	16	19	36	1.898	223
7	Bengkulu	5	4	18	22	19
8	Lampung	38	20	51	259	95
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	9	52	123	109
10	Kepulauan Riau	96	8	1	8	7
11	DKI Jakarta	-	-	-	2	1
12	Jawa Barat	5	2	6	30	13
13	Jawa Tengah	2	9	5	130	71
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	4	-	-	-
15	Jawa Timur	107	22	59	380	140
16	Banten	-	-	-	14	2
17	Bali	-	-	-	10	2
18	Nusa Tenggara Barat	106	51	32	130	72
19	Nusa Tenggara Timur	260	126	161	556	412
20	Kalimantan Barat	194	332	299	1.734	992
21	Kalimantan Tengah	98	34	23	1.942	239
22	Kalimantan Selatan	24	15	5	631	28
23	Kalimantan Timur	71	25	30	454	402
24	Kalimantan Utara	35	5	7	39	25
25	Sulawesi Utara	12	-	-	131	1
26	Sulawesi Tengah	21	16	13	145	41
27	Sulawesi Selatan	337	248	220	428	317
28	Sulawesi Tenggara	46	7	16	140	20
29	Gorontalo	-	-	1	6	4
30	Sulawesi Barat	5	2	2	25	3
31	Maluku	21	5	8	95	22
32	Maluku Utara	48	15	22	53	53
33	Papua	203	25	47	886	1
34	Papua Barat	22	5	1	22	5
35	Papua Selatan	-	-	-	-	159
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	4
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		2.149	1.229	1.296	10.673	3.832

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
- ==Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.6
 Jumlah Sebaran Personil Manggala Agni Berdasarkan Daerah Operasi
 Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah Personil Manggala Agni (Orang)	
		Pemula	Terampil
1	2	3	4
A. Balai PPI Wilayah Sumatera			
1. Provinsi Sumatera Utara			
1	Daops MA Sumatera I/ Sibolangit	60	1
2	Daops MA Sumatera II/ Pematang Siantar	58	-
3	Daops MA Sumatera III/ Labuhan Batu	60	-
Jumlah		178	1
2. Provinsi Riau			
4	Daops MA Sumatera IV/ Pekanbaru	56	1
5	Daops MA Sumatera V/ Dumai	60	-
6	Daops MA Sumatera VI/ Siak	60	-
7	Daops MA Sumatera VII/ Rengat	59	-
Jumlah		235	1
3. Provinsi Kepulauan Riau			
8	Daops MA Sumatera VIII/ Batam	29	1
Jumlah		29	1
4. Provinsi Jambi			
9	Daops MA Sumatera IX/ Kota Jambi	60	-
10	Daops MA Sumatera X/ Muara Bulian	30	-
11	Daops MA Sumatera XI/ Bukit Tempurung	45	-
12	Daops MA Sumatera XII/ Muaratebo	60	-
13	Daops MA Sumatera XIII/ Sarolangun	58	-
Jumlah		253	-
5. Provinsi Sumatera Selatan			
14	Daops MA Sumatera XIV/ Banyuasin	60	-
15	Daops MA Sumatera XV/ Musi Banyuasin	60	-
16	Daops MA Sumatera XVI/ Lahat	60	-
17	Daops MA Sumatera XVII/ OKI	74	-
Jumlah		254	-
Jumlah Balai PPI Wilayah Sumatera		949	3
B. Balai PPI Wilayah Kalimantan			
6. Provinsi Kalimantan Tengah			
18	Daops MA Kalimantan I/ Palangka Raya	70	-
19	Daops MA Kalimantan II/ Kapuas	44	-
20	Daops MA Kalimantan III/ Pangkalan Bun	57	-
21	Daops MA Kalimantan IV/ Muara Teweh	44	-
Jumlah		215	-
7. Provinsi Kalimantan Selatan			
22	Daops MA Kalimantan V/ Banjar	59	-
23	Daops MA Kalimantan VI/ Tanah Laut	58	-
24	Daops MA Kalimantan VII/ Tanah Bumbu	57	-
Jumlah		174	-
8. Provinsi Kalimantan Barat			
25	Daops MA Kalimantan VIII/ Pontianak	59	-
26	Daops MA Kalimantan IX/ Singkawang	58	-
27	Daops MA Kalimantan X/ Ketapang	56	3

Lanjutan Tabel 6.6

Jumlah Sebaran Personil Manggala Agni Berdasarkan Daerah Operasi Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah Personil Manggala Agni (Orang)	
		Pemula	Terampil
1	2	3	4
28	Daops MA Kalimantan XI/ Sintang	89	-
Jumlah		262	3
9. Provinsi Kalimantan Timur			
29	Daops MA Kalimantan XII/ Passer	57	-
30	Daops MA Kalimantan XIII/ Sangkima	55	2
Jumlah		112	2
Jumlah Balai PPI Wilayah Kalimantan		763	5
C. Balai PPI Wilayah Sulawesi			
10. Provinsi Sulawesi Selatan			
31	Daops MA Sulawesi I/ Gowa	90	1
32	Daops MA Sulawesi II/ Malili	75	-
Jumlah		165	1
11. Provinsi Sulawesi Tenggara			
33	Daops MA Sulawesi III/ Tinanggea	27	1
Jumlah		27	1
12. Provinsi Sulawesi Utara			
34	Daops MA Sulawesi IV/ Bitung	35	2
Jumlah		35	2
Jumlah Balai PPI Wilayah Sulawesi		227	4
D. Balai PPI Wilayah JaBalNusra			
1	Seksi Wil 1/ Bandung- Jawa Barat	9	1
2	Seksi Wil 2/ Yogyakarta-Jawa Tengah	9	1
3	Seksi Wil 3/ Mataram-Nusa Tenggara Barat	18	1
Jumlah Balai PPI Wilayah JaBalNusra		36	3
E. Balai PPI Wilayah Maluku Papua			
Jumlah Balai PPI Wilayah Maluku Papua		-	-
Jumlah		1.975	15

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:

- --Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.7 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi (Operasi)			Jumlah
		Operasi Pembalakan Liar	Operasi Pengamanan Hutan	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	-	4	1	5
2	Sumatera Utara	4	6	3	13
3	Sumatera Barat	1	3	5	9
4	Riau	1	6	-	7
5	Jambi	-	1	4	5
6	Sumatera Selatan	-	2	1	3
7	Bengkulu	-	1	-	1
8	Lampung	-	-	2	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	4	-	4
10	Kepulauan Riau	-	-	-	0
11	DKI Jakarta	-	1	-	1
12	Jawa Barat	2	15	4	21
13	Jawa Tengah	-	1	3	4
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	4	-	4
15	Jawa Timur	8	4	1	13
16	Banten	-	1	5	6
17	Bali	-	-	-	0
18	Nusa Tenggara Barat	-	1	-	1
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	1	2
20	Kalimantan Barat	11	3	4	18
21	Kalimantan Tengah	4	4	1	9
22	Kalimantan Selatan	-	-	3	3
23	Kalimantan Timur	12	9	6	27
24	Kalimantan Utara	-	-	-	0
25	Sulawesi Utara	2	1	2	5
26	Sulawesi Tengah	-	5	1	6
27	Sulawesi Selatan	8	16	7	31
28	Sulawesi Tenggara	3	5	4	12
29	Gorontalo	-	-	-	0
30	Sulawesi Barat	1	2	-	3
31	Maluku	2	3	-	5
32	Maluku Utara	-	-	-	0
33	Papua	2	2	-	4
34	Papua Barat	-	5	1	6
35	Papua Selatan	-	-	1	1
36	Papua Tengah	-	-	1	1
37	Papua Pegunungan	-	-	-	0
38	Papua Barat Daya	1	-	-	1
Jumlah		62	110	61	233

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan

- =Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.8 Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Operasi)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	3	2	1	3	5
2	Sumatera Utara	7	6	2	1	13
3	Sumatera Barat	5	4	3	3	9
4	Riau	20	15	8	9	7
5	Jambi	11	8	2	6	6
6	Sumatera Selatan	4	6	6	5	2
7	Bengkulu	2	1	2	1	2
8	Lampung	6	8	4	1	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	4	2	1	5
10	Kepulauan Riau	3	2	-	7	-
11	DKI Jakarta	-	1	-	2	1
12	Jawa Barat	16	15	7	18	21
13	Jawa Tengah	5	1	2	6	4
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	-	-	-
15	Jawa Timur	13	4	8	16	13
16	Banten	5	2	-	3	2
17	Bali	-	-	2	-	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	3	2	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	6	-	4	4	2
20	Kalimantan Barat	30	13	7	14	18
21	Kalimantan Tengah	22	10	5	12	1
22	Kalimantan Selatan	2	-	-	2	3
23	Kalimantan Timur	23	15	17	22	27
24	Kalimantan Utara	1	-	-	1	8
25	Sulawesi Utara	13	14	11	5	4
26	Sulawesi Tengah	8	6	7	4	7
27	Sulawesi Selatan	31	18	19	18	31
28	Sulawesi Tenggara	10	6	6	6	8
29	Gorontalo	3	1	1	4	4
30	Sulawesi Barat	7	7	3	4	3
31	Maluku	2	1	1	1	6
32	Maluku Utara	-	3	-	1	-
33	Papua	5	-	3	1	4
34	Papua Barat	8	-	4	-	7
35	Papua Selatan	-	-	-	1	1
36	Papua Tengah	-	-	-	1	1
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	1	1
Jumlah		285	177	139	185	233

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan
- =Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.9 Jumlah Pengaduan Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Pengaduan (Aduan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	12	19	16	13	13
2	Sumatera Utara	105	65	49	53	56
3	Sumatera Barat	16	15	18	21	30
4	Riau	46	49	32	43	37
5	Jambi	19	26	15	32	19
6	Sumatera Selatan	23	26	20	47	31
7	Bengkulu	12	6	13	9	6
8	Lampung	6	13	12	15	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	20	14	19	10
10	Kepulauan Riau	13	13	4	26	6
11	DKI Jakarta	44	22	14	51	13
12	Jawa Barat	78	90	85	146	123
13	Jawa Tengah	69	48	40	78	36
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	5	4	5	14
15	Jawa Timur	170	102	77	77	102
16	Banten	36	38	41	95	87
17	Bali	5	4	3	10	4
18	Nusa Tenggara Barat	23	13	10	12	2
19	Nusa Tenggara Timur	30	13	6	8	3
20	Kalimantan Barat	54	68	47	43	30
21	Kalimantan Tengah	46	57	39	24	20
22	Kalimantan Selatan	10	5	5	4	3
23	Kalimantan Timur	68	78	58	46	36
24	Kalimantan Utara	10	6	8	9	3
25	Sulawesi Utara	10	17	24	5	14
26	Sulawesi Tengah	18	20	15	9	15
27	Sulawesi Selatan	62	39	31	34	71
28	Sulawesi Tenggara	16	43	71	37	43
29	Gorontalo	6	1	1	4	12
30	Sulawesi Barat	15	6	8	10	23
31	Maluku	3	3	3	4	1
32	Maluku Utara	5	8	5	10	1
33	Papua	2	4	1	1	2
34	Papua Barat	9	14	7	9	5
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Jumlah		1.075	956	796	1.009	880

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan

- ==Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.10 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan (Aduan)											Jumlah
		Media Sosial	Surat	Telepon	Website	Email	Data Hotspot	Aplikasi Gakkum	Aplikasi LAPOR	Whatsapp Bot	Datang Langsung	Lain-Lain (WA dll)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	-	5	-	-	-	-	-	-	3	2	3	13
2	Sumatera Utara	2	25	-	9	-	-	-	-	9	10	1	56
3	Sumatera Barat	-	6	-	2	-	-	-	-	16	5	1	30
4	Riau	1	13	-	1	-	9	-	1	9	2	1	37
5	Jambi	1	3	2	-	1	1	-	-	6	4	1	19
6	Sumatera Selatan	-	13	-	1	-	6	-	-	9	2	-	31
7	Bengkulu	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6
8	Lampung	1	5	-	-	-	1	-	-	1	1	-	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	2	-	1	-	-	-	-	5	1	-	10
10	Kepulauan Riau	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
11	DKI Jakarta	-	7	-	3	-	-	-	-	2	1	-	13
12	Jawa Barat	2	32	-	18	-	-	-	-	23	7	41	123
13	Jawa Tengah	-	13	-	8	-	-	-	2	7	1	5	36
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	6	-	5	-	-	-	-	2	-	1	14
15	Jawa Timur	1	40	-	5	3	-	-	6	11	14	22	102
16	Banten	3	21	-	9	-	-	1	2	7	14	30	87
17	Bali	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
20	Kalimantan Barat	4	10	-	1	-	2	-	1	3	9	-	30
21	Kalimantan Tengah	-	14	-	-	-	2	-	-	2	-	2	20
22	Kalimantan Selatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
23	Kalimantan Timur	1	14	-	2	-	3	-	-	5	3	8	36
24	Kalimantan Utara	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
25	Sulawesi Utara	2	1	-	-	-	-	-	-	4	-	7	14
26	Sulawesi Tengah	-	6	-	-	-	1	-	-	1	3	4	15
27	Sulawesi Selatan	11	15	-	2	-	-	-	-	5	12	26	71
28	Sulawesi Tenggara	1	17	-	4	-	-	-	-	2	12	7	43
29	Gorontalo	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	8	12
30	Sulawesi Barat	-	16	-	-	-	2	-	-	-	-	5	23
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
34	Papua Barat	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
38	Papua Barat Daya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		34	303	2	75	4	29	1	13	135	109	175	880

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan
- =Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.11 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2020 - 2024

No	Sumber Pengaduan	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan (Aduan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Langsung	128	82	120	107	109
2	Surat	388	441	353	362	303
3	SMS	1	-	-	-	-
4	E mail	31	6	26	19	4
5	Telepon	26	13	2	4	2
6	Komnas HAM	-	-	-	-	-
7	Website	232	216	196	287	75
8	Aplikasi	47	30	5	6	43
9	Lain-lain (WA, media sosial)	222	168	94	224	344
Jumlah		1.075	956	796	1.009	880

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan

· --Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.12 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kategori Pengaduan Tahun 2020 - 2024

No	Sektor Industri	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kategori Pengaduan (Aduan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Lingkungan Hidup	517	511	452	703	640
2	Kehutanan	555	445	340	306	240
3	Non Lingkungan Hidup, Kehutanan	3	-	4	-	-
Jumlah		1.075	956	796	1.009	880

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan

· --Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.13 Jumlah Pengawasan Badan Usaha Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Pengawasan Badan Usaha (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	1	2	3	6	3
2	Sumatera Utara	5	8	10	12	11
3	Sumatera Barat	8	1	3	2	7
4	Riau	1	8	23	19	27
5	Jambi	1	1	7	7	3
6	Sumatera Selatan	1	3	9	19	19
7	Bengkulu	3	2	3	3	8
8	Lampung	7	10	9	6	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	-	1	4	11
10	Kepulauan Riau	1	12	6	14	11
11	DKI Jakarta	17	2	13	12	7
12	Jawa Barat	-	53	49	124	90
13	Jawa Tengah	3	16	20	21	27
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	3	-	2
15	Jawa Timur	-	26	34	74	43
16	Banten	16	16	27	35	45
17	Bali	-	-	4	4	3
18	Nusa Tenggara Barat	3	3	5	4	3
19	Nusa Tenggara Timur	5	2	1	6	3
20	Kalimantan Barat	4	10	26	31	25
21	Kalimantan Tengah	27	4	20	17	21
22	Kalimantan Selatan	62	4	13	11	14
23	Kalimantan Timur	13	14	59	50	47
24	Kalimantan Utara	13	4	9	3	4
25	Sulawesi Utara	-	12	18	17	9
26	Sulawesi Tengah	-	5	9	11	11
27	Sulawesi Selatan	1	19	20	28	14
28	Sulawesi Tenggara	1	4	13	14	25
29	Gorontalo	13	4	1	4	5
30	Sulawesi Barat	5	1	1	3	2
31	Maluku	11	1	7	7	11
32	Maluku Utara	6	1	6	11	9
33	Papua	-	3	3	3	2
34	Papua Barat	6	-	8	10	1
35	Papua Selatan	-	-	-	3	3
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	3	4
Jumlah		236	252	443	598	535

Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2024

Keterangan
- ==Tidak ada data/kegiatan

Lanjutan Tabel 6.14 Jumlah Pengawasan Badan Usaha Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Pengawasan Badan Usaha Berdasarkan Sektor Industri (Unit)											
		2020				2021				2022			
		IPJ	KARHUTLA	SDA	IPJ	KARHUTLA	SDA	IPJ	KARHUTLA	SDA	IPJ	KARHUTLA	SDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Sulawesi Tengah	1	-	4	1	-	4	2	-	8	1	-	9
27	Sulawesi Selatan	4	-	4	11	-	8	11	-	10	18	-	10
28	Sulawesi Tenggara	-	-	1	2	-	3	2	-	15	1	-	13
29	Gorontalo	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3	-	2
30	Sulawesi Barat	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1
31	Maluku	-	-	6	-	-	1	2	-	6	1	-	6
32	Maluku Utara	-	-	1	-	-	1	2	-	4	2	-	9
33	Papua	-	-	-	1	-	2	2	-	2	2	-	1
34	Papua Barat	3	-	2	-	-	-	4	-	4	4	-	6
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah		143	43	50	182	5	65	211	10	244	357	21	220
											286	14	235

Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2024

Keterangan:

- IPJ = Industri, Prasarana dan Jasa
- KARHUTLA = Kebakaran Hutan dan Lahan
- SDA = Sumber Daya Alam
- =Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.15 Jumlah Penerapan Sanksi Administratif Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif (Sanksi)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	3	1	3	1	3
2	Sumatera Utara	5	3	2	2	4
3	Sumatera Barat	1	2	3	1	-
4	Riau	7	9	7	3	2
5	Jambi	1	5	2	-	-
6	Sumatera Selatan	7	9	7	2	6
7	Bengkulu	1	1	2	1	-
8	Lampung	2	6	4	2	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	6	1	1	-
10	Kepulauan Riau	6	10	3	1	4
11	DKI Jakarta	1	4	5	11	5
12	Jawa Barat	50	54	38	34	38
13	Jawa Tengah	10	8	13	7	14
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1	1	-	3
15	Jawa Timur	22	21	34	6	14
16	Banten	7	13	18	26	32
17	Bali	1	-	2	1	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	1	5	2	-
19	Nusa Tenggara Timur	1	3	2	2	2
20	Kalimantan Barat	1	5	5	6	17
21	Kalimantan Tengah	4	4	7	6	9
22	Kalimantan Selatan	6	3	5	2	7
23	Kalimantan Timur	1	6	28	11	14
24	Kalimantan Utara	1	2	1	2	2
25	Sulawesi Utara	5	4	9	1	1
26	Sulawesi Tengah	1	6	3	4	5
27	Sulawesi Selatan	8	12	18	2	2
28	Sulawesi Tenggara	1	8	16	4	9
29	Gorontalo	2	-	4	1	1
30	Sulawesi Barat	1	1	2	-	-
31	Maluku	2	3	6	4	-
32	Maluku Utara	2	1	5	6	4
33	Papua	-	4	4	1	-
34	Papua Barat	5	6	4	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	2
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	2
Jumlah		165	222	269	153	206

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan

- ==Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.16 Jumlah Penerapan Sanksi Berdasarkan Jenis Sanksi Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Sanksi	Jumlah Penerapan Sanksi Berdasarkan Jenis Sanksi (Sanksi)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pencabutan Izin	-	-	-	-	-
2	Pembekuan Izin	-	-	-	-	-
3	Paksaan Pemerintah	153	202	238	149	206
4	Teguran Tertulis	12	14	7	-	-
5	Denda Administratif	-	6	24	4	-
Jumlah		165	222	269	153	206

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan
--Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.17 Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 Berdasarkan Tipologi Tahun 2020 - 2024

No	Tipologi	Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 (Kasus)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembalakan Liar	124	110	70	75	70
2	Perambahan Hutan	26	28	35	32	42
3	Peredaran Illegal TSL	48	38	35	45	64
4	Pencemaran Lingkungan	8	6	11	16	17
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	5	2	-	-	-
6	Kerusakan Lingkungan	9	2	2	4	4
7	Tindak Pidana Pencucian Uang	-	-	-	1	-
Jumlah		220	186	153	173	197

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Tabel 6.18 Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 (Kasus)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	2	3	4	4	1
2	Sumatera Utara	4	6	6	8	11
3	Sumatera Barat	4	4	10	2	12
4	Riau	14	13	10	16	17
5	Jambi	8	9	5	7	7
6	Sumatera Selatan	5	6	4	2	10
7	Bengkulu	-	-	-	-	2
8	Lampung	9	11	7	3	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	-	6	4	-
10	Kepulauan Riau	3	5	3	6	2
11	DKI Jakarta	-	3	-	-	-
12	Jawa Barat	11	1	7	9	5
13	Jawa Tengah	-	1	2	3	6
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	-	1	-	-
15	Jawa Timur	7	12	11	14	9
16	Banten	3	-	1	5	5
17	Bali	-	1	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	23	14	4	5	11
19	Nusa Tenggara Timur	5	3	7	2	6
20	Kalimantan Barat	22	14	10	17	18
21	Kalimantan Tengah	10	14	5	12	7
22	Kalimantan Selatan	3	-	2	3	3
23	Kalimantan Timur	20	19	9	12	11
24	Kalimantan Utara	2	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	4	2	7	2	6
26	Sulawesi Tengah	3	5	5	4	5
27	Sulawesi Selatan	17	18	9	18	14
28	Sulawesi Tenggara	5	8	4	-	7
29	Gorontalo	3	-	1	5	2
30	Sulawesi Barat	5	5	2	3	4
31	Maluku	4	2	1	-	4
32	Maluku Utara	-	-	-	2	1
33	Papua	4	1	6	1	1
34	Papua Barat	5	6	4	1	-
35	Papua Selatan	-	-	-	1	2
36	Papua Tengah	-	-	-	1	1
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	1	5
Jumlah		220	186	153	173	197

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan
- =Tidak ada data/kegiatan

Tabel 6.19 Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 Berdasarkan Tipologi Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani Hingga P21 (Kasus)					Jumlah
		Illegal Logging	Kerusakan Lingkungan	Pencemaran Lingkungan Hidup	Perambahan Hutan	TSL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	1	-	-	-	-	1
2	Sumatera Utara	1	-	1	-	9	11
3	Sumatera Barat	2	-	-	1	9	12
4	Riau	12	-	-	5	-	17
5	Jambi	2	-	-	-	5	7
6	Sumatera Selatan	-	-	-	5	2	7
7	Bengkulu	2	-	-	-	-	2
8	Lampung	-	-	-	-	2	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	2	2
10	Kepulauan Riau	-	-	2	-	-	2
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1	-	1	1	2	5
13	Jawa Tengah	-	-	4	-	2	6
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	5	-	-	3	1	9
16	Banten	-	2	3	-	-	5
17	Bali	-	-	-	-	2	2
18	Nusa Tenggara Barat	9	-	-	-	2	11
19	Nusa Tenggara Timur	4	-	-	-	2	6
20	Kalimantan Barat	10	-	-	3	4	17
21	Kalimantan Tengah	3	-	1	-	3	7
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	3	3
23	Kalimantan Timur	7	-	-	1	3	11
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	3	-	2	-	1	6
26	Sulawesi Tengah	-	-	1	4	-	5
27	Sulawesi Selatan	3	-	-	10	2	15
28	Sulawesi Tenggara	2	-	1	3	1	7
29	Gorontalo	-	2	-	-	-	2
30	Sulawesi Barat	-	-	-	3	-	3
31	Maluku	1	-	-	3	-	4
32	Maluku Utara	1	-	-	-	-	1
33	Papua	1	-	-	-	-	1
34	Papua Barat	-	-	1	-	4	5
35	Papua Selatan	-	-	-	-	2	2
36	Papua Tengah	-	-	-	-	1	1
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Jumlah		70	4	17	42	64	197

Sumber : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, 31 Desember 2024

Keterangan:
· TSL = Tumbuhan Satwa Liar
· -=Tidak ada data/kegiatan



BAB 7

INSPEKTORAT JENDERAL

Sumber Foto: M Musa Abdurrohman Inspektorat Jenderal

INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kehutanan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

**JUMLAH PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT KINERJA S.D. TAHUN 2024**

TEMUAN
7.632

REKOMENDASI
19.167

**TINDAK LANJUT
REKOMENDASI (TUNTAS)**

17.886

SISA REKOMENDASI

1.281

Tabel 7.1 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2024

No	Provinsi	Hasil Audit		Tindak Lanjut Rekomendasi (Tuntas)	Sisa Rekomendasi
		Temuan	Rekomendasi		
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	122	316	287	29
2	Sumatera Utara	325	952	835	117
3	Sumatera Barat	103	252	249	3
4	Riau	257	682	616	66
5	Kepulauan Riau	62	149	149	-
6	Jambi	226	589	565	24
7	Sumatera Selatan	190	470	442	28
8	Kepulauan Bangka Belitung	57	144	143	1
9	Bengkulu	69	218	165	53
10	Lampung	182	483	459	24
11	DKI Jakarta	980	2.237	1.925	312
12	Banten	64	166	163	3
13	Jawa Barat	448	1.143	1.118	25
14	Jawa Tengah	166	421	417	4
15	Yogyakarta	190	489	473	16
16	Jawa Timur	263	770	751	19
17	Bali	245	672	645	27
18	Nusa Tenggara Barat	115	356	352	4
19	Nusa Tenggara Timur	246	700	681	19
20	Kalimantan Barat	351	838	727	111
21	Kalimantan Tengah	280	665	533	132
22	Kalimantan Selatan	161	378	376	2
23	Kalimantan Timur	357	803	777	26
24	Kalimantan Utara	26	56	54	2
25	Sulawesi Utara	242	577	543	34
26	Gorontalo	81	169	169	-
27	Sulawesi Tengah	245	582	572	10
28	Sulawesi Barat	52	116	114	2
29	Sulawesi Selatan	443	1.014	994	20
30	Sulawesi Tenggara	209	533	531	2
31	Maluku	229	565	540	25
32	Maluku Utara	104	276	274	2
33	Papua Barat Daya	-	-	-	-
34	Papua Barat	276	686	617	69
35	Papua	266	700	630	70
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Selatan	-	-	-	-
Jumlah		7.632	19.167	17.886	1.281

Sumber: Inspektorat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan :
- = Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Tabel 7.2 Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi Tahun 2020 - 2024

No	Provinsi	Jumlah Audit Investigasi (Kasus)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	3	1	2	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	1
4	Riau	-	1	-	1	-
5	Kepulauan Riau	-	-	1	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
8	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	1	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	1	-	1
11	DKI Jakarta	-	1	2	-	1
12	Banten	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	2	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
15	D I Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	1	-
17	Bali	1	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	1	-	1
21	Kalimantan Tengah	1	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	1	-
23	Kalimantan Timur	-	1	-	1	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Barat	1	-	-	-	-
29	Sulawesi Selatan	1	-	-	-	1
30	Sulawesi Tenggara	1	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Papua	1	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Selatan	-	-	-	-	-
Jumlah		6	8	7	6	5

Sumber: Inspektorat Jenderal, 31 Desember 2024

- Keterangan:
- Pada pelaksanaan audit investigatif pada tahun 2021, jumlah kasus yang diaudit masing-masing sebanyak 9 kasus. Namun terdapat 3 kasus yang masing-masing dilakukan pada 2 Satker (Satker Pusat dan UPT di Provinsi). Hal serupa terjadi pada tahun 2022, dimana jumlah kasus yang diaudit investigatif sebanyak 8 kasus namun terdapat 2 kasus yang masing-masing dilakukan pada 2 Satker (Satker Pusat dan UPT di Provinsi). Begitupun pada tahun 2023, terdapat 1 kasus yang dilakukan pada 4 Provinsi. Juga pada tahun 2024, 2 kasus yang masing-masing dilakukan pada 2 Provinsi
 - - = Tidak ada laporan hasil audit investigasi

A photograph of two men in a lush green forest. The man on the left, wearing a light blue shirt with a patch that reads 'KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN, KEMERDEKAAN, DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS', is looking intently at a honeycomb. The man on the right, wearing a green and yellow camouflage protective suit and a matching hat, is holding the honeycomb with a wooden frame. The honeycomb is filled with many small, dark, round bees. A thick yellow horizontal line is positioned below the title 'BAB 8'.

BAB 8

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Foto: Tim Dokumentasi BP2SDM

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan memiliki mandat strategis dalam membina, mengembangkan, dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) sektor kehutanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. BP2SDM memiliki tugas pokok dalam menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan dibidang penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan serta pengembangan kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia kehutanan.

Rp 1.433.074.741.397

NILAI TRANSAKSI EKONOMI (NTE) KELOMPOK TANI HUTAN TAHUN 2024

Jumlah KTH Tahun 2024

26.300 UNIT

JUMLAH PENYULUH KEHUTANAN BERDASARKAN KEWENANGAN TAHUN 2024

10.259 Orang

Lulusan SMK Kehutanan Negeri Tahun 2024

487 Orang

Jumlah SDM Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi

1.250 Orang

Lulusan Pelatihan LHK Tahun 2024

14.061 Orang

Jumlah SDM Non Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi

427 Orang

Sumber Foto: Akmal Rafi BP2SDM



Tabel 8.1 Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Kelas Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Hutan Berdasarkan Kelas (Unit)			Jumlah
		KTH Pemula	KTH Madya	KTH Utama	
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	322	26	2	350
2	Sumatera Utara	286	10	6	302
3	Sumatera Barat	501	43	10	554
4	Riau	249	26	1	276
5	Kepulauan Riau	19	1	1	21
6	Jambi	131	31	4	166
7	Sumatera Selatan	29	6	4	39
8	Kepulauan Bangka Belitung	150	13	6	169
9	Bengkulu	426	26	1	453
10	Lampung	1.733	147	32	1.912
11	DKI Jakarta	18	1	-	19
12	Banten	248	39	15	302
13	Jawa Barat	4.612	549	39	5.200
14	Jawa Tengah	4.008	330	44	4.382
15	DI Yogyakarta	593	107	21	721
16	Jawa Timur	5.248	353	47	5.648
17	Bali	22	66	5	93
18	Nusa Tenggara Barat	490	18	8	516
19	Nusa Tenggara Timur	349	32	1	382
20	Kalimantan Barat	225	15	7	247
21	Kalimantan Tengah	266	61	2	329
22	Kalimantan Selatan	486	69	25	580
23	Kalimantan Timur	275	9	4	288
24	Kalimantan Utara	8	-	-	8
25	Sulawesi Utara	187	10	-	197
26	Gorontalo	33	2	5	40
27	Sulawesi Tengah	437	57	1	495
28	Sulawesi Barat	221	4	3	228
29	Sulawesi Selatan	1.646	84	9	1.739
30	Sulawesi Tenggara	346	20	10	376
31	Maluku	24	8	-	32
32	Maluku Utara	74	11	4	89
33	Papua Barat Daya	-	-	-	-
34	Papua Barat	90	4	2	96
35	Papua	13	10	2	25
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Selatan	26	-	-	26
Jumlah		23.791	2.188	321	26.300

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada KTH

Tabel 8.2 Jumlah Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024 (Orang)											
		Kementerian Kehutanan (Pusat)				Dinas Provinsi							
		PNS		PPPK		PNS		PPPK		PKSM		PKS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	-	2	4	3	28	25	15	17	138	7	4	-
2	Sumatera Utara	8	11	9	9	16	7	-	-	143	14	7	1
3	Sumatera Barat	2	3	4	1	30	24	7	6	130	14	-	-
4	Riau	12	7	2	2	20	7	15	11	95	3	168	10
5	Kepulauan Riau	-	-	7	4	-	-	-	-	11	2	-	-
6	Jambi	14	12	5	6	29	6	-	-	79	3	14	-
7	Sumatera Selatan	8	10	11	4	21	18	-	-	87	7	52	3
8	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	24	9	-	-	12	2	3	2
9	Bengkulu	1	2	2	9	26	10	-	-	67	2	2	-
10	Lampung	14	2	22	9	72	49	1	-	515	13	10	1
11	DKI Jakarta	18	19	8	2	5	2	-	-	1	1	-	-
12	Banten	4	2	4	9	5	1	-	-	183	13	-	-
13	Jawa Barat	18	25	16	5	225	57	-	-	1,131	44	33	1
14	Jawa Tengah	10	17	3	10	242	100	2	4	1,189	44	44	6
15	DI Yogyakarta	6	13	18	9	15	12	4	5	191	10	-	-
16	Jawa Timur	11	11	24	10	153	73	35	9	509	21	71	1
17	Bali	3	3	4	8	23	2	-	-	136	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	7	2		1	48	14	6	4	129	4	3	-
19	Nusa Tenggara Timur	19	9	1		46	38	-	-	11	-	-	-
20	Kalimantan Barat	11	5	1	2	13	7	8	5	66	5	42	3
21	Kalimantan Tengah	6	2	4	5	39	15	-	-	39	2	128	8
22	Kalimantan Selatan	3	-	1		27	23	-	-	196	7	15	-
23	Kalimantan Timur	6	4	10	5	19	16	6	6	53	1	125	12
24	Kalimantan Utara	2	2	15	6	41	30	-	-	5	3	33	2
25	Sulawesi Utara	3	4	1	3	31	29	5	4	40	2	-	-
26	Gorontalo	2	2	10	6	3	6	-	-	4	-	3	-
27	Sulawesi Tengah	8	8	7	4	40	23	15	13	80	5	5	1
28	Sulawesi Barat	-	-	1	2	16	5	-	-	104	3	-	-
29	Sulawesi Selatan	8	19	23	22	111	89	2	4	285	54	-	-
30	Sulawesi Tenggara	4	7	1		32	24	-	-	78	15	-	1
31	Maluku	5	4	9	7	7	8	-	-	3	-	6	-
32	Maluku Utara	2	1	3	4	15	15	2	1	12	1	3	1
33	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	11	8	9	6	23	24	-	-	-	-	35	6
35	Papua	8	8	19	12	10	9	-	-	5	-	16	2
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Selatan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		234	224	258	185	1.456	778	123	89	5.727	302	822	61
		458		443		2.234		212		6.029		883	

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Keterangan :

- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- PKSM = Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
- PKS = Penyuluh Kehutanan Swasta
- L = Laki-Laki
- P = Perempuan
- - = Tidak ada penyuluh

Tabel 8.3 Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Komoditas Tahun 2022

No	Jenis Komoditi	Nilai Transaksi Ekonomi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)
1	2	3
1	Biomassa dan Bioenergy	574.972.000
2	Buah-Buahan Dan Biji-Bijian	48.977.816.374
3	Getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu	17.651.695.201
4	Hasil Hutan Kayu	47.042.719.250
5	Hasil Wana Mina (Silvofishery)	9.092.337.147
6	Hasil Wana Tani Ternak (Agrosilvopastura)	416.900.000
7	Hasil Wana Ternak (Silvopastura)	9.678.625.000
8	Jamur	8.242.181.147
9	Kerajinan	5.222.717.147
10	Kopi	238.917.717.117
11	Lebah Madu	6.696.040.750
12	Minyak Atsiri	1.089.184.600
13	Nira	6.971.906.750
14	Pelatihan dan Pemagangan Pada Wanawiyata Widyakarya	7.750.000
15	Pemanfaatan Air	122.124.000
16	Pembibitan	7.063.306.147
17	Pemulihan Lingkungan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	1.088.000.000
18	Rotan, Sagu, Nipah, Aren, Bambu	2.277.821.000
19	Sarang Burung Walet	402.200.000
20	Sutera Alam	964.800.000
21	Tanaman Hias	820.313.000
22	Tanaman Obat	13.076.854.247
23	Tanaman Pangan Hasil Agroforestry	16.160.252.505
24	Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Penangkaran	503.350.000
25	Wisata Alam	3.399.557.750
Jumlah		446.461.141.132

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Tabel 8.4 Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Komoditas Tahun 2023

No	Jenis Komoditi	Nilai Transaksi Ekonomi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)
1	2	3
1	Biomassa dan Bioenergy	1.314.076.500
2	Buah-Buahan Dan Biji-Bijian	80.044.489.639
3	Getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu	32.646.005.156
4	Hasil Hutan Kayu	105.969.000.000
5	Hasil Wana Mina (Silvofishery)	13.098.929.000
6	Hasil Wana Tani Ternak (Agrosilvopastura)	30.978.015.000
7	Hasil Wana Ternak (Silvopastura)	55.042.703.561
8	Jamur	11.586.555.607
9	Jasa Aliran Air	10.000.000
10	Kerajinan	7.791.878.147
11	Kopi	188.727.000.000
12	Lebah Madu	12.815.400.476
13	Minyak Atsiri	1.520.570.500
14	Nira	16.801.355.631
15	Pelatihan dan Pemagangan Pada Wanawiyata Widyakarya	158.910.005
16	Pemanfaatan Air	224.329.820
17	Pembibitan	12.249.684.000
18	Pemulihan Lingkungan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	171.510.018
19	Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon	-
20	Rotan, Sagu, Nipah, Aren, Bambu	7.829.628.080
21	Sarang Burung Walet	257.450.000
22	Sutera Alam	481.576.000
23	Tanaman Hias	1.170.052.000
24	Tanaman Obat	15.444.722.076
25	Tanaman Pangan Hasil Agroforestry	65.252.622.399
26	Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Penangkaran	19.918.500.941
27	Wisata Alam	5.274.206.500
Jumlah		686.779.171.056

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Tabel 8.5 Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Berdasarkan Komoditas Tahun 2024

No	Jenis Komoditi	Nilai Transaksi Ekonomi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)
1	2	3
1	Biomassa dan Bioenergy	2.639.775.511
2	Buah-Buahan Dan Biji-Bijian	118.437.764.190
3	Getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu	41.669.688.710
4	Hasil Hutan Kayu	410.578.207.407
5	Hasil Wana Mina (Silvofishery)	21.631.321.540
6	Hasil Wana Tani Ternak (Agrosilvopastura)	26.950.874.767
7	Hasil Wana Ternak (Silvopastura)	51.418.714.773
8	Jamur	31.056.007.865
9	Jasa Aliran Air	22.500.000
10	Kerajinan	25.408.596.172
11	Kopi	354.773.834.359
12	Lebah Madu	19.648.643.594
13	Minyak Atsiri	8.735.906.940
14	Nira	21.694.133.299
15	Pelatihan dan Pemagangan Pada Wanawiyata Widyakarya	152.920.000
16	Pemanfaatan Air	249.026.860
17	Pembibitan	22.573.469.409
18	Pemulihan Lingkungan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	68.365.000
19	Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon	6.600.000
20	Rotan, Sagu, Nipah, Aren, Bambu	20.530.042.998
21	Sarang Burung Walet	8.400.000
22	Sutera Alam	1.358.999.000
23	Tanaman Hias	5.492.545.000
24	Tanaman Obat	40.695.087.975
25	Tanaman Pangan Hasil Agroforestry	173.441.131.663
26	Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Penangkaran	23.942.325.117
27	Wisata Alam	9.889.859.248
Jumlah		1.433.074.741.397

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Tabel 8.6 Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Tahun 2022 - 2024

No	Provinsi	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Tahun 2022-2024 (Rp)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Aceh	433.300.000	525.993.000	182.925.000
2	Sumatera Utara	72.116.000	3.047.365.000	1.500.000
3	Sumatera Barat	596.393.000	839.503.000	257.331.000
4	Riau	-	237.905.000	327.930.000
5	Kepulauan Riau	-	-	-
6	Jambi	5.184.750.000	4.192.848.000	10.462.277.300
7	Sumatera Selatan	840.007.500	2.307.753.500	680.100.000
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.279.075.000	382.329.000	263.540.500
9	Bengkulu	8.808.347.294	13.738.452.000	13.873.375.500
10	Lampung	262.881.865.541	234.767.159.636	323.206.307.012
11	DKI Jakarta	24.407.000	71.559.000	144.312.000
12	Banten	8.648.280.500	4.233.522.300	6.225.098.900
13	Jawa Barat	65.468.040.394	87.175.908.742	332.555.476.456
14	Jawa Tengah	29.621.389.907	72.593.745.525	66.951.836.338
15	DI Yogyakarta	4.261.431.000	4.366.346.420	5.669.990.000
16	Jawa Timur	35.793.020.746	189.007.510.786	624.529.390.335
17	Bali	658.750.000	395.200.000	823.861.972
18	Nusa Tenggara Barat	2.425.609.750	23.721.420.051	4.993.607.500
19	Nusa Tenggara Timur	571.750.000	4.288.020.750	517.313.607
20	Kalimantan Barat	787.045.000	4.108.974.300	3.266.083.500
21	Kalimantan Tengah	5.060.366.000	5.428.360.000	3.897.634.598
22	Kalimantan Selatan	2.059.856.000	1.843.026.569	3.854.778.952
23	Kalimantan Timur	1.389.725.000	522.130.000	1.343.366.500
24	Kalimantan Utara	234.000.000	143.100.000	-
25	Sulawesi Utara	1.149.420.000	4.570.423.000	1.732.454.000
29	Gorontalo	230.710.000	1.647.710.000	910.832.000
26	Sulawesi Tengah	342.500.000	1.002.790.000	17.246.026.376
30	Sulawesi Barat	3.000.000	1.176.900.000	1.403.715.000
27	Sulawesi Selatan	6.980.905.500	18.995.345.035	6.673.157.635
28	Sulawesi Tenggara	222.325.000	544.659.900	273.550.016
31	Maluku	414.300.000	285.661.000	216.701.250
32	Maluku Utara	600	461.015.000	342.068.150
33	Papua Barat Daya	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	70.000.000
35	Papua	17.855.000	156.800.009	178.200.000
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Selatan	-	-	-
Jumlah		446.461.141.132	686.779.436.523	1.433.074.741.397

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada data/ data bernilai nol

Tabel 8.7

Lulusan Siswa SMK Kehutanan Negeri Yang Kompeten dan Bersertifikat Per Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Lulusan (Orang)																				GRAND TOTAL					
		SMKKN KADIPATEN				SMKKN PEKANBARU				SMKKN SAMARINDA				SMKKN MAKASSAR				SMKKN MANOKWARI									
		L	P	TOTAL		L	P	TOTAL		L	P	TOTAL		L	P	TOTAL		L	P	TOTAL		L	P	TOTAL		L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	ACEH	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1							
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15							
3	SUMATERA BARAT	-	1	1	10	3	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	14							
4	RIAU	-	-	-	-	29	7	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	7	36							
5	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3							
6	JAMBI	-	-	-	-	11	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	13							
7	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7							
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9	BENGKULU	1	-	1	6	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8							
10	LAMPUNG	3	-	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6							
11	DKI JAKARTA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2							
12	BANTEN	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5							
13	JAWA BARAT	27	8	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	28	8	36							
14	JAWA TENGAH	12	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	15							
15	DI YOGYAKARTA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2							
16	JAWA TIMUR	21	6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	27							
17	BALI	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4							
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	3	1	4							
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	-	-	-	6	3	9							
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16	-	-	-	-	-	-	7	9	16							
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	6	2	8							
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	3	1	4							
23	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	51	18	69	-	-	-	-	-	-	51	18	69							
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	4	1	5							
25	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7	-	-	-	6	1	7							
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	-	-	-	6	2	8							
26	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16	-	-	-	13	3	16							

Lanjutan Tabel 8.7 Lulusan Siswa SMK Kehutanan Negeri Yang Kompeten dan Bersertifikat Per Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Lulusan (Orang)																			GRAND TOTAL				
		SMKKN KADIPATEN				SMKKN PEKANBARU				SMKKN SAMARINDA				SMKKN MAKASSAR				SMKKN MANOKWARI							
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	-	-	4	1	5	-	-	-	5	
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	7	39	-	-	-	32	7	39	-	-	-	39	
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	-	-	-	6	2	8	-	-	-	8	
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	26	20	6	26	26	
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	-	-	4	2	6	4	2	6	6	
33	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	29	20	9	29	29	
35	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	24	20	4	24	24	
36	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		77	25	102	79	24	103	71	31	102	79	22	101	60	19	79	366	121	487						

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada data/ data bernilai nol

Tabel 8.8 Jumlah Lulusan Pelatihan LHK Tahun 2024

NO	NAMA SATKER	JENIS PELATIHAN (Orang)					
		APARATUR		NON APARATUR		VOKASI	
		L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PUSDIKLAT (Wilayah pelayanan seluruh Indonesia)	1.190	574	568	358	205	115
2	BPLHK BOGOR (Wilayah pelayanan : DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung)	42	18	174	26	787	273
3	BPLHK KADIPATEN (Wilayah pelayanan : Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta)	398	721	169	32	813	227
4	BPLHK PEMATANG SIANTAR (Wilayah pelayanan : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat)	45	15	124	36	673	447
5	BPLHK PEKANBARU (Wilayah pelayanan : Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Sumetra Selatan)	106	34	183	21	809	271
6	BPLHK SAMARINDA (Wilayah pelayanan : Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara)	138	48	384	63	712	379
7	BPLHK MAKASSAR (Wilayah pelayanan : Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan)	208	86	92	28	654	426
8	BPLHK KUPANG (Wilayah pelayanan : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali)	34	26	185	64	699	381
TOTAL		2.161	1.522	1.879	628	5.352	2.519
JUMLAH LULUSAN PELATIHAN LHK TAHUN 2024		3.683		2.507		7.871	
		14.061					
JUMLAH LULUSAN PELATIHAN LHK TAHUN 2023		5.469					
JUMLAH LULUSAN PELATIHAN LHK TAHUN 2022		4.377					
JUMLAH LULUSAN PELATIHAN LHK TAHUN 2021		11.521					
JUMLAH LULUSAN PELATIHAN LHK TAHUN 2020		9.781					

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Keterangan:

• - = Tidak ada data/ data bernilai nol

Tabel 8.9 Jumlah SDM Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi

No	Provinsi	Aparatur (Orang)							
		PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	POLISI HUTAN (POLHUT)	TOTAL APARATUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	
4	Riau	12	15	108	17	3	70	225	
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	1	6	3	3	-	2	15	
11	Dki Jakarta	21	33	-	-	7	3	64	
12	Jawa Barat	39	30	240	40	13	94	456	
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kalimantan Tengah	9	5	23	21	-	1	59	
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kalimantan Timur	7	16	33	5	1	52	114	
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	
29	Sulawesi Tengah	-	-	5	2	-	-	7	
26	Sulawesi Selatan	13	17	129	13	-	130	302	

Lanjutan Tabel 8.9 Jumlah SDM Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi

No	Provinsi	Aparatur (Orang)							TOTAL APARATUR
		PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	POLISI HUTAN (POLHUT)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	
27	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	3	4	-	-	1	-	8	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	
35	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	
36	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	
37	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		105	126	541	101	25	352	1.250	

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada data/data bernilai nol

Tabel 8.10 Jumlah SDM Non Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi

No	Provinsi	Non Aparatur (Orang)															PENGUJI PENY- USUN AMDAL	PETUGAS PEN- GAMBIL CONTOH UJI AIR	TOTAL NON APARA- TUR
		ANGGOTA TIM PENY- USUN AMDAL	GANISPH PEMA- NENAN HASIL HUTAN	GANISPH PEMAN- FAATAN HHBK MINYAK	GANISPH PEMAN- FAATAN HHBK BATANG	GANISPH PEMAN- FAATAN HHBK GETAH	GANISPH PEMBI- NAAN HUTAN	GANISPH PENGUJI- AN KAYU BULAT	GANISPH PENGUJI- AN KAYU GERGA- JIAN	GANISPH PENGUJI- AN KAYU LAPIS	GANISPH PEN- GUKURAN DAN PER- PETAAN HUTAN	GANISPH PEREN- CANAAN HUTAN	GANISPH PEREN- CANAAN WISATA ALAM	KETUA TIM PENY- USUN AMDAL	PELAKSA- NA PER- AWATAN AC RESI- DENSIAL	PENANG- GUNG- JAWAB PENGEN- DALIAN PENCE- MARAN AIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	9	-	-	-	5	55	-	1	5	21	-	-	-	-	-	-	96
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dki Jakarta	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	10	-	48
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	20	25	-	-	51
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	11	-	25	36	-	-	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	92
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	16	-	3	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	33
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6

Lanjutan Tabel 8.10 Jumlah SDM Non Aparatur LHK Bersertifikat Kompetensi

No	Provinsi	Non Aparatur (Orang)																	
		ANGGOTA TIM PENY- USUN AMDAL	GANISPH PEMA- NENAN HASIL HUTAN	GANISPH PEMAN- FAATAN HHBK MINYAK	GANISPH PEMAN- FAATAN HHBK BATANG	GANISPH PEMAN- FAATAN HHBK GETAH	GANISPH PEMBI- NAAN HUTAN	GANISPH PENGUJI- AN KAYU BULAT	GANISPH PENGUJI- AN KAYU CERCA- JIAN	GANISPH PENGUJI- AN KAYU LAPIS	GANISPH PEN- GUKURAN DAN PER- PETAAN HUTAN	GANISPH PEREN- CANAAN HUTAN	GANISPH PEREN- CANAAN WISATA ALAM	KETUA TIM PENY- USUN AMDAL	PELAKSA- NA PER- AWATAN AC RESI- DENSIAL	PENANG- GUNG- JAWAB PENGEN- DALIAN PENCE- MARAN AIR	PENGUJI PENY- USUN AMDAL	PETUGAS PEN- GAMBIL CONTOH UJI AIR	TOTAL NON- APARA- TUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tengah	-	-	1	1	1	33	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	41
26	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34	9	42	37	34	38	75	3	1	11	22	15	15	20	55	10	6	427

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 31 Desember 2024

Keterangan:
- = Tidak ada data/data bernilai nol



BAB 9

**DUKUNGAN
MANAJEMEN**

Sumber Foto: Simon Onggo SETJEN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sumber Foto: Trimulya Rizkinda SETJEN

DUKUNGAN MANAJEMEN

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Kehutanan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama administrasi dan tata kelola internal kementerian. Setjen bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja Eselon I, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi utamanya mencakup pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset negara, tata laksana birokrasi, serta pelaporan dan perencanaan organisasi.

19.650 ORANG

JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

Rp 7.818.231.118.035

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Rp 8.331.506.348.359

JUMLAH PENERIMAAN PNPB DARI SEKTOR LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

Rp 16.612.419.355.218

NILAI NERACA BMN TAHUN 2024

Tabel 9.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenjang Kepangkatan PNS s.d. Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		Total
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
1	I/c	8	-	8
2	I/d	29	-	29
3	II/a	461	-	461
4	II/b	138	-	138
5	II/c	724	-	724
6	II/d	818	-	818
7	III/a	2.123	-	2.123
8	III/b	2.574	-	2.574
9	III/c	1.855	-	1.855
10	III/d	3.040	-	3.040
11	IV/a	1.245	-	1.245
12	IV/b	572	-	572
13	IV/c	171	-	171
14	IV/d	56	-	56
15	IV/e	21	-	21
16	IX	-	2.626	2.626
17	V	-	2.853	2.853
18	VII	-	336	336
Jumlah		13.835	5.815	19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan :
- = Tidak ada pegawai

Tabel 9.2 Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Eselonisasi s.d. Tahun 2024

No	Eselonisasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi (Orang)		Total
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
1	Fungsional	8.262	5.815	14.077
2	I-A	11	-	11
3	I-B	5	-	5
4	II-A	83	-	83
5	II-B	18	-	18
6	III-A	326	-	326
7	III-B	78	-	78
8	IV-A	750	-	750
9	Pelaksana	4.302	-	4.302
Jumlah		13.835	5.815	19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan:
- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- = Tidak ada pegawai

Tabel 9.3 Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenis ASN s.d. Tahun 2024

No	Jenis Aparatur Negara	Jumlah Pegawai (Orang)
1	2	3
1	PNS	13.835
2	PPPK	5.815
Jumlah		19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 9.4 Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin s.d. Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)		Total
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
1	Laki-laki	9.505	4.336	13.841
2	Perempuan	4.330	1.479	5.809
Jumlah		13.835	5.815	19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- - = Tidak ada pegawai

Tabel 9.5 Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan s.d. Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Orang)		Total
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
1	DI	2	-	2
2	DII	8	-	8
3	DIII	1.161	338	1.499
4	DIV	95	9	104
5	S1	5.754	2.599	8.353
6	S2	2.905	17	2.922
7	S3	179	-	179
8	SD	71	-	71
9	SLTA	3.554	2.852	6.406
10	SLTP	106	-	106
Jumlah		13.835	5.815	19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan :

- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- - = Tidak ada pegawai

Tabel 9.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional s.d. Tahun 2024

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis Jabatan Fungsional (Orang)		Total
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
1	Analisis Anggaran	7	-	7
2	Analisis Hukum	42	35	77
3	Analisis Kebijakan	115	81	196
4	Analisis Kepegawaian	1	-	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	187	-	187
6	Analisis SDM Aparatur	115	209	324
7	Arsiparis	142	349	491
8	Asisten Apoteker	-	1	1
9	Assessor SDM Aparatur	9	1	10
10	Auditor	122	-	122
11	Bidan	1	2	3
12	Dokter	6	-	6
13	Dokter Gigi	7	1	8
14	Fisioterapis	1	-	1
15	Guru	84	9	93
16	Instruktur	-	2	2
17	Manggala Agni	-	2386	2386
18	Medik Veteriner	-	15	15
19	Penata Laksana Barang	5	-	5
20	Penerjemah	2	-	2
21	Pengawas Lingkungan Hidup	174	-	174
22	Pengelola Ekosistem Laut dan pesisir	1	-	1
23	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	92	135	227
24	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3	-	3
25	Pengendali Dampak Lingkungan	328	123	451
26	Pengendali Ekosistem Hutan	2.936	1.238	4.174
27	Penggerak Swadaya Masyarakat	9	-	9
28	Penyuluh Kehutanan	444	487	931
29	Penyuluh Lingkungan Hidup	89	15	104
30	Perancang Peraturan Perundang-undangan	24	-	24
31	Perawat	5	2	7
32	Perawat Gigi	-	1	1
33	Perekam Medis	-	1	1
34	Perencana	143	258	401
35	Polisi Kehutanan	2.619	58	2.677
36	Pranata Humas	11	99	110
37	Pranata Keuangan APBN	136	-	136
38	Pranata Komputer	151	244	395
39	Pranata Laboratorium Kesehatan	2	1	3
40	Pranata SDM Aparatur	37	10	47
41	Pustakawan	19	1	20
42	Radiografer	1	-	1
43	Statistisi	2	-	2

Lanjutan Tabel 9.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional s.d. Tahun 2024

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis Jabatan Fungsional (Orang)		Total
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
44	Surveyor Pemetaan	91	50	141
45	Terapis Gigi dan Mulut	-	1	1
46	Widyaiswara	99	-	99
47	Non Fungsional, Struktural/Pelaksana	5.573	-	5.573
Jumlah		13.835	5.815	19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- - = Tidak ada pegawai
- Data masih melingkupi Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 9.7

Jumlah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Kelompok Usia s.d. Tahun 2024

No	Usia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia (Orang)		
		PNS	PPPK	Total
1	2	3	4	5
1	< 20	-	3	3
2	>= 60	34	-	34
3	20 - 24	184	98	282
4	25 - 29	1.097	1.174	2.271
5	30 - 34	1.448	1.693	3.141
6	35 - 39	1.821	1.365	3.186
7	40 - 44	3.028	875	3.903
8	45 - 49	2.528	414	2.942
9	50 - 54	2.358	165	2.523
10	55 - 59	1.337	28	1.365
Jumlah		13.835	5.815	19.650

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan:

- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- - = Tidak ada pegawai

Tabel 9.8 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 - 2024 (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Jenderal	496.197.815.516,00	279.155.512.786,00	454.021.814.679,00	307.931.777.269,00	188.477.156.853,00
2	Inspektorat Jenderal	155.794.790,00	-	77.088.760,00	215.028.423,00	305.695.759,00
3	Pengelolaan Hutan Lestari	2.486.461.059.568,00	2.978.488.288.842,00	2.894.922.999.557,00	2.836.290.274.338,00	3.546.611.255.400,00
4	PDASRH	13.199.592.821,00	7.242.506.002,00	9.218.243.696,00	4.355.107.929,00	5.235.693.879,00
5	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	84.784.260.084,00	82.019.561.404,00	138.090.466.752,00	192.358.787.189,00	236.382.287.991,00
6	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.937.034.298.976,00	2.479.505.835.151,00	2.941.218.580.261,00	2.628.727.697.961,00	3.221.843.550.775,00
7	Badan Litbang & Inovasi	2.492.217.621,00	2.846.895.010,00	2.075.419.829,00	1.794.570.789,00	2.630.770.831,00
8	BP2SDM	1.239.616.724,00	778.560.391,00	1.169.750.287,00	1.482.740.233,00	1.657.572.619,00
9	PSKL	613.467.351,00	403.606.604,00	690.988.570,00	176.302.579,00	164.425.024,00
10	Gakkum	31.885.726.436,00	38.115.708.543,00	137.788.892.488,00	623.893.083.613,00	1.124.077.754.513,00
11	PPI	674.907.694,00	709.906.871,00	679.413.851,00	537.515.822,00	1.021.528.239,00
12	PSLB3	3.369.743.758,00	551.790.314,00	613.099.628,00	521.395.395,00	2.348.677.342,00
13	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.613.166.364,00	9.556.921.816,00	6.055.656.218,00	547.000.208,00	207.302.859,00
14	Badan Rawa Gambut	-	-	604.969.729,00	1.137.111.520,00	542.676.275,00
Jumlah		5.060.721.667.703	5.879.375.093.734	6.587.227.384.305	6.599.968.393.268	8.331.506.348.359

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan :
- = Tidak ada penerimaan PNBP

Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
		MAP	Target	Penerimaan
1	2	3	4	5
I	Sekretariat Jenderal	-	27.801.227.000,00	188.477.156.853,00
	- PNBP Fungsional	-	17.866.254.000,00	10.173.389.242,00
	1 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425619	17.866.254.000,00	10.173.389.242,00
	2 Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425255	-	-
	3 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425282	-	-
	4 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	424911	-	-
	5 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	424134	-	-
	- PNBP Umum	-	9.934.973.000,00	178.303.767.611,00
	1 Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	425717	-	162.990.708.431,00
	2 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	807.650.275,00
	3 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	9.176.267.000,00	13.402.752.529,00
	4 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	425134	758.706.000,00	758.705.177,00
	5 Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	425311	-	-
	6 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	425692	-	515.000,00
	7 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	2.210.676,00
	8 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	191.196.580,00
	9 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	23.144.339,00
	10 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
	11 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	425916	-	-
	12 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TCR Pensiunan PNS	425931	-	109.502.614,00
	13 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	425761	-	-
	14 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	15 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	17.381.990,00
	16 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	425792	-	-
	17 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	425722	-	-
	18 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	-
	19 Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	20 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	424119	-	-

Lanjutan Tabel 9.9 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1		2	3	4	5
II	Inspektorat Jenderal		-	-	305.695.759,00
	- PNBP Umum		-	-	305.695.759,00
	1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	-
	2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	275.755.835,00
	3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	3.091.324,00
	4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	11.658.600,00
	5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	15.190.000,00
	6	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	7	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425619	-	-
	8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	-
	9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
III	Pengelolaan Hutan Lestari		-	3.689.062.326.000,00	3.546.611.255.400,00
	- PNBP Fungsional		-	3.689.062.326.000,00	3.545.640.418.098,00
	1	Pendapatan Dana Reboisasi	421411	2.401.794.280.000,00	2.190.815.416.556,00
	2	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	421421	1.249.643.046.000,00	1.210.124.865.868,00
	3	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH)	421435	37.625.000.000,00	123.980.767.500,00
	4	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425829	-	18.026.868.174,00
	5	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425612	-	2.692.500.000,00
	- PNBP Umum		-	-	970.837.302
	1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	-
	2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	3.800.000,00
	3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	82.422.691,00
	4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	34.476.246,00
	5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	2.653.166,00
	6	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	425916	-	-
	7	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	126.936.551,00

Lanjutan Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
		MAP	Target	Penerimaan
1	2	3	4	5
II	8 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	425113	-	-
	9 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	10 Pendapatan dari penutupan rekening	425765	-	-
	11 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	719.479.238,00
	12 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	13 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	329.228,00
	14 Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	740.182,00
IV	Pengelolaan DAS Rehabilitasi Hutan	-	68.430.000,00	5.235.693.879,00
	- PNBP Fungsional	-	68.430.000,00	146.932.160,00
	1 Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425255	30.000.000,00	28.245.610,00
	2 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425282	38.430.000,00	118.686.550,00
	3 Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425612	-	-
	4 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425619	-	-
	- PNBP Umum	-	-	5.088.761.719
	1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	168.819.500,00
	2 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	168.551.630,00
	3 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	65.203.273,00
	4 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	2.590.432.003,00
	5 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	52.228.378,00
	6 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	1.655.074.487,00
	7 Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	380.070,00
	8 Pendapatan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	425991	-	672.437,00
	9 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	9.447.447,00
	10 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	-	-
	11 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	368.734.612,00
	12 Pendapatan Denda Lainnya	425839	-	-
	13 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	9.217.882,00
	14 Pendapatan Jasa Lainnya	425699	-	-

Lanjutan Tabel 9.9 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1		2	3	4	5
IV	15	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
		Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	-	124.717.836.000,00	236.382.287.991,00
V		- PNBP Fungsional	-	124.717.836.000,00	231.163.413.369,00
	1	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425255	6.099.900.000,00	6.081.965.000,00
	2	Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	425437	-	51.230.000,00
	3	Pendapatan Wisata Alam	425611	98.166.073.000,00	200.081.690.056,00
	4	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425612	20.451.863.000,00	24.943.166.813,00
	5	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	425151	-	-
	6	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425829	-	2.912.500,00
	7	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425619	-	2.449.000,00
	8	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425282	-	-
		- PNBP Umum	-	-	5.218.874.622,00
	1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	546.814.299,00
	2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	706.015.632,00
	3	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	425132	-	-
	4	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	425134	-	20.000.000,00
	5	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	425746	-	226,00
	6	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	2.868.905,00
	7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	83.921.857,00
	8	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	-	555.672.250,00
	9	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	91.833.626,00
	10	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	467.916.186,00
	11	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	142.285.481,00
	12	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	170.243.777,00
	13	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	425917	-	-

Lanjutan Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1		2	3	4	5
V	14	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	425918	-	-
	15	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	16	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	425997	-	-
	17	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	3.178.789,00
	18	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	2.407.864.194,00
	19	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	425692	-	-
	20	Pendapatan Jasa Lainnya	425699	-	-
	21	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	425792	-	-
	22	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	425121	-	20.085.000,00
	23	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	425991	-	174.400,00
VI	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		-	2.310.937.674.000,00	3.221.843.550.775,00
	- PNBP Fungsional		-	2.310.937.674.000,00	3.214.198.493.797,00
	1	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	421441	2.310.937.674.000,00	3.214.198.493.797,00
	2	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425255	-	-
	- PNBP Umum		-	-	7.645.056.978,00
	1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	98.319.744,00
	2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	5.715.722.833,00
	3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	191.333.729,00
	4	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	1.285.701.344,00
	5	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	425125	-	-
	6	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	20.686.723,00
	7	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	8	Pendapatan Denda Lainnya	425839	-	-
	9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	22.981.800,00
	10	Pendapatan Bunga Lainnya	425719	-	-
	11	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	425792	-	-
	12	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	299.850.795,00
	13	Pendapatan Jasa Lainnya	425699	-	-
	14	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	10,00

Lanjutan Tabel 9.9 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1		2	3	4	5
VI	15	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	16	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	425121	-	10.460.000,00
VII	Badan Litbang dan Inovasi		-	967.328.000,00	2.630.770.831,00
	- PNBP Fungsional		-	967.328.000,00	1.678.999.120,00
	1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425282	899.160.000,00	1.578.508.000,00
	2	Pendapatan Hasil Penelitian/ Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	425434	38.593.000,00	51.814.500,00
	3	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425619	27.975.000,00	48.107.500,00
	4	Jasa Perpustakaan	425692	1.600.000,00	500.000,00
	5	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425612	-	69.120,00
	6	Pendapatan layanan pendidikan dan atau pelatihan	425421	-	-
	- PNBP Umum		-	-	951.771.711,00
	1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	348.442.173,00
	2	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari pengelola Barang	425149	-	-
	3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	180.344.285,00
	4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	38.440.965,00
	5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	51.603.868,00
	6	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
	7	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	2.211.400,00
	8	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	-	-
	9	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	293.022.082,00
	10	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	25.625.000,00
	11	Pendapatan Jasa Lainnya	425699	-	-
	12	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	1.393.938,00
	13	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	425916	-	-
	14	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	15	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	425918	-	-
	16	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	425997	-	-

Lanjutan Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1	2	3	4	5	
VII	17	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425991	-	-
	18	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	19	Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	425121	-	10.688.000,00
VIII	Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM		-	602.559.000,00	1.657.572.619,00
	- PNBP Fungsional		-	298.000.000,00	594.775.000,00
	1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	425151	298.000.000,00	594.075.000,00
	2	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	425619	-	700.000,00
	- PNBP Umum		-	304.559.000,00	1.062.797.619,00
	1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	280.596,00
	2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	-
	3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	425792	-	-
	4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	-	63.000.000,00
	5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	35.286.810,00
	6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	48.266.730,00
	7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
	8	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	425918	-	-
	9	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	304.559.000,00	461.168.418,00
	10	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	110.582.192,00
	11	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	12	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	342.627.547,00
	13	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	1.582.724,00
	14	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	425121	-	-
	15	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	2.602,00
IX	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		-	-	164.425.024,00
	- PNBP Umum		-	-	164.425.024,00
	1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	23.351.309,00

Lanjutan Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1	2	3	4	5	6
IX	2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	43.791.000,00
	3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
	4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	5	Pendapatan dari Penutupan Rekening	425765	-	-
	6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	-
	7	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	73.510.797,00
	8	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	3.707.000,00
	9	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	20.064.918,00
	10	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	425916	-	-
	11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	Penegakkan Hukum		-	1.336.800.200.000,00	1.124.077.754.513,00
X	- PNBP Fungsional		-	1.336.800.200.000,00	1.121.908.864.582,00
	1	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425829	1.336.800.200.000,00	1.121.908.864.582,00
	2	Pendapatan hasil Lelang Kayu Temuan dan hasil Lelang Tumbuhan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang	425619	-	-
	- PNBP Umum		-	-	2.168.889.931,00
	1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	-
	3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	533.641.823,00
	4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	-
	5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	58.092.051,00
	6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	68.456.037,00
	7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	1.132.412.029,00
	8	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	600.000,00
	9	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	425234	-	-
	10	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	11	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TA Yang Lalu	425915	-	-
	12	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	375.687.991,00
	13	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-

Lanjutan Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1	2	3	4	5	
X	14	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	425121	-	-
	15	Pendapatan Denda Lainnya	425839	-	-
	16	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	-	-
	17	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425991	-	-
	18	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	425991	-	-
XI	Pengendalian Perubahan Iklim		-	-	1.021.528.239,00
	- PNBP Umum		-	-	1.021.528.239,00
	1	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	83.346.595,00
	2	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
	3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	70.956.852,00
	4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	13.447.260,00
	5	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	841.530.600,00
	8	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	425121	-	-
	9	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	-	-
	10	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	-	12.246.932,00
	11	Pendapatan dari Pentupan Rekening	425765	-	-
	12	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	13	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	-
	14	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	15	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	425991	-	-
XII	Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3		-	-	2.348.677.342,00
	- PNBP Umum		-	-	2.348.677.342,00
	1	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	9.100.413,00
	2	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425829	-	-
	3	Pendapatan Denda Lainnya	425839	-	-
	4	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	-
	5	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	425132	-	2.000.000.000,00
	6	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-

Lanjutan Tabel 9.9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target Realisasi Negara Bukan Pajak Tahun 2024 (Rp)		
			MAP	Target	Penerimaan
1		2	3	4	5
XII	7	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	333.757.720,00
	8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	9	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	-	-
	10	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	5.819.209,00
	11	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	-	-
XIII	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		-	-	207.302.859,00
	- PNBP Umum		-	-	207.302.859,00
	1	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	171.889.464,00
	2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	2.702.000,00
	3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	-	-
	4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	19.789.395,00
	5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	-	-
	6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	-	-
	7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
	8	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	-	12.922.000,00
XIV	Badan Rawa Gambut		-	-	542.676.275,00
	- PNBP Umum		-	-	542.676.275,00
	1	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	530.883.336,00
	2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	-	11.792.939,00
	3	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	-	-
Jumlah				7.490.957.580.000,00	8.331.506.348.359,00

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Keterangan:
· MAP = Mekanisme Akuntansi dan Pelaporan
· - = Tidak ada penerimaan

Tabel 9.10 Nilai Neraca Barang Milik Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024

No	Nama Perkiraan	Jumlah (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persediaan	654.288.243.019	543.533.386.411	375.834.950.827	191.503.365.458	132.980.542.021
2	Tanah	9.975.448.946.436	9.993.102.760.376	10.002.886.232.495	9.907.215.832.087	9.807.410.728.766
3	Peralatan dan Mesin	3.586.431.265.499	3.572.287.591.378	3.332.938.107.800	3.668.148.641.455	4.018.019.252.608
4	Gedung dan Bangunan	3.569.013.985.624	3.895.519.488.811	4.056.368.562.738	4.173.178.648.747	4.321.342.291.241
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	500.778.165.894	525.979.806.667	550.023.794.958	564.294.204.499	608.691.931.073
6	Aset Tetap Lainnya	67.993.719.870	59.197.990.564	63.254.576.108	38.378.485.935	37.254.092.730
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	115.623.422.606	92.321.203.995	52.699.740.929	67.024.057.721	133.540.042.694
8	AKUMULASI PENYUSUTAN	-3.268.308.181.232	-3.525.189.222.747	-3.510.385.288.123	-3.773.474.106.902	-4.120.953.595.167
9	Properti Investasi	140.477.822.000	140.477.822.000	140.477.822.000	140.477.822.000	140.477.822.000
10	Aset Tak Berwujud	145.902.739.686	154.288.812.415	151.267.718.748	157.305.364.824	166.507.707.476
11	Aset Lain-lain	2.012.951.000.216	1.985.592.442.395	2.090.240.907.194	1.933.675.316.725	1.936.298.434.965
12	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	-631.139.035.303	-627.225.988.051	-725.900.311.311	-597.693.098.260	-569.149.895.189
Jumlah		16.869.462.094.315	16.809.886.094.214	16.579.706.814.363	16.470.034.534.289	16.612.419.355.218

Sumber : Sekretariat Jenderal, 31 Desember 2024

Tabel 9.11 Pagu Dan Realisasi Belanja Per Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024

No	Eselon I	Pagu Dan Realisasi Belanja Per Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024											
		Pegawai				Barang				Modal			
		Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02901 SEKRETARIAT JENDERAL	146.628.833.000	145.991.189.233	99,57%	294.122.766.000	281.762.308.432	95,80%	8.661.916.000	7.529.665.678	86,93%	4.449.413.515.000	4.352.883.163.343	96,86%
2	02902 INSPEKTORAT JENDERAL	33.234.925.000	33.200.000.951	99,89%	38.979.546.000	34.932.687.889	89,62%	2.428.635.000	565.521.790	23,29%	74.643.106.000	68.698.210.630	92,04%
3	02903 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	133.180.228.000	132.972.021.772	99,84%	167.234.949.000	154.731.004.169	92,52%	4.038.317.000	4.029.066.023	99,77%	304.453.494.000	291.732.091.964	95,82%
4	02904 DITJEN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	268.486.574.000	263.916.266.903	98,30%	1.015.345.238.000	979.125.895.369	96,43%	40.491.536.000	40.199.053.367	99,28%	1.324.323.348.000	1.283.241.215.639	96,90%
5	02905 DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	946.866.842.000	940.425.804.453	99,32%	759.073.109.000	737.943.513.655	97,22%	130.360.230.000	124.893.557.779	95,81%	1.836.300.181.000	1.803.262.875.887	98,20%
6	02906 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	204.538.586.000	204.124.696.960	99,80%	513.364.835.000	495.552.100.918	96,53%	65.582.423.000	65.508.130.450	99,89%	783.485.844.000	765.184.928.328	97,66%
7	02907 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	145.609.380.000	145.222.805.349	99,73%	132.649.358.000	123.080.967.984	92,79%	2.450.065.000	2.390.562.758	97,57%	280.708.803.000	270.694.336.091	96,43%
8	02908 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	125.844.302.000	125.714.180.403	99,90%	184.154.865.000	173.277.028.302	94,09%	70.262.072.000	55.866.017.497	79,51%	380.261.239.000	354.857.226.202	93,32%
9	02909 DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	77.951.252.000	77.540.582.876	99,47%	224.041.624.000	211.739.571.913	94,51%	10.004.212.000	9.996.577.492	99,92%	311.997.088.000	299.276.732.281	95,92%

Lanjutan Tabel 9.12 Pagu Dan Realisasi Belanja Per Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024

No	Eselon I	Pagu Dan Realisasi Belanja Per Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024													
		Pegawai				Barang				Modal				Total	
		Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10	02910 DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	179.919.580.000	179.483.514.971	99,76%	262.471.008.000	244.560.050.807	93,18%	59.577.463.000	59.034.417.268	99,09%	501.968.051.000	483.077.983.046	96,24%		
11	02911 DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	213.646.645.000	209.650.826.368	98,13%	215.645.292.000	209.727.998.418	97,26%	32.301.500.000	32.258.575.240	99,87%	461.593.437.000	451.637.400.026	97,84%		
12	02912 DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	49.137.438.000	48.974.850.352	99,67%	208.261.801.000	170.087.522.334	81,67%	2.901.550.000	2.890.875.620	99,63%	260.300.789.000	221.953.248.306	85,27%		
13	02913 DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	45.984.776.000	45.024.986.399	97,91%	286.145.949.000	228.730.055.483	79,93%	259.437.823.000	230.338.929.085	88,78%	591.568.548.000	504.093.970.967	85,21%		
14	02914 BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE	18.334.182.000	18.294.050.136	99,78%	936.534.464.000	561.120.626.449	59,91%	11.073.961.000	5.823.058.740	52,58%	965.942.607.000	585.237.735.325	60,59%		
Jumlah		2.589.363.543.000	2.570.535.777.126	99,27%	5.238.024.804.000	4.606.371.332.122	87,94%	699.571.703.000	641.324.008.787	91,67%	8.526.960.050.000	7.818.231.118.035	91,69%		

Sumber : Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), Juli 2025

Tabel 9.12Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Belanja	Realisasi Anggaran									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Pegawai	1.786.863.943.993	92,38%	1.756.649.532.716	97,96%	1.751.258.224.918	96,96%	1.788.592.941.856	98,28%	2.570.535.777.126	99,27%
2	Belanja Barang	4.896.393.714.560	94,68%	5.116.156.901.887	83,30%	4.207.405.844.677	97,78%	4.829.300.441.369	98,38%	4.606.371.332.122	87,94%
3	Belanja Modal	512.908.544.375	92,77%	543.446.370.223	85,16%	389.434.928.616	98,32%	548.689.814.609	98,43%	641.324.008.787	91,67%
Jumlah		7.196.166.202.928	93,96%	7.416.252.804.826	86,51%	6.348.098.998.211	97,58%	7.166.583.197.834	98,36%	7.818.231.118.035	91,69%

Sumber : Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan Laporan Audit Keuangan
Keterangan : - = Tidak ada data/bernilai 0

An aerial photograph of a tropical coastline. On the left, the ocean is a deep blue-green color, with white foam from waves washing onto a dark, black sand beach. The beach curves along the shoreline. To the right of the beach is a thick, continuous forest of tall palm trees. In the background, there are large, green, forested mountains under a blue sky with some white clouds. The word "LAMPIRAN" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially covering the beach and the palm forest.

LAMPIRAN

Sumber Foto: Ade Suryaman PDASRH

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan	Keterangan Fungsi
1	APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Unit yang melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan
2	APL	Area Penggunaan Lain	Areal bukan kawasan hutan
3	ASN	Aparatur Sipil Negara	Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa.
4	BBKSDA	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	Unit yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di kawasan konservasi seperti Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru.
5	BBTN	Balai Besar Taman Nasional	Unit yang memiliki perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.
6	BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi
7	BTN	Balai Taman Nasional	Unit yang menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan taman nasional sesuai peraturan perundang-undangan
8	CA	Cagar Alam	Kawasan konservasi yang dilindungi secara ketat karena memiliki flora/fauna endemik atau unik. Tidak untuk kunjungan umum.
9	DAS	Daerah Aliran Sungai	Sebagai daerah tangkapan air, pengatur aliran air, penyedia air bagi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta berperan dalam mencegah banjir dan kekeringan
10	DBH	Diameter At Breast Height/ Diameter Setinggi Dada	Dapat mengestimasi volume kayu, biomassa, dan membantu dalam pengelolaan serta penelitian hutan
11	DN	Dalam Negeri	Menunjukkan asal atau tujuan kegiatan/produk berasal dari wilayah Indonesia
12	HAS	Hutan Suaka Alam	Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

DAFTAR SINGKATAN (Lanjutan)

No	Singkatan	Kepanjangan	Keterangan Fungsi
13	HD	Hutan Desa	Sebagai konservasi lingkungan, perlindungan tata air, serta penyediaan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
14	HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu	Hasil hutan hayati selain kayu, baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan Negara
15	HHK	Hasil Hutan Kayu	Sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, terutama dalam industri konstruksi, mebel, dan bahan baku berbagai produk
16	HHK-HA	Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam	Sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia dan industri, serta memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan.
17	HHK-HT	Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman	Sumber bahan baku industri dan konstruksi.
18	HK	Hutan Konservasi	Kawasan hutan yang melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta menjaga keseimbangan ekosistem
19	HKM	Hutan Kemasyarakatan	Dapat memberdayakan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, dan menjaga kelestarian fungsi hutan serta lingkungan hidup
20	HL	Hutan Lindung	Kawasan hutan dengan fungsi pokok melindungi sistem penyangga kehidupan.
21	HP	Hutan Produksi	Kawasan hutan untuk produksi hasil hutan, boleh ditebang dengan izin tertentu.
22	HP	Hutan Produksi Tetap	Menyediakan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk kepentingan industri, ekonomi, dan masyarakat, sambil tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungannya.
23	HPK	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Kawasan hutan yang bisa dilepas untuk penggunaan non-kehutanan (pertanian, dll).
24	HPT	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan hutan produksi dengan sistem tebang pilih, pengelolaan lebih hati-hati.

DAFTAR SINGKATAN (Lanjutan)

No	Singkatan	Kepanjangan	Keterangan Fungsi
25	HTR	Hutan Tanaman Rakyat	Unit penyediaan kayu dan hasil hutan non-kayu, peningkatan ekonomi masyarakat, serta konservasi tanah dan air.
26	IPAH	Instalasi Pemanenan Air Hujan	Unit yang menyediakan sumber air bersih alternatif, mengurangi ketergantungan pada air tanah atau PDAM, mengurangi risiko banjir, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan
27	IPHPS	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial	Dapat memberikan akses legal kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar atau dalam kawasan hutan, untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.
28	IPJLPB	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	Untuk mengatur pemanfaatan sumber daya panas bumi secara berkelanjutan, memastikan konservasi kawasan konservasi, dan memberikan manfaat ekonomi serta energi bagi masyarakat.
29	KARHUTLA	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	Suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/ atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
30	KK	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.
31	KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan	Unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan secara lestari dan efisien.
32	KPHK	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	Unit pengelola kawasan konservasi seperti taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam. Dikelola oleh Ditjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem).
33	KPHL	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Unit pengelola kawasan hutan lindung, berfungsi menjaga sistem penyangga kehidupan (air, tanah, iklim). Pembinaannya oleh Ditjen PKTL dan Ditjen PHL.
34	KSA	Kawasan Suaka Alam	Sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, serta sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan

DAFTAR SINGKATAN (Lanjutan)

No	Singkatan	Kepanjangan	Keterangan Fungsi
35	KSA/KPA	Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam	Untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sistem penyangga kehidupan.
36	KTH	Kelompok Tani Hutan	Sebagai wadah pembelajaran masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan
37	KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, menjaga kelestarian hutan, dan mengembangkan usaha produktif berbasis hasil hutan.
38	LN	Luar negeri	Menunjukkan asal atau tujuan kegiatan/produk berasal dari atau ke luar Indonesia
39	LVL	Laminated Veneer Lumberp	Sebagai material struktural yang kuat dan stabil, yang banyak digunakan dalam konstruksi bangunan, pembuatan furnitur, dan aplikasi lainnya.
40	NTE	Nilai Transaksi Ekonomi	Sebagai indikator kinerja ekonomi dari kegiatan yang dilakukan di wilayah perhutanan sosial, seperti penjualan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.
41	PBPH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Sebagai instrumen untuk mengatur dan memastikan kegiatan pemanfaatan hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
42	PBPHH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan	Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan pengolahan hasil hutan.
43	PIAPS	Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	Sebagai acuan untuk menentukan area kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial.
44	PKH	Penggunaan Kawasan Hutan	Sebagai penyangga ekosistem, penyedia sumber daya, dan perlindungan lingkungan tetap dipertahankan.
45	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Sumber pendanaan alternatif selain pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah, serta membantu mengoptimalkan aset negara dan meningkatkan pelayanan publik.

DAFTAR SINGKATAN (Lanjutan)

No	Singkatan	Kepanjangan	Keterangan Fungsi
46	PNS	Pegawai Negeri Sipil	Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa.
47	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Unit yang mengisi jabatan tertentu dalam pemerintahan, melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
48	RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Unit yang menjaga daya dukung, produktivitas, dan peran hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.
49	RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Pedoman dalam penataan ruang wilayah provinsi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan pembangunan serta pemanfaatan ruang
50	SIRUSA	Sistem Informasi Rujukan Statistik Nasional	Sebagai unit yang menyediakan informasi metadata kegiatan statistik di Indonesia, membantu kegiatan statistik di berbagai instansi, mengembangkan standar statistik, dan menghindari duplikasi kegiatan statistik
51	SK	Surat Keputusan	Bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan digunakan untuk menetapkan, mengarahkan, atau menginformasikan tindakan atau keputusan tertentu.
52	SKIL	Surat Keputusan Izin Lingkungan	Merupakan izin resmi yang mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam izin usaha atau kegiatan, baik berbasis AMDAL maupun UKL-UPL
53	SKKL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	Dokumen keputusan resmi yang menyatakan bahwa rencana suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak secara lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL
54	SM	Suaka Margasatwa	Kawasan konservasi untuk melindungi satwa liar dan habitatnya.
55	TB	Taman Buru	Kawasan untuk kegiatan perburuan terkendali, pendidikan, dan penelitian.

DAFTAR SINGKATAN (Lanjutan)

No	Singkatan	Kepanjangan	Keterangan Fungsi
56	TAHURA	Taman Hutan Raya	Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
57	TN	Taman Nasional	Kawasan konservasi dengan ekosistem asli yang dikelola untuk tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata alam, dan rekreasi.
58	TORA	Tanah Obyek Reforma Agraria	Untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
59	TSL	Tumbuhan dan Satwa Liar	Berperan sebagai sumber pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, dan sumber pendapatan. Selain itu, juga menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung keanekaragaman hayati, dan berkontribusi pada keindahan alam serta nilai budaya.
60	TWA	Taman Wisata Alam	Kawasan konservasi yang dikelola untuk tujuan pariwisata alam dan edukasi.
61	UPT	Unit Pelaksana Teknis	Sebagai unsur pelaksana teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada suatu instansi atau lembaga induk
62	UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah	Unit yang perpanjangan tangan dinas/badan dalam memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan lain-lain.
63	UPT	Unit Pelaksana Teknis	Sebagai unsur pelaksana teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada suatu instansi atau lembaga induk
64	UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah	Unit yang perpanjangan tangan dinas/badan dalam memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan lain-lain.



Kementerian Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2, Jl. Jenderal Gatot
Subroto - Jakarta 10270, Po Box 6505, Indonesia.



(021) 5730212



@pusdatin_kehutan



pusdatin@kehutan.go.id



<http://kehutan.go.id>

STATISTIK KEMENTERIAN KEHUTANAN

ISSN 3109-1741



9 773109 174002